

REAKSI MASYARAKAT SULAWESI SELATAN TERHADAP NEGARA INDONESIA TIMUR



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan
Arkeologi Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh :

ASRULLAH M.

88 07 316

UJUNG PANDANG

1994

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terbit	20-12-94
Asal	-
P.	21 dua/ eks
	17/12/94
No.	951702 103
No. klas.	

REAKSI MASYARAKAT SULAWESI SELATAN
TERHADAP NEGARA INDONESIA TIMUR



S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan
Arkeologi Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh :

ASRULLAH M.

88 07 316

UJUNG PANDANG

1994

PERPUSTAKAAN-PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	20-12-94
Asal	-
P.	21 dua/ eks
	17/12/94
	951702 103
No. simpan	

REAKSI MASYARAKAT SULAWESI SELATAN
TERHADAP NEGARA INDONESIA TIMUR

O l e h,

ASRULLAH M.

88 07 316

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan
Arkeologi Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

U J U N G P A N D A N G

1 9 9 4

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 1312/PT04.HS.FS/C/1992 tanggal 27 Juni 1992 dengan ini kami menerima dan menyetujui Skripsi ini. .

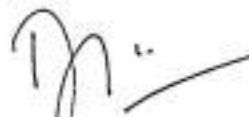
Ujung Pandang, 1 September 1994

Pembimbing Utama,



Dr. Mukhlis Paeni

Pembantu Pembimbing,



Drs. Daud Limbugau, SU.

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan,

u.b. Ketua Jurusan
Sejarah dan Arkeologi,



Drs. Daud Limbugau, SU.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SAstra

Halaman Penerimaan

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 September 1994 Panitia Ujian menerima baik Skripsi dengan judul :

REAKSI MASYARAKAT SULAWESI SELATAN TERHADAP
NEGARA INDONESIA TIMUR

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan Arkeologi program studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

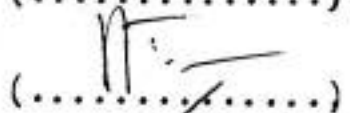
Ujung Pandang, 14 September 1994

PANITIA UJIAN

K e t u a : Drs. Baharuddin Batalipu



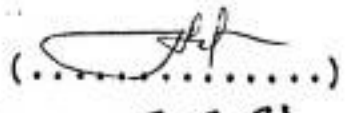
Sekretaris : Drs. Daud Limbugau, S.U.



Anggota 1. : Dr. Edward L. Poelinggomang, M.A.



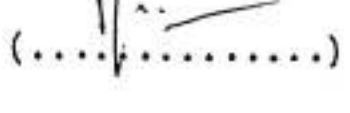
2. : Drs. Bambang Sulistyono, M.S.



3. : Dr. Mukhlis Paeni



4. : Drs. Daud Limbugau, S.U.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Masalah dan pemobatan Masalah	7
1.3 Metodologi.....	13
BAB II LATAR BELAKANG PERISTIWA	16
2.1 Proklamasi Kemerdekaan R.I.	16
2.2 Pemerintahan R.I. Propinsi Sulawesi	23
2.3 Keoatangan Sekutu dan NICA	27
2.4 Situasi menjelang Terbentuknya Negara Indonesia Timur	40
BAB III NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT)	48
3.1 Proses Terbentuknya NIT	49
3.2 Makassar Sebagai Ibukota NIT	67
BAB IV REAKSI RAKYAT TERHADAP NEGARA INDONESIA TIMUR	75
4.1 Sulawesi Selatan Dalam NIT	75
4.2 Reaksi Tokoh-tokoh Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur	85

4.3 Reaksi Organisasi Kepemudaan Terhadap Negara Indonesia Timur.....	93
4.4 Runtuhnya Pemerintahan NIT.....	102
BAB. V KESIMPULAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	125
DAFTAR SINGKATAN.....	128
DAFTAR RALAT.....	129
LAMPIRAN I PERATURAN PEMBENTUKAN NIT.....	131
LAMPIRAN II KEPUTUSAN LETNAN GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA.....	139
LAMPIRAN III SUSUNAN BADAN PERWAKILAN SEMENTARA DAN FRAKSI-FRAKSI DALAM PERWAKILAN SEMENTA- RA NEGARA INDONESIA TIMUR.....	141
LAMPIRAN IV PHOTO-PHOTO.....	142

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji dan syukur yang sebesar-besarnya kehauirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan taufik-Nyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana-rencana yang telah penulis susun sejak awal hingga akhir penulisan.

Skripsi ini berjudul "Reaksi Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur," yang akan dipresentasikan pada ujian akhir dalam rangka penyelesaian studi pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Hasanudin.

Setiap ada aksi umumnya menimbulkan reaksi, ketika Negara Indonesia Timur (NIT) berdiri yang diproklamirkan di Denpasar Bali pada tanggal 24 Desember 1946, muncullah berbagai reaksi, baik dalam tubuh pemerintahan NIT itu sendiri maupun di luar NIT. Reaksi tersebut timbul dikarenakan NIT dibentuk atas prakarsa Belanda yang ingin kembali mewujudkan kedaulatannya di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia Timur umumnya dan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya sangat menentangnya. Yang menarik dari boyek studi ini yakni adanya sebahagian golongan yang ingin tetap mempertahankan berdirinya NIT, sebahagian lain ada yang ingin memboikarkannya.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala-kendala dari awal hingga akhir penulisan, baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya non teknis. Namun demikian penulis tetap menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam pembahasannya, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Skripsi ini tersusun atas bantuan dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nadjamuddin, MSc. selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin atas segala bimbinganannya.
2. Bapak Drs. Daud Limbugau, SU. selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk.
3. Ibu Dra. Ny. Ida S, Harun, selaku Sekretaris Jurusan Sejarah dan Arkeologi yang juga senantiasa memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk.
4. Bapak Dr. Mukhlis Paeni dan Bapak Drs. Daud Limbugau, SU. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dan Bapak G.R. Pantouw, yang telah banyak membantu memberikan informasi-informasi mengenai obyek studi yang penulis garap.
6. Bapak Kepala Korpri Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya yang banyak membantu memberikan pelayanan dan fasilitas selama penulis melakukan penelitian,

7. Ayahanda H. Mansyur, Kakak-kakak (H. Atira, Amirullah dan Drs. Ansharullah) serta adik tercinta (Amril) yang paling berjasa dalam perjalanan hidup penulis yang banyak memberikan dukungan moral dan material sejak penulis memasuki jenjang pendidikan hingga saat ini.
8. Kepada seluruh rekan-rekan yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan, khususnya kepada saudara Dra. Bau Atika dan Zulkifli Lukman.
9. Segenap civitas Akademika Universitas Hasanuddin, khususnya terhadap staf Dosen, karyawan Fakultas Sastra yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wataala membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan Saudara-saudari. Dan kepada pembaca penulis senantiasa menantikan saran-saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun, sehingga dapat memenuhi harapan bagi semua pihak yang memoutungkannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Ujung Pandang, September 1994

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "Reaksi Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur." Berdasarkan judul tersebut, maka sasaran studi ini, ialah wilayah Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya dalam tahun 1945-1950. Kejadian-kejadian menyangkut kegiatan pemerintahan NIT yang didukung oleh Nica/Knil dalam periode tahun 1945-1950 dapat dikatakan menarik untuk diketahui dan diteliti.

Studi ini berusaha menelusuri dan mengungkapkan sekitar berdirinya pemerintahan NIT di Sulawesi Selatan dan Makassar sebagai ibu kotanya. Pembentukan NIT yang diproklamasikan pada tanggal 24 Desember 1946 mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi, reaksi itu timbul baik dalam tubuh pemerintahan NIT itu sendiri maupun di luar NIT (rakyat). Adanya reaksi ini dikarenakan NIT dipandang sebagai negara boneka bentukan Belanda yang berusaha mencengkeram kembali Indonesia. Padahal sebenarnya pembentukan NIT merupakan suatu upaya mendirikan suatu negara bagian yang berotonomi secara lokal dari Negara Indonesia Serikat.

Di dalam periode tahun 1945-1950, kota Makassar menjadi pusat kekuasaan dan ajang pertentangan politik dari berbagai aliran. Ketika NIT berdiri ada dua aliran politik yang dominan; yang pertama kelompok unitaris dan yang kedua kelompok federalis. Yang pertama berupaya kearah terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua kelompok federalis yang berpendapat bahwa NIT harus di pertahankan keutuhannya karena ia merupakan wujud dari sistem federal yang tepat untuk Indonesia mengingat keadaan geografis, dan corak budayanya yang beraneka ragam.

Dalam perkembangan selanjutnya, nampak bahwa pihak unitaris mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dalam parlemen NIT, maupun dari luar parlemen, dalam hal ini rakyat Sulsel. Pada pertengahan tahun 1950 muncul gerakan-gerakan rakyat yang sebelumnya dilancarkan melalui; mosi-mosi, resolusi-resolusi, rapat-rapat raksasa, pernyataan-pernyataan, demonstrasi-demonstrasi, yang pada bulan Agustus berkembang menjadi proklamasi-proklamasi dan pembentukan pemerintahan darurat. Dimana kesemuanya menuntut dibubarkannya NIT.

Melihat kenyataan dan hebatnya arus yang menginginkan persatuan, maka pemerintah NIT tidak dapat bertahan lagi dan meleburkan diri kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Alasan Memilih Judul

Bangsa Indonesia mengalami perjalanan historis yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Pahit getir, suka dan duka, penindasan, penyelewengan, politik *divide et impera*, dan pemerkosaan hak-hak azasi manusia lainnya turut mewarnai dan melengkapi perjalanan perjuangan bangsa Indonesia di balik penderitaan dan kegetiran hidup yang telah lama dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun rekayasa untuk pencapaian Proklamasi Kemerdekaan telah lama diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 15 Agustus 1945, saat yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Mimpi buruk telah berakhir. Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah masa tiga setengah tahun, mulai terlihat tanda-tanda berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia menyaksikan kepergian Jepang dengan perasaan yang sangat gembira. Bukan percuma adanya peristiwa Aceh yang berunyi "anjing pergi babi datang". Tekanan yang dirasakan sebagai akibat pendudukan Jepang bolak dikatakan tiak tertahankan, terutama di tahun terakhir peperangan.

Dua hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia diproklamkan di Jakarta. Tanggal ini merupakan titik kulminasi dari seluruh proses dalam usaha untuk memperjuangkan pencapaian kemerdekaan, juga sekaligus sebagai awal dan klimaks revolusi bangsa Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia keseluruhan pelosok tanah air, bahkan dunia pada umumnya disambut dengan luapan kegembiraan rakyat Indonesia. Namun peristiwa itu segera disusul dengan revolusi fisik yang menandai babak baru dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa.

Babakan baru yang mewarnai perjalanan perjuangan bangsa Indonesia juga turut dirasakan oleh rakyat Sulawesi Selatan. Revolusi fisik yang dialami memberikan reaksi-reaksi yang justru memangkitkan semangat semua komponen perjuangan yang ada di Sulawesi Selatan, yang bertindak secara radikal dan keras.¹ Diperkuat oleh pendapat Sartono Kartodirdjo yang menyatakan bahwa dalam dasawarsa abad ke-20 bagi bangsa Indonesia merupakan periode mobilisasi politik massa yang bercorak radikal serta penuh kekerasan.¹ Aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara aktif oleh semua komponen perjuangan yang dimulai dari awal pertumbuhan dan perkeoangannya, telah memberikan karakteristik kesejarahan tersendiri dalam perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan. Semua komponen yang ikut berjuang baik secara individu maupun secara kolektif, pada umumnya bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sulawesi Selatan selama revolusi fisik tahun 1945-1949 menurut George McT. Kahin menonjol karena menjadi

¹Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional II (Jakarta: 1990), hal. 152.

tempat perlawanan paling hebat di luar Republik menentang pengembalian kekuasaan Belanda, dan sekaligus menjadi markas besar negara yang paling berkemungkinan di antara negara-negara federal yang disponsori Belanda, yakni Negara Indonesia Timur (NIT). Disamping itu Makassar berfungsi pula sebagai ibu kota NIT.

Demikianlah sejak tahun 1945 hingga tahun 1950, Makassar berubah menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus menjadi ajang pertentangan politik dari berbagai aliran. Ketika NIT berdiri ada dua aliran yang dominan dan saling didukung oleh kekuatan bersenjata masing-masing. Yang pertama kelompok unitaris dan yang kedua kelompok federalis. Yang pertama berupaya ke arah terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua kelompok federalis yang berpendapat bahwa NIT harus dipertahankan keutuhannya karena ia merupakan wujud dari sistem federal yang tepat untuk Indonesia mengingat keadaan geografis, dan corak budayanya yang beraneka ragam.

Bertolak dari keinginan untuk merekonstruksikan sejarah lokal Sulawesi Selatan, khususnya sejarah kontemporer 1945-1950, dimasa revolusi fisik betul-betul penuh momentum yang bersejarah sehingga menimbulkan perasaan ingin tahu untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tersebut. Perasaan ingin tahu dituntun oleh pendapat yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk yang dipaparkan dalam buku Mengerti Sejarah sebagai berikut:

"Kita dapat memutuskan untuk mempelajari sejarah dengan berbagai alasan. Di antaranya alasan-alasan itu

ialah suatu rasa ingin tahu yang iseng mengenai masa lampau keluarga kita atau tempat tinggal kita, untuk menerangkan kepada diri-sendiri asal-usul budaya kita suatu minat patriotik kepada asal-usul negeri kita, kehendak untuk mengerti latar belakang sosial dan suasana intelektual ataupun untuk Chercher la femme (atau l'homme) seorang pengarang, seniman, ilmuwan atau pemimpin besar yang karyanya telah menimbulkan rasa kagum, harapan bahwa dengan mengerti perkembangan masa lampau sesuatu masalah mutakhir, kita dapat lebih mengerti implikasi-implikasi masa kininya, suatu pencarian untuk menemukan "pelajaran-pelajaran sejarah" yang akan membantu manusia jaman sekarang untuk memecahkan masalah-masalahnya yang sekarang, keinginan untuk menemukan di dalam bacaan sejarah ilustrasi-ilustrasi yang efektif bagi atau pencocokan dari suatu argumen atau suatu generalisasi, suatu pendalaman mengenai sesuatu periode pada masa lampau untuk masa lampau itu sendiri, dan suatu pengarian akan suatu pekerjaan yang terpelajar dan sopan.

Hal lain yang mendorong penulis mengangkat topik ini ke dalam sebuah karya ilmiah yakni adanya pendapat umum di Indonesia sampai dewasa ini, cenderung untuk mengatakan bahwa NIT merupakan alat penjajahan untuk mewujudkan restorasi kedaulatan belanda di Indonesia. Pada hal sebenarnya pemertukan NIT merupakan suatu upaya mendirikan negara bagian yang otonomi secara lokal dari Negara Indonesia Serikat (RIS). Dr. H.J. van Mook mengemukakan suatu alasan dan pemikiran yang mungkin diterima dalam hubungannya dengan pemertukan NIT,³ bahwa dalam suatu negara federalis dapat dijamin kehidupan dari segenap golongan, dengan demikian dapat ditempatkan suatu pembagian tugas yang

² Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta, 1986), hal. 118.

³ Harsojo, et. al., Propinsi Sulawesi (Makassar, 1953), hal. 80.

terdapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pembentukan NIT Belanda turut memainkan peranan, namun demikian perlu disadari bahwa Makassar (kini Ujung Pandang) sebagai basis lahirnya NIT bahkan menjadi ibu kota NIT, diperlukan dukungan dari masyarakat setempat. Olehnya itu pembentukan NIT melibatkan juga beberapa tokoh politik Sulawesi Selatan, misalnya; Naojemoedin Dg. Malewa, Baso Dg. Malewa, Abdoullah Dg. Mappuji, Sonca Dg. Mattayang, Husain Puang Limboro dan sebagainya. Keterlibatan mereka dalam proses pembentukan NIT dapat dilinat setelah berlangsungnya Konferensi Malino dimana utusan Sulawesi Selatan berpendapat bahwa sebaiknya mengikuti jejak atau bentuk Amerika Serikat, suatu negara-negara bagian yang berdiri sendiri dan langsung memerintah daerahnya secara otonomi.⁴

Dengan memperhatikan gagasan van Mook dan pendapat utusan Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas dapat dikatakan bahwa NIT bukan alat penjajahan atau negara boneka Belanda semata-mata, tetapi ia lahir dari kesadaran sebahagian masyarakat yang menginginkan Negara Indonesia berbentuk federal. Mereka percaya bahwa bentuk federal akan memberikan kesempatan luas kepada pemerintah tiap-tiap negara bagian untuk mengarahkan potensi wilayahnya masing-masing. Diungkapkan pula oleh Ise Anak Agung Goe Agung dalam suatu wawancara singkat di Malino sehubungan diselenggarakannya

⁴ Ibid.

Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur tanggal 16 hingga 17 Juli 1992, mengemukakan bahwa; "dalam segala keterbatasan, kita saat itu juga perlu bersyukur karena berhasil membentuk sekaligus menyusun satu pemerintahan Negara Indonesia Timur yang teratur. Pada sisi lain, kekuatan nasional bersama republik menentang Belanda. Olehnya itu NIT bukan bentukan Belanda, sebab ketika Belanda kembali ingin berkuasa kita lawan dia dengan senjata dan segala pengorbanan." Lebih lanjut dipaparkan oleh Anak Agung bahwa NIT waktu itu tidak memiliki militer karena memang dibentuk bukan untuk memisahkan diri dengan republik. Bagaimana mungkin kita bisa terpisah dengan republik sebab kita tidak punya militer, oleh karena salah satu syarat negara terletak pada militernya.⁴

Menilik dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa pembentukan NIT dapat dinilai sebagai kreatifitas lokal yang menginginkan negara Indonesia berada dalam wujud federal yang demokratis. Hal ini diperkuat dari keterangan Bapak Dr. Mukhlis Paeni dalam jumpa pers tanggal 9 Juli 1992 sehubungan akan berlangsung seminar sejarah di Malino yang menyatakan bahwa ide membangun Indonesia Bagian Timur, ada sejak bentuk negara ini menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Karena saat itu konsep-konsep dan pemikiran yang cemerlang, telah dirumuskan.⁵

⁴Peoman Rakyat. "Negara Indonesia Timur Tak Punya Militer." (Ujung Pandang: 10 Juli 1992), hal. 01.

⁵Dr. Mukhlis Paeni. "Ide Membangun IBT Sejak Negara RIS." (Ujung Pandang: Peoman Rakyat, 10 Juli 1992), hal.1

Demikianlah penulis memilih obyek studi ini dimana di harapkan agar penulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulisan sejarah selanjutnya dan juga dapat menambah bahan bacaan sejarah. Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khasana "sejarah lokal" khususnya, dan studi sejarah eneneumental pada umumnya. Penulis yakin bila mana studi ini berhasil dilakukan, akan membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang bagaimana hebatnya perjuangan dan pergulatan masyarakat Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan NIT, disamping dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dewasa ini.

1.2 Masalah dan Pembatasan Masalah

Berangkat dengan suatu keinginan yang termaktub diatas dan sesudah membaca salinan sebanyaknya tentang peristiwa-peristiwa historis dimasa lampau, penulis mendapatkan beberapa hal-hal penting pasca Proklamasi Kemerdekaan yang perlu diketengahkan.

Dalam menelusuri jejak sejarah yang telah berlalu baik melalui pencatatan serta wawancara sepintas lalu dengan tokoh-tokoh pelaku sejarah dimasa revolusi fisik di dalam perjuangan menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia, terkisah suatu peristiwa yang cukup menarik serta kurang mendapat perhatian, sehingga perkembangan-perkembangan, kejadian-kejadian yang akhirnya menimbulkan peristiwa tersebut, tidak diketahui.

Keinginan penulis mengangkat peristiwa, yakni "Reaksi

Masyarakat Sulawesi Selatan Terhadap Negara Indonesia Timur (NIT)." Karena diketahui NIT yang diproklamasikan di Denpasar Bali tanggal 24 Desember 1946 tidak mendapat tempat dihati sebahagian rakyat di Indonesia Bagian Timur, khususnya rakyat Sulawesi Selatan. NIT yang disponsori Belanda menginginkan Inuonesia berbentuk kerajaan federasi, dengan Necherland, Indonesia, Suriname, dan Curaqao menjadi anggota-anggota yang sama sederajat.⁶ Dimana akan diperbolehkan mengurus masalah dalam negerinya sendiri; menggunakan potensi-potensi/sumber-sumber dayanya sendiri secara bebas. Struktur feoederal ini sangat menarik bagi kaum politikus Sulawesi Selatan. Mr. Ioe Anak Agung Gde Agung mengatakan bahwa "memang benar dasar ketatanegaraan NIT adalah federalisme. Tetapi buat kami di NIT, federalisme hanya merupakan konsepsi administratif ketatanegaraan yang pada waktu itu dianggap paling tepat untuk digunakan sebagai dasar pembangunan struktur administresi pemerintah di Inuonesia."⁷

K.C. Wheare dalam bukunya "Feueral Goverment" mengemukakan tentang bentuk negara feoederal bahwa:

"Kukuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah feoederal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang

⁶ Harold M. Vinacke, A History Of the Far East In Modern Times (trans). (Kuala Lumpur: 1978), hal. 1080.

⁷ Harian Fajar. "Konferensi Malino 1946 Bukan Penghianatan" (Ujung Pandang: 20 Juli 1992), hal. 01.

tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dalam soal hubungan luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah negara bagian; seandainya dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya, pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah federal."⁸

Dari apa yang dikemukakan oleh K.C. Wheare mengenai prinsip negara federal nyatalah bahwa suatu negara bagian akan dapat memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah tiap-tiap negara bagian untuk mengarahkan potensi wilayahnya masing-masing.

Setelah NIT berdiri sebagai salah satu negara bagian maka pemerintah dan fungsionaris lembaga-lembaga negara lainnya mulai menjalankan tugasnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi lain dari apa yang diharapkan. Dalam tubuh pemerintahan NIT diwarnai oleh pertentangan-pertentangan dan perdebatan antara golongan unitaris dan golongan federalis. Sementara itu golongan pemuda menjadikan gedung Parlemen NIT yang berdiri kokoh di belakang hotel Empress (sekarang Perguruan Athira) sebagai ajang protes dan unjuk rasa. Ratusan pelajar menuntut dibubarkannya NIT, karena mereka menganggap NIT, bentukan Belanda yang ingin kembali memecah belah persatuan.⁹ Oleh karena itu, pelajar menolak terjadinya perpecahan. Pendek kata, pelajar menuntut tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: 1986), hal. 141.

⁹ Pedoman Rakyat. "Sulsel, 'Kanker Ganas' Dalam Tubuh Pemerintahan Kolonial Belanda." (Ujung Pandang: 16 Juli 1992), hal. 01.

Lebih-lebih lagi setelah Perdana Menteri pertama Nadjamuddin Dj. Malewa berpidato di depan corong radio Jakarta tanggal 22 Juli 1947. Pidato mana yang menyetujui atas aksi militer Belanda I terhadap R.I. maka kemarahan dan kejenkelan hati rakyat terhadap Pemerintah NIT menjadi-jadi, sedangkan pemuda-pemuda yang banyak berlindung di hutan-hutan Sulawesi Selatan, dengan serempak memperlihatkan pula kegiatannya menghantam dan mencegat alat-alat kekuasaan Belanda atau NIT dimana dan kapan saja mendapat kesempatan.¹⁰

Begitu pula dengan dilaksanakannya penyerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Indonesia Serikat, tidak diterima sebagai titik akhir perjuangannya. Tidak lama setelah RIS terbentuk, ternyata muncul arus yang sangat kuat untuk bergabung kembali dengan Republik. Arus tersebut dengan cerdik kemudian berhasil dimanfaatkan baik oleh para tokoh republikan dalam Pemerintahan RIS maupun oleh Pemerintahan RI Yogyakarta. Perdana Menteri Dr. Abdoul Halim dari Yogya mengirim banyak utusan ke berbagai negara/daerah bagian guna menyadarkan mereka dan mengajak untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia usaha ini berhasil, dalam tempo tiga bulan sesudah lebih separuh negara/daerah bagian menyatakan membubarkan diri dan bergabung kembali dengan RI.

¹⁰ Kementerian Penerangan RI. Propinsi Sulawesi (Makassar: 1953), hal. 133.



Sementara itu di dalam Parlemen NIT sendiri telah di dominasi oleh kaum republiken, bahkan banyak yang sebelumnya pro-Belanda berbalik ke pro-Republik. Tampilnya Lanto Daeng Pasewang yang memimpin fraksi kesatuan mengajukan mosi pembubaran NIT. Di luar Parlemen NIT muncul kelompok-kelompok yang menamakan diri kaum "Republiken" menyelenggarakan rapat di Polongbangkeng. Pertemuan itu berakhir dengan dibentuknya Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPPRI) tanggal 7 Pebruari 1950. Perkumpulan ini kemudian berjuang pula, baik melalui parlemen maupun di luar parlemen menuntut agar NIT dibubarkan. Kegiatan yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk demonstrasi rakyat pada tanggal 17 Maret 1950.¹¹

Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 1945 hingga 1950 telah bermunculan organisasi-organisasi baik yang bergerak dibidang politik maupun yang berjuang dengan kekuatan bersenjata, yang kesemuanya bercita-cita demi tegaknya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

G.H. Kahin menulis bahwa "selama revolusi Nasional Indonesia 1945-1950, maka Sulawesi Selatan mendapat kehormatan sebagai daerah di luar Republik Indonesia yang melakukan perlawanan paling sengit, tiada henti, sampai darah pejuang menyiram tanah, sebagai bukti perlawanan rakyat untuk mencegah kembalinya Belanda berkuasa."¹²

¹¹ Ibid, hal. 167.

¹² Pedoman Rakyat, Ibid.

Demikian pula halnya Jenderal A.H. Nasution menulis, rakyat Sulsel melancarkan perang gerilya yang paling dahsyat dan gigih serta berhasil membuat kantong-kantong Republik Indonesia di Polongbangkeng, Pare-Pare, Palopo, dan sekitarnya.¹³

Akibat hebatnya arus yang menginginkan persatuan, maka pada pertengahan tahun 1950 muncul gerakan-gerakan rakyat yang dilancarkan dengan cara, mosi-mosi, resolusi-resolusi, rapat-rapat raksasa, pernyataan-pernyataan, demonstrasi-demonstrasi, yang pada akhirnya menjadi proklamasi-proklamasi dan pembentukan pemerintahan darurat. Melihat hal tersebut maka NIT akhirnya dibubarkan tanggal 15 Agustus 1950, dan atas pidato Kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1950 dinyatakan kembali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

✓ Bertolak dari uraian permasalahan berupa gambaran singkat kronologis peristiwa diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Mengapa reaksi itu timbul terhadap Pemerintahan Negara Indonesia Timur.
- Dalam bentuk apa reaksi itu ditimbulkan terhadap Pemerintah Negara Indonesia Timur.
- bagaimana situasi politik selama masa Pemerintahan NIT di daerah Sulawesi Selatan khususnya Makassar.

dalam pembahasan ini dirasa perlu memberikan batasan

¹³ ibid.

masalah agar penulis tidak jauh melangkah dari apa yang akan dibahas. Adapun scope spasialnya yakni di daerah Sulawesi Selatan, namun penulis memberi penekanan khusus pada wilayah kota Makassar sebagai ibu kota NIT. Namun demikian tidak berarti bahwa kaitan dengan daerah luar atau daerah lain tidak disinggung sepanjang memiliki hubungan dengan obyek studi ini dan dipandang dapat sebagai pelengkap penjelasan atau pemahaman.

Batasan biografi bukan ditentukan berdasarkan kelompok etnis tetapi lebih difokuskan pada penduduk yang berdiam dalam wilayah studi. Tentunya menyangkut banyak kelompok etnis seperti, Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Ambon, Jawa, Timor, dan lain-lain. Namun demikian dalam pembahasannya tidak dikhususkan perhatian pada etnisitas kelompok-kelompok itu dipandang sebagai satu komunitas yang mendiami kota Makassar,

Selanjutnya scope temporal dalam penulisan ini diawali sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan dibubarkannya NIT tanggal 15 Agustus 1950.

1.3 Metodologi

Dalam metode ilmu sejarah ada empat tahap yang dilalui, dimulai dari awal hingga masuk pada tahap penulisan, yaitu: 1) Heuristik; 2) Kritik; 3) Interpretasi; 4) Historiografi. Keempat tahap inilah yang menjadi metodik sejarah untuk mencapai tujuan-tujuan kesejarahan. Walaupun keempat ini dijelaskan dalam bagian-bagian tersendiri

namun seluruhnya pada dasarnya satu kesatuan yang harus utuh. Bahkan dalam prakteknya tiyak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Sebagai langkah awal penulisan yaitu, penulis memakai penelitian kepustakaan, yang dimaksudkan untuk menghimpun literatur-literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan. Dan menurut Nugroho Notosusanto, heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau,¹⁴ atau; mengumpulkan informasi mengenai sejarah. Dalam menghimpun semua sumber sejarah, penulis tidak hanya mengumpulkan buku-buku tetapi juga menggunakan bahas-bahan arsip. Setelah sumber-sumber terkumpul barulah penulis berusaha mengklasifikasikan sumber-sumber sejarah itu menurut sifatnya, yang menurut Nugroho dibedakan atas dua, yakni; 1) Sumber primer, yaitu berita yang berasal dari pelaku atau yang menyaksikan peristiwa tersebut; 2) sumber sekunder, yaitu sumber yang yang diperoleh dari pihak yang menyaksikan peristiwa.¹⁵

Setelah heuristik dilakukan, penulis kemudian menerapkan kritik yang menurut Nugroho, kritik (sejarah) yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya.¹⁶ Dalam ilmu sejarah ada dua, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Dalam penulisan ini penulis juga menerapkan kedua kritik diatas. Kritik ekstern pada

¹⁴ Sarita Pawiloy, Pengantar Ilmu Sejarah (FKIS- IKIP). (Ujung Pangoang, 1986), hal. 32.

¹⁵ Ibid., hal. 37.

¹⁶ Ibid.

dasarnya merupakan kritik terhadap obyek material dari sumber yang telah terkumpul. Setelah itu penulis membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain, untuk menentukan sumber yang terpercaya.

Penulis juga memakai kritik intern setelah kritik ekstern selesai. Kritik sejarah dalam bentuk ini hendak menilai sumber, apakah dapat dipercaya atau tidak. Pembuktiannya dapat diperoleh dengan cara: 1) Penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; yang dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber itu. Kemudian menyoroti pengarang sumber tersebut bahwa ia dapat dipercaya. 2) Membandingkan kesaksian dari berbagai sumber.¹⁷

Setelah penulis melakukan kedua kritik, baik kritik ekstern maupun intern, maka kemudian muncullah koleksi sumber-sumber sejarah yang disusun menjadi fakta-fakta. Fakta sejarah bersumber dari data sejarah yang diinterpretasi. Olehnya itu penulis dalam menginterpretasi fakta melakukan kombinasi yang tidak lain adalah gabungan peristiwa yang satu dengan yang lain.

Setelah melakukan segala metode diatas, yaitu heuristik, kritik, dan interpretasi, barulah penulis menyusun karya tulis, yang hasil penyusunannya sering disebut juga 'historiografi'. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitis.

¹⁷ Ibid., hal. 49.

BAB II

LATAR BELAKANG

2.1 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejak Kebangkitan Nasional yang berawal pada waktu didirikannya "Buoi Utomo" pada tahun 1908 dan Perggerakan Nasional yang dinyatakan bermula dari sumpah setia pemuda-pemudi Indonesia pada 28 Oktober 1928 hingga pada waktu daerah ini (wilayah Inuonesia) diduuki Tentara Jepang, telah muncul beragai usaha untuk memperbaiki serta mengangkat derajat bangsa Indonesia. Usaha dan perjuangan itu berhasil di padamkan untuk sementara waktu oleh pemerintah Tentara Penduukan Jepang ketika wilayah Indonesia berhasil diduuki dan di kuasanya kecuali yang didirikan Tentara Penduukan Jepang sendiri. Partai-partai politik maupun organisasi-organisasi sosial dilarang, bahkan rakyat juga dilarang berkumpul lebih-lebih lagi membicarakan persoalan politik.¹

Namun sikap Tentara Penduukan Jepang tidak dapat dipertanyakan terus mengingat kedudukannya semakin terdesak pada medan teruepan dalam menghadapi serangan balik dari pasukan sekutu. Untuk mempertahankan kedudukannya itu pihak Jepang berusaha memikat penduduk Indonesia agar bersedia membantunya dalam menghadapi pasukan

¹ Drs. Harun Kadir, dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang, 1984), hal. 112.

sekutu. Untuk itu maka dalam sidang Teikoku Gokai (Parlemen Jepang) yang berlangsung pada 7 September 1944 Perdana Menteri mengumumkan rencana pemberian kemerdekaan kepada pihak Indonesia.

Rencana itu dinyatakan dengan diperkenalkannya kelak di kemudian hari.²

Sehubungan dengan rencana jalinan kerjasama antara pihak Jepang dan tokoh-tokoh Indonesia, maka Dr.G.S.S.J. Ratulangi dan Tadjuddin Noor, J.U. Siaranamual, M.R. Dayoh, Dr. Towoliu, M. Saleh Lanage, Berty Korompis, Rahim None, dan lain-lain diberangkatkan ke Makassar pada akhir tahun 1944. Diantara tokoh-tokoh yang datang ke Makassar itu Dr. Ratulangi dan Mr. Tadjuddin Noor diangkat oleh Pemerintah Pasukan Jepang di Makassar sebagai penasihat politik.³

Disamping itu ada juga sejumlah tokoh lokal, penguasa, dan antara mereka diangkat ke Makassar diangkat dengan nama Syukai Gi In. Diantara anggota-anggota itu terdapat Lanto Daeng Pasewang, Anoi Sultan Daeng Raja, Nadjamuddin Dg. Malewacen lain-lain. Juga beberapa tokoh Indonesia diberikan kedudukan penting seperti Lanto Dg, Pasewang diangkat sebagai kepala kerajaan Makassar dan ourrazak Gelar Beginda Manarajalela menjadi Ken Kanrikan

² Sartono Kartocirojo, Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta; Balai Pustaka, 1977) hal. 12.

³ Harun Kadir, Op.Cit., hal. 128.

Bontnain (asisten Residen Bontnain).

Diantara tokoh-tokoh politik yang bergiat di Makassar, terdapat beberapa tokoh yang berfikiran federalis seperti Dr. G.S.S.J. Ratulangi dan Nadjamoeedin Dg. Malewa. Ratulangi adalah seorang tokoh politik dari Partai Kesatuan Minahasa. Beliau pernah mewakili partainya dan Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1927. Demikian pula Nadjamoeedin Dg. Malewa seorang tokoh politik Sulawesi Selatan yang mendirikan Partai Persatuan Selebes Selatan (PPSS) pada bulan April 1930. Meskipun demikian tetap diakui sebagai orang-orang Kiblik yang disamping bertujuan mengangkat derajat hidup bangsa Indonesia juga memperjuangkan kesatuan bangsa Indonesia.

Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan dunia kedua, yang lama-kelamaan kekuatan sekutu makin bertambah naik dan kekuatan Jepang sendiri menurun, maka Pemerintah Jepang menjalankan siasat dengan merencanakan supaya Indonesia merdeka dibentuk dalam lingkungan Asia Timur Raya di bawah pimpinan Tokyo.⁴ Menghadapi situasi yang kritis itu, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa dibawah pimpinan Letnan Jendral Mukikici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 telah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokoritsu Junbi Cosakai). Tindakan ini merupakan langkah kongkrit pertama bagi pelaksanaan janji Kaiso tentang kemerdekaan Indonesia kelak di

⁴ Mr. Munammas Yamin, Sejarah Konstitusi RI. (Jakarta; 1953), hal. 33.

kemudian hari. Maksud Jepang memuentuk Badan ini untuk mendapatkan sokongan yang maksimal dari bangsa Indonesia guna melanjutkan usaha peperangan. Akan tetapi oleh pemimpin-pemimpin Indonesia badan ini digunakan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pelbagai hal yang menyangkut pementuan negara Indonesia merdeka.

Sesubungan dengan kegiatan BPUPKI itu maka Ir. Soekarno bersama-sama Mr. Sudarjo dan Rr. Soemanang ke Makassar untuk membicarakan hal-hal menyangkut usaha persiapan kemerdekaan. Diantaranya diadakan pertemuan antara Ir. Soekarno dengan raja-raja dan tokoh-tokoh politik di Makassar yang bertempat di Hotel Empress. Juga dilapangan Hasanuddin diadakan rapat umum bersama pemuda-pemuda, bertempat di blokop Sirene. Rapat umum itu diawali dengan pengiteran Bendera, tetapi ketika pemuda, Abdul Majid membacakan sumpun setia yang berbunyi ; "Demi Tuhan, Bendera Sang Merah Putih hanya bisa diturunkan apabila mayat-mayat pemuda Indonesia telah dilalui." ⁵

Setelah rapat umum itu, maka keesokan harinya 2 Mei 1945, rombongan Ir. Soekarno meninggalkan Makassar kembali ke Jakarta.

Terdorong oleh semangat ingin merdeka yang begitu besar pada tanggal 9 Juli 1945 tokoh-tokoh nasional Makassar mengubah Ken Moho Posi Kai, nama sebuah lembaga binaan Jepang menjadi "Sumber Dajan Rakyat untuk Pemoangunan

⁵ Hadik Ujar-adi, et. al., Sejarah Corps Hasanuddin Pradjurit Tempur dan Pemoangunan (Makassar, 1974), hal. 2

Negara" Lembaga ini kemudian lebih sering di sebut "Sumber Darah Rakyat" (SUDARA). Dibentuk sebagai alat propaganda demi kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. G.S.S.O. Ratulangi.⁶

Ditengah-tengah kesibukan SUDARA sedang membina kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan, datanglah serang Jepang, Nisnima, menyampaikan surat undangan kepada Dr. Ratulangi pada tanggal 7 Agustus 1945.

Menanggapi isi surat yang ditujukan kepada pimpinan SUDARA itu, yang meminta utusan dari Sulawesi untuk menghadiri rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kemudian atas berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama diutuslah pemimpin nasional yang paling berwibawa di Indonesia Timur Dr. Ratulangi sebagai Kepala Delegasi Sulawesi. Anggota-anggota lainnya adalah seorang bangsawan Bugis dan Makassar, Andi Pangerang Petta Rani, anak raja Bone; dan Andi Sultan Dy. Raja, Karaeng Lantarang, dalam kabupaten Bantaeng yang diperintah langsung. Sedangkan Sekretaris delegasi adalah Andi Zainal Abidin, seorang pemuda yang bekerja dengan Ratulangi pada staf SUDARA.⁷ Keempat utusan itu berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1945.

⁶Carita Pawiloy, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang, 1967), hal. 64.

⁷Barbara Sillars Harvey, Pemderontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII (Jakarta, 1989), hal. 108-109.

Setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan menyusul di Nagasaki tanggal 8 Agustus 1945, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, atas nama Pemerintah Kerajaan Jepang, Mikada mengumumkan pidato radio bagi belatentara Jepang untuk menghentikan perang dan Kaisar Jepang telah menyatakan bersedia menandatangani piagam penyerahan Jepang pada sekutu yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1945.

Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia itu telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan. Kesempatan itu benar-benar tidak mereka sia-siakan. Para pemimpin itu sejak malam hari tanggal 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus mengadakan rapat dan berhasil menyusun proklamasi kemerdekaan. Penandatanganan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dihadiri 31 orang pemimpin-pemimpin Indonesia itu dilakukan di gedung Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Para pemimpin akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan), pada pukul 10.00 WIB.

Teks Proklamasi itu amat singkat tetapi jelas dan lengkap isinya, isinya tegas yang telah mencerminkan kehendak bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Pada saat penandatanganan teks proklamasi yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, salah satu di antaranya adalah dr. G.S.S.J. Ratulangi sendiri. Ia salah

seorang pemimpin bangsa Indonesia yang ikut aktif mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan itu, sumbangan-sumbangan pemikirannya sebagian tertuang dalam teks Proklamasi.

"Dr. Ratulangi yang telah lama dikenal di Jakarta sebagai orang yang cakap dan mempunyai pertimbangan cukup baik, ikut merumuskan bunyi teks Proklamasi.. Yaitu tentang pemindahan kekuasaan, sebagaimana disebutkan; diselenggarakan dengan cara seksama kemudian ditambah oleh yang lain; dengan lanjutan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."⁸

Teks asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berbunyi seperti di bawah ini:

"PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

(tanda tangan Soekarno)

(tanda tangan Hatta)"⁹

⁸ Sarita Pawiloy, Op. Cit., hal. 74

⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: 1984), hal. 86.

2.2 Pemerintah RI. Propinsi Sulawesi

Dua hari setelah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tanggal 19 Agustus 1945, Dr. Ratulangi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sulawesi yang pertama. Setelah Ratulangi menduduki posisi sebagai pemimpin formal di Sulawesi langkah kebijakan pertama yang dilaksanakannya adalah menghimpun semua kekuatan sosial yang terdapat di Sulawesi, khususnya kawasan Sulawesi Selatan yang menjadi pusat pemerintahan. Langkah ini penting dilakukan dalam tahap pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur di Sulawesi. Sebab, meskipun dia telah resmi diangkat oleh pemerintah RI sebagai Gubernur, tidak dapat dibayangkan banyaknya kendala yang akan dihadapi bila tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari semua lapisan sosial di masyarakat. Untuk itu, Dr. Ratulangi melaksanakan hasil konsultasinya dengan Lanto Dg. Pasewang, yaitu mengadakan pendekatan dengan kelompok aristokrat yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan yang berakar di masyarakat.

Dr. Ratulangi menugaskan Lanto Dg. Pasewang dan A.N. Hadjarati untuk menghubungi Andi Mappanyukki, Andi Abdullah. Bau Masepe, dan Andi Pangerang Petta Rani. Ketiga tokoh aristokrat itu berjanji untuk memenuhi harapan dari Gubernur Ratulangi. Dan kemudian, menghubungi kelompok aristokrat lainnya untuk memberikan penjelasan dan sekaligus mengajak mereka untuk mengoukung republik, khususnya Gubernur Ratulangi, dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugas itu tidaklah ringan, sebab walau bagaimanapun tidak seluruhnya

kelompok aristokrat itu yang senada dan sehaluan pikiran dan pendiriannya dengan Anni Meppenyukki, Abdullah Bau Masepe, dan Anni Pangeran Petta Rani. Tentu ada kelompok yang masih diliputi keraguan akan terjadinya perubahan zaman yang sangat mendadak itu, ada yang masih membayangkan statusnya yang baik di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya sekelompok kecil dari aristokrat yang mungkin masih kekuarangan informasi atau tidak terjadi dialog langsung dengan dengan kelompok nasionalis, menyatakan mendukung republik dan Gubernur Ratulangi. Dampak positif dari usaha ketiga aristokrat yang melakukan propoganda politik itu memang terlihat di masyarakat. Ini dapat dilihat dari sikap rakyat yang beres di bawah pengaruh atau kekuasaan dari kelompok feodal ternadap perjuangan. Setiap diadakan rapat raksasa untuk menyatakan tekad mendukung Soekarno dan Republik Indonesia, rakyat berduyung-duyung mendatanginya. Rakyat menariakan semboyang-semboyang perjuangan dengan semangat berkobar. Tampaknya budaya panutan dalam masyarakat Sulawesi di zaman perang kemerdekaan, masih sangat kuat berperan dalam kehidupan mereka. Ini dapat dibuktikan dari tingkah laku rakyat yang patuh sepenuhnya kepada apa yang dinyatakan dan apa yang diperintahkan oleh para bangsawannya. Kelompok bangsawan yang menjadi panutan itu menerima pengabdian total para pendukungnya dalam memberikan dukungan penuh kepada republik. Dapat disimpulkan bahwa strategi Ratulangi untuk merangkul kelompok aristokrat, seperti yang disarankan Lanto Dj. Pasewang, telah berhasil mencapai

dasarannya dengan memuaskan.

Dr. Ratulangi selaku Gubernur Sulawesi menyusun personalia organisasi pemerintahannya. Dengan organisasi pemerintahan yang masih sederhana ini, Adapun struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Dr. Ratulangi adalah:

Gubernur	: Dr.G.S.S.J. Ratulangi
Sekretaris	: Mr. Anoi Zainal Abidin
wakil Sekretaris	: F.Touing
Biro Umum	: Lanto Daeng Pasewang
Biro Ekonomi	: Mr. Tadjuddin Noor
Biro Penerangan	: Manai Sophian
Biro Pemuda	: Siramanual Daeng Paellan
Pembantu-pembantu	: A.N. Hadjarati Pondaag G.R. Pantouw Dr. Syafri Sam Supardi M.Saleh Lahade. ¹⁰



Dengan susunan pengurus yang masih sederhana, Gubernur Ratulangi menjalankan tugasnya yang secara resmi berlaku pada tanggal 1 September 1945. Saat itu belum ada anggaran belanja negara yang jelas, belum memiliki pengalaman sebagai birokrat republik, belum ada proyek. Sedangkan yang ada dalam diri mereka adalah semangat juang yang militan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Meskipun telah terbentuk organisasi pemerintahan Propinsi Sulawesi, Namun Ratulangi belum dapat melaksanakan instruksi Soekarno untuk mengambil alih pemerintahan dari

¹⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat (Yogyakarta, 1985), hal. 54.

tangan Minseibu. Hal itu disebabkan karena pihak Pemerintah Jepang terus menerus menyalangi dan untuk melaksanakan tindakan perebutan kekuasaan tidak mungkin karena persetujuan masih dikuasai pihak Jepang. Menurut G.R. Pantouw pihak Jepang masih berusaha menutup-nutupi berita Proklamasi Kemerdekaan di Makassar dengan bertindak merobek-robek semua selebaran dan poster perinal berita Proklamasi oleh serdadu Jepang atau orang surunan Jepang.¹¹ Meskipun demikian usaha untuk meluaskan berita kemerdekaan dan pembentukan pemerintah Propinsi Sulawesi terus disebarkan ke daerah-daerah. Hal itu yang mendorong pemerintah daerah mendesak pihak Jepang agar menyerankan tampuk pimpinan kepada mereka.

Untuk menata pemerintahan dan membantu pelaksanaan pemerintahan Propinsi itu telah dibantu pula Dewan Penasehat (konin). Dewan ini diketuai oleh Andi Mappanyukki Karaeng Segeri (Raja Bone). Sebagai Wakil Ketua terpilih Dr. Ratulangi dan anggota-anggota adalah semua raja-raja di Sulawesi Selatan yang memiliki pengaruh yang luas, seperti Raja Gowa, Raja Luwu, Raja Soppeng, Raja Sidenreng, Raja Malussetasi, dan Raja Balaenipa.

Rasik Djerjadi memenuang sikap itu merupakan pilihan yang tepat karena Ratulangi lebih cenderung untuk memilih jalur diplomasi daripada melakukan tindakan militer.

¹¹ Keterangan Bapak G.R. Pantouw sebagai menghadiri Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, tanggal 17 Juli 1992 di Melino, Gowa.

Menurut Gubernur Dr. Ratulangi sendiri, sikap tidak mengumumkan pengangkatannya sebagai Gubernur memang merupakan sikap yang disengaja walaupun ia yakin benar bahwa seluruh rakyat Sulawesi mendukungnya. Ia berpendapat bahwa jika ia mengumumkan pengangkatannya sebagai Gubernur akan berakibat terjadi pertumpahan darah yang hebat di Sulawesi Selatan.¹²

Pernyataan Gubernur Ratulangi itu dapat dimengerti sehubungan dengan keaduukannya sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi anggota-Volkraad pada periode pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada periode pemerintahan militer Jepang, ia melakukan kerjasama dengan pihak Jepang dan berkedudukan sebagai penasehat Pemerintahan dan Badan Politik Pemerintahan Militer Jepang.

2.3 Kegatangan Sekutu dan NICA

Tanggal 15 Agustus 1945, saat yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Mimpi buruk telah berakhir. Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah masa tiga setengah tahun, mulai terlihat tanda-tanda berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia menyaksikan kepergian Jepang dengan perasaan yang sangat gembira. bukan percuma adanya peribahasa di Aceh yang berunyi "anjing pergi babi datang". Tekanan yang dirasakan sebagai akibat pendudukan Jepang boleh dikatakan tidak tertanankan, terutama di tahun-tahun terakhir peperangan.

Dua hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia diproklamlirkan di Jakarta. Bagi kebanyakan orang

¹²Radik Djarwadi, Op. Cit., hal. 7.

Belanda, proklamasi kemerdekaan ini adalah suatu hal yang sama sekali tidak diduga. Ini terjadi terhadap orang-orang Belanda yang tidak sempat menyingkir dari Hindia Belanda pada waktu Jepang menyerbu, lebih kurang 100 ribu orang diantara mereka selanjutnya meringkuk dalam keadaan sangat menyedihkan sebagai tahanan sipil, dan 37 ribu orang lagi sebagai tahanan perang.

Berita resmi Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia dan lahirnya Negara Republik Indonesia serta pengangkatan Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi diketahui penduduk kota Makassar melalui pemberitaan Surat Kabar dan siaran radio. Dengan demikian, desas desus yang mengundang pembicaraan di Makassar menjadi jelas. Pemberitaan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia diteruskan ke pedalaman. Para utusan dikirim ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Poso lewat Palopo.¹³ Mereka ke pedalaman bukan sekedar menyebarkan berita resmi kemerdekaan, melainkan pula mempersiapkan rakyat dan pemuda menyambut kemerdekaan itu.

Berita ini ternyata diterima oleh seluruh rakyat dengan gembira. Di daerah-daerah pedalaman pemimpin-pemimpin pemerintahan, yang sebelumnya dijabat oleh orang Jepang seperti Ken Kanrikan (setaraf bupati) dan Bunken Kanrikan (setaraf camat) diserahkan kepada orang Indonesia.

¹³ Sarita Pawitry, Op. Cit., hal. 55.

Saat Jepang menyerah, pasukan Australia sudah berada di pangkalan depan di Morotai, Maluku Utara. Pasukan ini oleh Komando Asia Tenggara pada tanggal 13 Agustus 1945 di tugasi untuk mengemban alih tanggung jawab sementara atas Kalimantan dan Indonesia Timur, sampai mereka dapat digantikan oleh pasukan-pasukan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, dalam hal ini Letnan Gubernur Dr. H. J. van Mook, telah tinggal di Australia selama Perang, dan karenanya dengan mudah dapat diatur agar pejabat NICA menyertai pasukan Australia ketika mereka mendarat di Indonesia Timur.¹⁴

Beberapa saat sebelum kedatangan pasukan Australia, seorang Australia yang ditawan, Mayor Gibson, telah ditunjuk sebagai Wakil Sekutu, dan telah menemui gubernur Ratulangi untuk minta bantuan guna memelihara hukum dan ketertiban.¹⁵ Dr. Ratulangi menyetujui permintaan ini, dan memberi tugas untuk memelihara ketertiban di Makassar sampai mendaratnya pasukan-pasukan Australia justru kepada para pemuda yang ingin mencegah pendaratan itu.

Pada tanggal 21 September 1945 mulailah dideratkan 1 batalyon dari Brigade ke-21 di pelabuhan Makassar dibawah Komandan Brigadir Jenderal Iwan Dougherty. Dalam beberapa hari mereka menyelesaikan apa yang mereka anggap bagian

¹⁴ Barbara Sillars Harvey, Op. Cit., hal. 112

¹⁵ Ibid.

bagian terpenting dari mandat mereka yakni evakuasi kurang lebih 460 orang tawanan perang ke Australia, yang kebanyakan warga negara Inggris, yang masih ditawan di Sulawesi Selatan.¹⁶

Induk pasukan Australia mendarat di Makassar tanggal 23 Septemboer. Mereka dengan segera diikuti oleh para pejabat NICA, beberapa diantaranya tampaknya telah tinggal di Australia selama pendudukan Jepang, dan beberapa lagi diantaranya adalah kaum interniran yang telah dibebaskan. Kedatangan Pasukan Australia ini diterima dengan sikap hati-hati dan netral oleh pemerintah Republik dibawah Ratulangi. Akan tetapi, para pemuda yang mendengar kabar yang terdengar dikalangan penduduk kota bahwa di dalam kedatangan tentara Australia yang mendarat terdapat beberapa opsir KNIL dan NICA.

Kehadiran NICA dengan memondong pada pasukan Sekutu mendapat perlawanan dari pihak rakyat, dan sangat menentang kehadiran Belanda sehingga terjadi sejumlah insiden. Kekacauan yang kemudian timbul, dengan memutarbalikkan logika, telah digunakan untuk memoenarkan kehadiran NICA serta pembentukan kembali pasukan-pasukan KNIL.

Pada tanggal 2 Oktober terjadi insiden tembak-menembak yang agaknya dimulai oleh pasukan KNIL, yang terdiri dari orang-orang Ambon, Terjadi pertempuran sporadis di dalam kota selama tiga hari berikutnya, dan sejumlah penduduk

¹⁶ Ibid., hal. 114

Ambon terbunuh. Atas permintaan pejabat Australia dan NICA Dr. Ratulangi menyampaikan piwato di depan rapat umum di pusat kebudayaan Maricaya dalam usaha menenangkan situasi.

Insiden serupa terjadi pada tanggal 15 Oktober yang dihasut oleh KNIL, dan komandan Parukan Australia, Brigadir Dougherty, memerintahkan agar pasukan KNIL dikurung dibarak-baraknya.¹⁷ Dougherty agaknya memang berusaha mempertahankan netralitas dan tidak mencampuri situasi politik setempat. Di bulan Oktober, Mayor Wagner digantikan oleh Letnan Kolonel C. Lion Cachet yang diberi pangkat Commanding Officer NICA, yang membawahi semua opsir-opsir dan kesatuan NICA yang beroperasi di Sulawesi Selatan.¹⁸ Lion Cachet terkenal sebagai pegawai kolonial Belanda yang sangat reaksioner yang ingin mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Sedangkan Brigadir Jenderal Iwan Dougherty digantikan oleh Brigadir Jenderal F.O. Chilton pada tanggal 19 Oktober 1945.

Setelah pendaratan pasukan Sekutu dan kesatuan NICA, datanglah seorang bekas Asisten-Residen Nieuw-Guinea memanggil pemuka-pemuka rakyat Makassar untuk diberi instruksi, pengumuman yang disampaikan menyangkasnamakan dari Brigadir Jenderal Australia. Dr. Ratulangi, Pantous, Sam Supardi, Saellan, Haji Sewang Dg. Muntu, dan beberapa pegawai

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit., hal. 55.

Minleibu Seimuka orang Indonesia hadir di serambi Hotel Impress. Semua hadirin disuruh berdiri sebagai kolaborator dengan Jepang. Ucapan-ucapan LUNICA itu mengiris hati para hadirin. Ia berkata "kamu harus tahu, bahwa sekutu telah menang perang. Sekutu berarti Belanda sebagai bagiannya dan kamu mulai sekarang harus patuh pada perintah yang kami keluarkan. Itu perintah pertama kamu boleh pulang."¹⁹

Ratulangi dan Pantouw dan beberapa tokoh pejuang lainnya meninggalkan tempat pertemuan, masing-masing dengan muka muram, tetapi dengan hati yang sangat tersinggung. Tekad mereka mulai dulat, berjuang untuk merdeka atau mati.

Dr. Ratulangi dan G.R. Pantouw kemudian disuruh menghadap ke Markas Tentara Australia. Brigadir Jenderal Australia ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Setelah berkenalan dan bercincang-bincang mengenai dasar pendidikan, maka diampikanlah instruksinya kepada tokoh nasionalis itu, yang isinya sebagai berikut:

"Saya sebagai Brigadir Jenderal atau nama atas saya di Markas Morotai melarang tiap-tiap aksi yang bermaksud mendirikan suatu bentuk organisasi pemerintahan dari apa yang menamakan diri Republik Indonesia. Tindakan dari siapa juga yang menentang instruksi ini akan dilawan oleh kekuatan militer Australia. Saya inginkan kerjasama yang baik dengan tuan-tuan."²⁰

Pada tanggal 23 September 1945 Brigadir Jenderal Iwan Dougherty membacakan suatu pengumuman, yang pada dasarnya berisi dua hal pokok, yaitu: 1. Pemerintah Hindia Belanda

¹⁹ Yayasan Gedung-gedung bersejarah Jakarta, Bunda Rempai Soempan Pemceua (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hal.438.

²⁰ Ibid.

di Sulawesi Selatan, dan 2. Tentara Jepang untuk sementara waktu meneruskan tugas-tugas tertentu yang dibebankan sekutu kepadanya.²¹

Setelah itu NICA bertindak secara sepihak mengangkat kembali bekas pegawai Hindia Belanda untuk menduduki jabatan pemerintahan, menggantikan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan itu pada masa Jepang. mengatakan tidak berlaku lagi uang Jepang dan sebagai gantinya dikeluarkan uang NICA; memperhujat orang-orang Belanda, Indo, dan orang-orang Ambon; mendemonstrasikan arak-arakan mobil yang penuh dengan orang-orang Belanda sambil melagukan lagu-lagu rakyat Belanda; dan banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan yang hanya menciptakan kekeruhan dan bertambah hangat amarah rakyat.

Sementara Dr. Ratulangi berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari sekutu mengenai kedudukan pemerintahan. pihak pemuda-pemuda terdorong oleh semangatnya yang menyala-salainya untuk segera menghancurkan NICA, karena itu pada dini hari tanggal 23 Oktober 1945 pemuda melancarkan serangan untuk merebut-pos-pos yang dikuasai pemuda-pemuda berhasil direbut kembali berkat bantuan dari pasukan sekutu. Disamping itu beberapa tokoh-tokoh pemuda ditangkap dan ditahan oleh pasukan sekutu.

Aksi pemuda-pemuda ini menyedapkan Panglima Tentara Australia sangat marah dan menganggapnya sebagai suatu pelanggaran keamanan yang sangat besar dimana ia bertang-

²¹ Sarita Pawiloy, Op. Cit., hal. 102.

gung jawab sepenuhnya. Akibat dari perkembangan ini maka dikeluarkanlah maklumat Tentara Australia yang ditandatangani oleh brigadir Jeneral Chilton, dimana dengan tegas dinyatakan akan diadakan tindakan yang sangat drastis dan keras terhadap pelanggaran keamanan. Isi maklumat itu berunyi :

"MA'LOZMAT

Perintah Militaire Brigadier F.O. Chilton
D.S.O. Pemimpin dari tentara Australia di
Makassar

Kedjahatan terhadap perintah Militaire Sekoetoe di
Seleoes Selatan

- a. Memakai atau Mempoenyai senjata apapun, termasuk segala roepa sendjata api, granaat tangan senjata perleoakan, pedang, keris, badik, dan tombak.
Barang siap yang memakai sendjata-sendjata tersebut diatas dapat ditembak mati.
- b. Mengadakan perarakan atau pertoendjoekan sematjam apapun.
- c. Paksaan kekedjaman atau antjaman terhadap barang siapa poen.
- d. Menolong atau menjokong barang siap yang telah membebat barang kedjahatan.
- e. Tiak maoe menjoeal makanan, pakaian atau keperluan sehari dengan alasan perbedaan bangsa atau derajat.
- f. Memperhangi pemakaian jalan dgn leloesa.
- g. Meroesakkan, membinasakan, menghalangi segala peroesan demoem atau pembangoenan sekoetoe termasuk ojoega pembangoenan waterleiding, dan stasion penjajaran radio.
Barang siapa yang melalukan kesalahan itoe ditembak pada tempat itoe.
- h. Penjoerian dan membonkar roemah orang.
- i. Memakai pakaian militair atau uniform lain apabila bukan anggota pasoeakan sekoetoe atau politie.
- j. Toroet latihan setjara militair apapun.

Segala peratoeran⁴ yang tersebut diatas ini pasti akan dilakoeakan oleh segala sedadoe dibawah perintah saja.

Makassar, 29 October 1945

Brigadir panglima tentara Australia
di Makassar

F.O. CHILTON²²

Penahanan pemuda-pemuda oleh sekutu mendorong Ratulangi mengutus G.R. pantouw untuk menghadap ke Markas Besar Tentara Australia untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan pembebasan para pemuda yang ditahan itu. Dalam pertemuan sekutu menyarankan agar Ratulangi mengajukan usul menyangkut cara pemerintahan di Sulawesi Selatan. Dan mengenai pembebasan pemuda-pemuda itu akan dipertimbangkan dan meminta kepada Ratulangi untuk mengusahakan -- peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para pemuda tidak terulang lagi.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 kembali G.R. Pantouw di utus untuk menyampaikan usul dari Dr. Ratulangi menyangkut mekanisme pemerintahan. Brigjen Chilton menjanjikan akan memberikan pertimbangan dan jawaban pada tanggal 2 Nopember 1945. Dan untuk menghindari salah paham, Chilton mengundang Ratulangi sendiri untuk menemui dikantornya untuk berunding tentang usul itu. Pada tanggal 3 Nopember 1945 Ratulangi memenuhi undangan Brigjen Chilton dan kemudian melangsungkan pertemuan. Dalam pertemuan itu Chilton memohon kepada Ratulangi untuk menjamin dua masalah, yakni: 1) Masalah ketentraman; dan 2) Masalah makanan rakyat.

²² Bahan Arsip pada perwakilan Arsip Nasional Sulawesi Selatan, tanggal/Tahun: 1945; Registrasi No. : 162, Kode Dos: 29.

Sebagai imbalan atas penundaan jawaban usul dari Ratulangi ia mengajukan enam tuntutan yang diharapkan segera dilaksanakan, yaitu: 1) Uang kas yang telah dirampas oleh Stouferheim di Maros sebanyak f.47.000,- dengan kas dikembalikan; 2) Pemuda-pemuda yang sedang ditahan berhubungan dengan huru-hara tanggal 29 Oktober 1945 segera dibebaskan; 3) Serdadu militer NICA yang terdiri dari suku Manado dilucuti senjatanya; 4) Segala milik surat kabar Soera Indonesia di kembalikan; 5) Pegawai NICA dan opsir-opsir serta pasukannya dilarang menyerbu ke pedalaman dengan cara muslihat; 6) Sekolah MULO, sekolah Ambon, dan lain-lain yang menunjukkan status dan derajat segera dihapuskan. Selanjutnya Ratulangi menyatakan bahwa selama ia tidak diakui sebagai Gubernur Sulawesi, ia tidak sanggup menjamin permintaan pihak sekutu.

Setelah perundingan itu, Ratulangi berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Karena itu Ratulangi berangkat bersama Lanto Ug. Pasewang ke Watampone. Di Watampone, mereka berhasil menyelenggarakan pertemuan bersama raja Bone dan raja Luwu yang dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan dan hasilnya langsung dikirim kepada Panglima Tentara Australia, Brigadir Jenderal Chilton dalam bentuk telegram, yang isinya:

"Konperensi dengan Raja-raja Bone, Luwu, dan Palopo kemarin dinaidiri naatnya lengkap titik beliau setuju permusyawaratan kita akan tetapi bertekad penarikan kemoali orang NICA dan pegawai Belanda dari pedalaman titik dalam demikian beliau garasi dan bertanggung jawab atas damai ketentraman dan penyelenggaraan makanan

serta akan menjelaskan Undang-undang yang berlaku ti-
tik raja Luwu istimewa minta militer dan sipil Jepang
dikeluarkan dari daerahnya karena menimbulkan banyak
perelisihan dengan rakyat Dr. Ratulangi, Watampone
b.11.1945."²³

Pada tanggal 6-7 Nopember 1945 dilaksanakan pertemuan umum. Dalam pertemuan ini Ratulangi melaporkan hal ikhwal pertemuan dengan brigjen Chilton dan hasil pertemuan pendahuluan yang dilakukan kemarin bersama raja Bone, dan raja Luwu bersama dengan Dewan Adatnya masing-masing. Pada dasarnya peserta pertemuan menerima baik hasil-hasil pertemuan terdahulu itu. Di samping itu dibicarakan juga, antara lain masalah penarikan pajak oleh pihak pemerintah yang di maksudkan untuk dapat membiayai pelaksanaan pemerintah. Dalam pembicaraan ini peserta rapat menerima baik usul Dr. Ratulangi untuk menunda rencana itu hingga sekutu memberikan jawaban atas usul pelaksanaan pemerintahan yang telah diajukan. Juga menyangkut maklumat tentang kejahatan terhadap Pemerintah Militer Sekutu yang telah dikeluarkan. Dalam pembicaraan menyangkut hal itu, disepakati untuk mengusulkan kepada Komandan Tentara Sekutu agar sanksi tembak mati di tempat bagi yang membawa senjata tanpa izin diganti dengan sanksi penyitaan senjata dari mereka dan yang membawa senjata tanpa izin penggunaan senjata.

Juga pada tanggal 18 Desember 1945, berlangsunglah pertemuan antara Dr. Lion Chachet sebagai CONICA di Sula-

²³ Drs. Harun Kadir, okk., Op. Cit., hal. 170.
"Kollektie Lambers" (Bahan Arsip, Leiden; KITLV, H. 973
no. 11)

wesi Selatan dengan wakil-wakil dari Pusat Keselamatan Rakyat (PKR) yang terdiri dari Dr. Ratulangi, (Bertindak sebagai wakil Pemerintah RI di Sulawesi), Lanto Dg. Pasewang (wakil Ketua Komite Nasional Indonesia), H. Mansur Dg. Tompo (Ketua Umum Djamiah Islamiah Selebes), Inchi Mohammad Saleh Dg. Tompo (Bestuursassistent mewakili golongannya), L. Latumahina (Anggota Pengurus Dewan Kristen Selebes), Makki (wakil Golongan Buruh), Haji Sewang Dg. Muntu (Ketua Muhammadiyah Sulawesi), dan Sam (Kepala Bagian Pendidikan Pusat Keselamatan Rakyat). Dalam perundingan itu Ratulangi menyatakan bahwa ia bersedia mengesampingkan perbedaan politik dan menyatakan selanjutnya bahwa PKR yang tetap setia pada azas dan tujuan, dan pendiriannya bersedia secara damai bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan rakyat dan bangsa.

Setelah itu Dr. Ratulangi menyampaikan kepada CONICA pernyataan azas pendirian PKR yang berbunyi sebagai berikut

- I. pendirian yang prinsipil
Kami berdiri di belakang R epublik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana Selebes merupakan bagiannya yang tidak dapat dipisahkan (Integrerende gebiedsoeel).
- II. Pertimbangan-pertimbangan untuk berunding
 1. Nasib dari Indonesia akan ditentukan oleh Konferensi yang diadakan antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan wakil-wakil Pemerintah Belanda dan pada akhirnya oleh konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 2. Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam hubungan tersebut kami serahkan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta kepada siapa kami memberikan kepercayaan sepenuhnya.
 3. Sikap kami dari semula sampai sekarang adalah untuk mewujudkan cita-cita kami dengan menghindari terjadinya tindakan-tindakan kekerasan.
- III. Petunjuk di dalam perundingan

1. Mencari jalan keluar untuk: menghindari terjadinya pergolakan di kalangan rakyat.
2. Menghindari terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dari pihak mana pun dan terhadap siapa pun.
3. Mengusahakan agar dapat diwujudkan pemerintahan di kota dan pedalaman tanpa adanya perasaan dari petugas-petugas setempat mereka dipaksakan oleh kekerasan.
4. Mengusahakan agar pembangunan masyarakat dan ekonomi rakyat dapat berlangsung secara normal juga dalam masa peralihan ini dengan pengertian bahwa kami menunggu adanya keputusan-keputusan mengenai nasib Indonesia.²⁴

Dr. Lion Chachat mengomentari pernyataan Dr. Ratulangi tersebut dengan mengucapkan terima kasih atas pendirian untuk bekerjasama dan menyinggung hal-hal mengenai organisasi Tata Pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 30 Desember 1945, atas undangan dan prakarsa CONICA bertempat di Kantor CONICA Makassar diadakan rapat besar yang dihadiri oleh kurang lebih 41 orang. CONICA Makassar dengan stafnya, beberapa raja yang terkemuka seperti Arumpone Andi Mappanyukki, Raja Gowa, Datu Luwu, Andi Jemma, Datu Suppa Aru Malusetasi, Aru Soppengriaja, Maradia Balannipa, Aru Bila Soppeng disertai dengan anggota Hadatnya, seperti: Andi Pangerang Pettarani dan Tomarilalang Gowa dan Bone, Karaeng Bontnain, Galewong, Pangkajene, Binamu, Ujung Tanah, Aru Sulu Sulu Timur dan Barat, dan wakil-wakil dari PKR seperti Dr. Ratulangi, Inchi Muhammad Saleh Dg. Tompo, Lanto Dg. Pasewang, dan W.S.T. Pondaag hadir dalam rapat tersebut.²⁵

²⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit., hal. 66-67.

²⁵ Bahan Arsip pada Perwakilan Arsip Sulawesi Selatan Tanggal/Tahun: 1946; Registrasi No. 10 Kode Dos No. 02.

2.4 Situasi Menjelang Terbentuknya NIT

Pada tanggal 1 Pebruari 1946 kedudukan tentara Australia kemudian digantikan oleh tentara Inggris Brigade ke delapan puluh yang pasukannya terdiri dari orang Gurkha dari India. Dalam melaksanakan kegiatannya, ^{Pemimpin Pemerintah} ~~pasukan~~ Inggris tampaknya bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Sebenarnya pemerintah Belanda pada bulan Desember 1945 telah berusaha agar pasukan Australia digantikan oleh pasukan Belanda, dan bukan pasukan Inggris, akan tetapi usaha ini telah ditolak.

Melihat situasi yang menguntungkan, PKR kemudian direorganisasikan menjadi satu organisasi wadah pemerintahan menggantikan kedudukannya yang semula hanya merupakan wadah kelompok republikan saja. Pada tanggal 11 Pebruari 1946 PKR diubah menjadi Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKRS). Kepengurusan PKRS disusun sesuai dengan struktur kantor pemerintahan agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Disamping tugas-tugas pemerintahan, PKRS berusaha mengorganisasikan kaum buruh. Usaha itu akhirnya berhasil dengan mendirikan Perkumpulan Buruh Indonesia (PBI) pada tanggal 29 Pebruari 1946, yang kedudukannya secara struktural langsung berada di bawah pengawasan PKRS.

Keberhasilan yang sedikit demi sedikit diraih oleh PKRS itu ternyata semakin mencemaskan kedudukan NICA. Hal ini mendorong NICA berusaha mencari tokoh-tokoh yang bersedia bekerjasama. Dan untuk mengelabui pikiran rakyat, pihak NICA

senyaja mendirikan organisasi yang dinamakan Partai Kemerdekaan Indonesia (PARKI).

Pihak PKRS berpendapat bahwa mendirikan PARKI akan dapat merusak citra rakyat. Oleh karena itu Ratulangi menunjuk Tadjuddin Noor untuk mendirikan partai tandingan yang dinamakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai ini kemudian membuka cabang-cabangnya diberbagai daerah dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Pihak PKRS juga berusaha mengadakan pertemuan dengan golongan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan, yang direncanakan pada tanggal 6 April 1946. Namun rencana ini berhasil digagalkan oleh NICA. Sejak NICA telah melancarkan aksi penangkapan dan penahanan terhadap wakil-wakil PKRS, seperti Ratulangi, Lanto Ug Pasewang, WST. Pondaag, IPL. Tobing, dan Suwarno pada tanggal 5 April 1946. Tokoh-tokoh PKRS yang ditawan selanjutnya dijatuhi hukuman buang ke Serui, Irian Jaya.

Penangkapan ini menimbulkan reaksi yang hebat dikalangan masyarakat. Termasuk pejuang-pejuang Sulawesi yang berada di Jawa menjadi sangat marah dan mengeluarkan suatu ultimatum yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda pada tanggal 18 Juni 1946, yang berbunyi:

"Kami pemimpin-pemimpin pemmerontakan Sulawesi mem-permaklumkan kepada Belanda bahwa dalam tempo 15 hari ini Paksa Tuan Dr. GSSJ. Ratulangi Gubernur Sulawesi dan lain-lainnya harus dimerdekakan kembali. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan-tindakan keras kepada Belanda."²⁶

99. ²⁶ Masjkuri, Dr. GSSJ. Ratulangi (Jakarta, 1985), hal.

Ultimatum tersebut ternyata tidak diniraukan oleh pihak Belanda dan kira-kira sebulan kemudian Ratulangi beserta stafnya diouang.

Sementara itu setelah kegagalan serangan di Kota Makassar tgl. 29 Oktober 1945, perlawanan bersenjata terhadap kemoalinya Belanda beralin dari kota ke hutan. Perlawanan tersebut paling berhasil apabila suatu sikap pro Republik dipihak penguasa setempat didukung oleh semangat revolusioner para pemuda. Ada tiga peristiwa menonjol, yakni pertama di daerah Suppa, dimana datu Suppa Bau Massepe dan pendahulunya Andi Makkasau menirikan cabang PKR di Pare-Pare. Kedua di daerah Luwu, atas desakan pemuda termasuk ayahnya, Andi Achmad dan berkat pengaruh Andi Mappanyukki, datu Luwu yaitu Andi Jemma, mengamuil sikap pro Republik yang kuat. Dan akhirnya di Polongbengkeng sebelah selatan Makassar di kewedanan Takalar. Di Polongbengkeng ini merupakan pusat perlawanan kaum republikan yang paling bertahan di Sulawesi Selatan, dimana Karaengnya yakni Haji Pajonga Daeng Ngalle, menyatakan wilayahnya sebagai bagian dari Republik dan bertindak sebagai penasehat bagi pasukan gerilya yang paling efektif di Sulawesi Selatan. Keputusan untuk mendukung Republik diambil oleh Pajongan Dg. Ngalle, setelah diadakan konsultasi intensif dengan para panhulu sub-distrik dan desa, dengan dukungan kuat para pemuda. Dua orang pemuda, yakni Karaeng Ujarung dan Syamsuddin Dg. Ngerang, antara tanggal 20 dan 25 September 1945 berkeliling di seluruh distrik. Mereka menemui para pejabat pemerintah

setempat dan para pemuka Islam guna mendiskusikan Proklamasia Kemerdekaan dan tekad mereka untuk mempertahankan Proklamasi. Karaeng ini kemudian mengundang para penghulu sub-distrik dan kampung serta para kauli setempat untuk menghadiri rapat di kantor distrik. Keputusan dari rapat tersebut ialah mempertahankan kemerdekaan dengan sarana apapun yang mungkin diperoleh. Segera setelah itu, pada tanggal 16 Oktober 1945, suatu organisasi perjuangan dibentuk yakni Gerakan Muda Bajeng. Karaeng sendiri menjadi ketuanya. Karaeng Ujarung wakilnya, sedangkan keempat penghulu subdistrik Polongbengkeng juga diberi jabatan dalam organisasi itu. Suatu satuan militer, yang terdiri dari pemuda, didirikan di bawah komando Syamsuddin Ug. Ngerang dan Ranggong Daeng Romo.²⁷

Tidak lama setelah pembentukan Gerakan Muda Bajeng, Karaeng Ujarung dan Syamsuddin Ug. Ngerang ke Makassar untuk menghubungi kelompok-kelompok pemuda di sana. Diputuskan untuk tidak menggabungkan diri secara formal dengan mereka, karena kelompok Polongbengkeng mencakup tidak hanya pemuda melainkan meliputi seluruh struktur pemerintahan dan penduduk distrik itu secara keseluruhan. Namun menyusul kegagalan serangan pemuda di Makassar pada tanggal 29 Oktober sejumlah pemimpin pemuda Makassar melarikan diri ke Polongbengkeng. Di sana mereka bergabung dengan Gerakan Muda Bajeng.

²⁷ Barbara Sillars Harvey, Op. Cit., hal. 122.

Dalam pertemuan tanggal 15 dan 17 Desember kekuatan pemuda yang berjumlah sekitar seribu orang, memutuskan untuk menyerang Makassar, dengan cara bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang masih ada di dalam kota, Sa- yang, KNIL lain siap untuk serangan menghadapi itu, di- banding dengan pemuda Makassar, sehingga yang terjadi ha- nya pertempuran-pertempuran kecil yang tidak berarti.

Pada tanggal 2 April 1946 Gerakan Muda Bajeng digen- tikan oleh suatu organisasi militer khusus, Lipan Bajeng yang dikepalai oleh Ranggong Dg. Romo. Lipan Bajeng meru- pakan inti federasi kelompok-kelompok pemuda/laskar, Lap- ris, yang dibentuk tanggal 17 Juli 1946.

Kehebatan perlawanan pro-Republik di Sulawesi Selatan tidak diduga oleh Belanda, dan memotivasi kemampuan me- reka melaksanakan rencananya untuk mencoba suatu hubungan baru yang akan melestarikan ikatan kolonial lama dalam bentuk baru. Garis besar hubungan baru ini, yang diusulkan pemerintah Belanda supaya dibentuk dengan koloni-koloninya sebelum Perang Dunia II, terungkap pada tanggal 10 Pebrue- ri 1946. Yakni ketika Letnan Gubernur Jenderal van Mook mengajukan usul tentang pembentukan suatu negara federal Indonesia, dalam suatu hubungan persemaikmuran dengan Kera- jaan Belanda.²⁸ Sekalipun usul-usul ini pada hakekatnya tidak dapat diterima oleh Republik, yang melinatnya seba- gai suatu kelanjutan keijaksanaan lama berupa "memecah

²⁸ ibid., hal. 125.

belah dan menguasai" usul itu memang dipakai sebagai dasar perundingan yang pada akhirnya menghasilkan Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Pemerintah Belanda tidak menunggu tercapainya persetujuan ini, tetapi meneruskan rencananya membentuk negara federal, dimana Indonesia Timur dipilih sebagai daerah tempat negara bagian pertama yang akan dibentuk.

Sebenarnya politik Belanda ini telah lama ditetapkan melalui pidato radio yang diucapkan Ratu Wilhelmina dari tempat pengasingannya di Inggris tanggal 7 Desember 1942. Pidato itu dikaitkan dengan pidato-pidato radionya yang sebelumnya, di mana Ratu menyinggung kemungkinan diadakannya sebuah Konferensi Meja Bundar untuk membicarakan struktur politik bagi Kerajaan Belanda dan semua wilayahnya untuk disesuaikan dengan perubahan keadaan.²⁹ Struktur yang dibayangkannya adalah berbentuk Kerajaan Federasi, dengan Keherland (negeri Belanda), Indonesia, Suriname, dan Curaçao menjadi anggota-anggota yang sama sederajat.³⁰ Masing-masingnya akan diperbolehkan mengurus masalah dalam negerinya sendiri, secara bebas, menggunakan sumber-sumber dayanya sendiri, tetapi harus pula bersedia untuk saling membantu. Konsep ini adalah suatu kesinambungan yang wajar dari apa yang disebut politik etika yang dianut oleh berbagai kalangan progresif sebelum perang.

²⁹ Harold M. Vinacke, A History Of The Far East In Modern Times (trans). (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. kedua, 1978), hal. 1080.

³⁰ Idio.

Pendirian pemerintah ini didukung penuh oleh gerakan-gerakan perlawanan gabungan di Netherland, termasuk kaum Komunis. Mereka membuktikannya dalam sebuah pernyataan yang disusun oleh sebuah panitia, diketuai oleh tokoh politik sosialis terkemuka yang kemudian menjadi Perdana Menteri Belanda, Prof. Schermerhorn. Pernyataan itu dimuat dalam surat kabar bawah tanah "Vrij Netherland" dalam bulan April 1945.³⁰ Isi pernyataan tersebut berbunyi:

"Kami, para pegawai negeri, seperti halnya dengan kebanyakan bekas interniran lainnya, sudah tidak sabar untuk kembali bekerja, bersama-sama dengan rakyat Indonesia melaksanakan tugas membangun kembali negeri yang sudah sangat rusak itu. Kami menyadari, yang akan dihapai adalah Indonesia yang berbeda dari sebelum perang, suatu Indonesia yang akan diurus oleh orang-orang Indonesia sendiri dan yang akan secara bebas memutuskan masa depannya, sesuai dengan pernyataan Ratu, secepat mungkin. Tugas kami adalah untuk mempersiapkan peralihan ini dan membantu rakyat Indonesia dengan pelaksanaannya, terutama sekali sebagai penasehat di bidang pemerintahan dan ekonomi. Bagi banyak diantara kami, ini berarti suatu pengorbanan yang sangat besar, oleh karena kami merasa tidak dapat menyisihkan waktu untuk menyembuhkan diri kembali, dari pengalaman yang mengerikan selama tahun-tahun peperangan."³¹

Struktur Federal ini juga menarik bagi kaum politisi Belanda baik dari partai-partai yang lebih progresif maupun yang lebih konservatif. Tujuan bahwa politik "memecah belah" memainkan peranan dan bertanggung jawab dalam hal ini harus ditolak mentah-mentah. Menurut Dr. A.J.

³⁰ Colin Wild dan Peter Carey, Gelora Api Revolusi; Sebuah Antologi Sejarah. (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 208.

³¹ Ibid.

Piekaar,³² ia dengan sepenuh nati menumpahkan segala piki-
ran bagi pelaksanaan struktur federal ini, mula-mula ia
sebagai sekretaris badan pemerintahan yang ditugaskan un-
tuk menyelesaikan rencana Malino itu dan kemudian sebagai
sekretaris Komisaris Tinggi Kerajaan; Dr. Beel.

³² Dr. Piekaar adalah seorang pegawai sipil kolonial
di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Sewaktu
pendudukan Jepang ia diinternir. Ia menerangkan bagaima-
na pandangan Belanda mengenai perjuangan kemerdekaan itu,
dalam sebuah naskah yang kemudian disiarkan oleh BBC Sek-
si Indonesia ditanun 1985, dengan judul "Gelora Api Revo-
lusi." Lihat Colin Wild dan Peter Carey, ibid.

BAB III

NEGARA INDONESIA TIMUR

Pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1945, menunjukkan perkembangan yang cukup berat, pergolakan itu sebagai akibat dari latarbelakang keberadaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara yang terkait didalamnya. Pemerintah Indonesia dengan pernyataan kemerdekaannya, dengan sendirinya berkeinginan untuk melepaskan diri dari penindasan penjajah. Belanda dengan notabene sebagai bekas penjajah, ingin mengembalikan posisi dan kedudukannya pada daerah-daerah jajahannya termasuk Indonesia (Hindia Belanda).¹ Perang Pasifik dengan melibatkan negara-negara besar pada masa itu seperti Inggris dan Amerika, juga melihat keberadaan Indonesia dari sisi lain. Konferensi Postdam Juni 1945, memutuskan bahwa Thailand, Indo Cina dan Hindia Belanda akan termasuk dalam suatu wilayah komando Inggris yang diberi nama South East Asia Command (S.E.A.C.), di bawah pimpinan Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten. Inggris telah menyatakan pendiriannya dengan menyatakan pernyataan politiknya: Letnan Jeneral Christison mengatakan bahwa "tugasnya yang utama ialah untuk membebaskan tahanan perang dan melucuti pasukan Jepang. menurut beliau, Inggris tidak mempunyai kepentingan dalam soal

¹Bahan Arsip pada perwakilan Arsip Sulawesi Selatan Warta Politik Dari Negara Indonesia Timur, Tahun 1950; Registrasi No. 97. Kode Dos No. 20.

politik.² Pernyataan ini, menunjukkan pemberian kuasa hukum kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur dan menentukan nasib negara dan bangsanya.

Pernyataan Inggris tersebut diatas; sangat berbeda dengan keinginan Belanda, yang pada saat itu diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook yang tiba di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1945. Van Mook melihat bahwa pernyataan Christison itu, sebagai suatu pengakuan de facto terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno Hatta.

1.1 Proses Terbentuknya NIT

Peranan Belanda dalam proses pembentukan NIT cukup besar, tapi dengan peranannya itu bukan berarti Belanda ingin mewujudkan kedaulatannya di Indonesia. Tampaknya Belanda ingin menjadikan Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai negara dari Negara Indonesia Serikat (RIS) dengan otonomi yang luas, agar supaya NIT dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Maksud dan tujuan Belanda tersebut diterima baik sebahagian masyarakat yang mengerti bahwa dengan otonomi yang luas kemungkinan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Apakah ada pamrih atas peranan Belanda tersebut, perjalanan sejarahnya yang menentukan. Dalam hubungan ini G.R. Pantouw menjelaskan peranannya dalam proses pembentukan NIT, bahwa beliau dan Naajamuudin Dj. Maiewa bekerjasama dengan van Mook dalam bidang ekonomi karena melihat rakyat

² Ide Anak Agung Goe Agung, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat (Yogyakarta, 1985), hal. 151.

sudah cukup merasakan penderita akibat penjajahan Jepang. Pantouw melinat bahwa tidak ada kesempatan lain lagi di Sulawesi Selatan selain menerima untuk bekerja sama dengan Belanda. Sebab nampaknya NICA telah dapat menguasai keadaan dengan bantuan-pasukan-pasukan Belanda yang telah didatangkan, dengan maksud kemudian untuk menggantikan pasukan Sekutu.³ Zaman Hindia Belanda dahulu akan kembali ke daerah Sulawesi Selatan, Raja-raja dipaksakan untuk tunduk kepada opsir-opsir NICA, yang sebenarnya opsir NICA sama dengan Residen Hindia Belanda dulu.

Pada waktu van Mook dalam penerbagaannya dari Australia menuju Jakarta, terlebih dahulu transit di Mandai. van Mook meminta Nadjamuddin Dg. Malewa agar dapat bekerja untuk mempersiapkan suatu kesatuan pemerintahan yang bakal dibentuk sebagai suatu bagian dari federalis. Usaha pendirian yang dianjurkan van Mook pada waktu itu belum banyak orang yang dapat menyetujui sepenuhnya dengan diasingkannya Dr. Ratulangi beserta stafnya ke Serui. Namun G.R. Pantouw berpendapat bahwa dengan adanya suatu kesatuan pemerintahan yang akan dibentuk oleh van Mook ada kemungkinan NICA dapat disingkirkan.⁴

Berselang beberapa hari lamanya Pantouw dan Nadjamuddin Dg. Malewa berangkat ke Jakarta untuk menemui Dr. H.J. van Mook. Di Jakarta telah hadir Tjokorde Gde Rake Soekawati

³ ibid. hal. 92.

⁴ Hasil wawancara bersama Bapak G.R. Pantouw, Loc. Cit.

dari Bali. Kemudian van Mook, Soekawati dan Naojamuddin Dg. Malewa mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang cukup serius. Setelah pembicaraan Naojamuddin menjelaskan kepada Pantouw bahwa van Mook sudah mempunyai rencana untuk mendirikan suatu negara bagian yang akan disebut "Groote Oost" atau Negara Timur Pusat. Naojamuddin Dg. Malewa akhirnya mengusulkan supaya jangan menggunakan Istilah Groote Oost, tetapi bentuklah suatu negara yang bernama Indonesia Timur. Istilah Indonesia Timur itu sebenarnya berasal dari Dr. Ratulangi. Van Mook juga menanyakan kepada Naojamuddin Dg. Malewa jika negara yang akan didirikan disebut Negara Indonesia Timur (NIT), dan apakah cukup orang yang mempunyai kecakapan dan skill untuk menjadi menteri dan dapat dihormati. Naojamuddin Dg. Malewa mengiyakan dan menyatakan sanggup.

Mengenai masalah politik dan pembangunan ketatanegaraan di Sulawesi Selatan oleh Naojamuddin diajukan beberapa saran dan pemikiran.

Lebin dahulu Naojamuddin Dg. Malewa menyatakan bahwa kalangan pemuda rakyat dan pemimpin-pemimpin alisan masyarakat di Sulawesi Selatan sangat cemas bahwa masalah politik Indonesia akan dipecahkan tanpa mengikutsertakan rakyat Sulawesi Selatan. Dia gembira setelah mendengar penjelasan dari van Mook bahwa dugaan ini tidak benar. Sekarang dia yakin bahwa kemudian Sulawesi Selatan akan mengirimkan wakilnya ke Konperansi Meja Bujur (KMB).

x Lebin lanjut Naojamuddin Dg. Malewa menjelaskan mengenai sikap pemuka-pemuka rakyat di Sulawesi Selatan yang ke-

mudian menutup pembicaraannya. Isinya menyatakan sebagai berikut:

"Pemuka-pemuka rakyat di Sul-sel telah mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pembangunan dengan suatu keyakinan bahwa dengan jalan ini mereka mengabdikan kepada nusa dan bangsa, sekalipun dengan hati yang berat mereka dengan ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan aliran ekstrem di kalangan mereka sendiri.

Mereka bersedia sebagai sekutu (partner) yang pantas dan sederajat bekerjasama di dalam pembangunan. Apabila mereka mendapat pesan bahwa mereka hanya dianggap sepele saja, saya berkeyakinan teguh bahwa tiap-tiap orang Indonesia yang sejati akan mengundurkan diri dengan suatu kesadaran bahwa pihak Belanda sendirilah yang memutuskan perjanjian kerjasama itu oleh karena tidak bertindak sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ratu Wilhelmina. Kesadaran nasional Indonesia dalam masa empat tahun bertambah mendalam. Jangan dilupakan bahwa masyarakat Indonesia masih penuh syakwasangka.... Oleh karena itu jangan dipersulit tugas kewajiban para pemuka rakyat ini. Janganlah berikan mereka sesuatu dengan tangan kanan untuk kemudian diambil kembali dengan tangan kiri. Berikan kepada mereka tanggung jawab yang penuh, bukan secara harfiah saja, akan tetapi juga sesuai dengan jiwa tanggungjawab itu.

... Untuk orang Indonesia yang penting adalah pengakuan terhadap martabatnya dan bukan pangkat atau kedudukan yang diberikan kepada mereka.

Mereka menghendaki wewenang sendiri, tanggungjawab sendiri. Apabila ini tidak diberikan kepada mereka, maka kerjasama itu akan dihancurkan dan kecurigaan akan timbul sebagai penggantinya. Lebih jangan mengangkat seorang Indonesia sebagai petugas apabila kepadanya tidak diberikan tanggungjawab dan wewenang yang sama yang diberikan kepada petugas Belanda. Seorang nasionalis Indonesia tidak banyak memertingkan kedudukan baik atau gaji yang tinggi, akan tetapi baginya yang sangat penting adalah pengakuan, wewenang dan kekuasaan serta tanggungjawab. Mempertahankan citra dan martabat terhadap bangsanya sendiri adalah masa yang sangat berat bagi dia. Inilah yang sering dilupakan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu perlu sekali gaji di eluarkan dari hati yang penuh dengan kehormatan dan perasaan persaudaraan dan keakraban dengan tujuan agar dapat dicapai cita-cita mewujudkan kerjasama berdasarkan persaudaraan.

Inilah himbauan yang saya ingin serukan

kepada orang Belanda." ⁵

✓ Kunjungan Naojamuddin Dj. Malewa dan G.R. Pantouw di Jakarta dapat di simpulkan sebagai suatu hasil yang positif dalam usaha Pemerintahan Hindia Belanda dalam mewujudkan kerjasama dengan tokoh-tokoh politik dan aliran masyarakat di Sulawesi Selatan, di samping mengesakan kerjasama dengan para raja dan karaeng.

✓ Menjelang pembentukan Dewan Sulawesi Selatan dan sesudah itu di bulan Maret dan April 1946, keadaan keamanan di Sulawesi Selatan menjadi baik dan pemerintah sipil lambat laun pulih kembali. ⁶

Dalam bulan April 1946 Dr. H.J. van Mook mulai mencurahkan perhatiannya untuk mengambil prakarsa politik di Indonesia Timur sebagai suatu tindakan lanjutan akibat kegagalan politik Pemerintah Belanda, untuk mendapat suatu persetujuan paham dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam memperoleh penyelesaian masalah Indonesia.

Dibantu oleh Dr. W. Hoven (Direktur Pemerintah Dalam Negeri) ia mulai mendekati pemuka-pemuka politik dan aliran-aliran masyarakat, demikian juga pejabat pemerintahan di Indonesia Timur untuk minta bantuan mereka agar turut serta dalam suatu muktamar besar, untuk membicarakan konstelasi dan susunan pemerintahan dalam rangka susunan ketatanegaraan baru di Indonesia. Dalam muktamar tersebut akan diikuti

⁵ Ide Anak Agung Goe Agung, Op. Cit., hal. 89.

⁶ Ibid., hal. 92.

sertakan wakil dari Kalimantan, Sulawesi Selatan, Minahasa, Maluku Selatan, yang masing-masing telah memiliki Dewan Sementara dan daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur.

Pada bulan Juli 1946 G.R. Pantouw dan Nadjamuddin Dg. Malewa mendapat kabar bahwa van Mook akan datang ke Makassar untuk mengaoakan kelanjutan daripada maksud van Mook untuk menoirikan NIT.

Dr. van Mook memilih Malino sebagai tempat pelaksanaan muktamar yang direncanakan itu untuk menunjukkan pentingnya arti kedudukan Sulawesi Selatan dalam hubungan wilayah Indonesia dengan Kalimantan dilihat dari sudut politis, ekonomis, dan geografis.⁷

Tanggal 15 Juli 1946 van Mook tiba di Makassar, dan esok harinya diadakan suatu upacara besar bertempat di lapangan Karebosi Makassar, di mana dilangsungkan suatu serah terima tanggungjawab pemerintah dan keamanan dari Tentara Sekutu untuk wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan kepada Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Dr. van Mook. Itu berarti tanggungjawab pemerintah di seluruh wilayah kekuasaan yuridiksi Tentara Sekutu untuk Indonesia Timur dan Kalimantan diserahkan kepada Letnan Jenderal van Mook. Dan mulai saat itu Tentara Sekutu ditarik dari wilayah tersebut dan diganti oleh pasukan Belanda yang terdiri atas Tentara Kerajaan Belanda, dan polisi yang bertanggungjawab atas keamanan; kesatuan-kesatuan NICA yang dulu menjalankan pemerintahan sipil dibawah tanggungjawab Tentara Sekutu (pasukan Inggris atau Australia) diganti oleh Pamon

praja Belanda.

Sebelumnya pada tanggal 8 Juli 1946 di Jakarta Dr. van Mook telah menandatangani surat keputusan No. 4 tentang pembentukan suatu Komisariat Pemerintahan Umum untuk Indonesia Timur dan Kalimantan yang mempunyai daerah yuridiksi atas wilayah Indonesia Timur, keresidenan Bangka, Riau, dan Belitung. Badan yang terbentuk mempunyai tugas:

1. "Mempelajari dan mempersiapkan pembangunan ketatanegaraan di Kalimantan dan Timur Besar (Indonesia Timur);
2. Membantu Gubernur Jenderal dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan di wilayah Kalimantan dan Timur Besar sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang diberikan kepadanya;
3. Menjalankan wewenang Gubernur untuk wilayah Kalimantan dan Timur Besar, di dalamnya termasuk juga untuk melimpahkan beberapa wewenang Gubernur kepada Residen-residen di wilayah tersebut."

Dr. J. Hoven yang menjabat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian diangkat sebagai Komisaris Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Indonesia Timur. Dan pada tanggal 15 Juli 1946 semua peserta Konperensi Malino sudah hadir. Jadi usaha van Mook sudah mempunyai bentuk yang lebih nyata tentang ide pembentukan NIT.

Sebagai tindak lanjut dari Konperensi Malino, diadakanlah suatu pertemuan khusus yang terdiri Komisi Jenderal utusan Parlemen Belanda Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook sebagai penguasa eksekutif Pemerintahan Hindia Belanda dengan beberapa tokoh-tokoh Politik Indonesia yang oleh van Mook dipandang dapat menyetujui konsep federasi

⁷ Ibid., hal. 98-99.

diantaranya; Sultan Hamid dari Kalimantan Barat, H. Mucntar Luthfi, Nadjamuddin Dg. Malewa dan GR. Pantouw.

Dalam pertemuan tersebut diungkap oleh van Mook, bahwa pada tanggal 12 September 1946 akan berlangsung di Linggarjati permulaan perundingan antara pihak Belanda yang terdiri atas Komisi Jenderal dibawah Pimpinan Prof. Dr. Schermerhorn dengan dua anggota De Boer dari pengusaha dan Partai Katholik Belanda anggota ketiga, bersama Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook beserta stafnya dengan pihak Republik Indonesia yang terdiri atas, Perdana Menteri R.I. Sutan Syarir beserta staf menteri-menteri dan bila perlu Ir. Soekarno sebagai Presiden.⁸

Dimintakan pendapat dari Nadjamuddin Dg. Malewa dan Sultan Hamid mengenai konsep suatu Federasi yang akan terdiri atas Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur, yang kesemuanya disetujui. Apapun hasil Linggarjati, Nadjamuddin Dg. Malewa mengusulkan kepada van Mook untuk selekasnya membentuk Negara Indonesia, yang oleh van Mook disetujui sepenuhnya.

Dengan konsesi yang telah diberikan oleh van Mook mulailah disiapkan suatu konsep Tata Negara yang dapat mengatur suatu Tata Pemerintahan yang demokratis berparlemen menurut sistem Eropa-Barat, yang eksekutifnya dapat diganti sesuai keputusan Parlemen, dengan Presiden NIT yang sesuai peranan Letnan Gubernur Jenderal.

⁸Wawancara bersama Bapak G.R. Pantouw, Op. Cit.

Pada tanggal 16 Juli 1946 Konperensi Malino dibuka dengan resmi oleh Gubernur Jenderal H.J. van Mook dan berakhir pada tanggal 25 Juli 1946. Konperensi Malino ditutup dengan kata perpisahan yang mengharukan di mana van Mook antara lain menyatakan bahwa: "Kita semua selama Konperensi Malino ini meletakkan dasar di atas mana bangunan Indonesia baru dan merdeka akan diwujudkan."⁹

Dalam konperensi itu dibicarakan segala sesuatu mengenai hubungan Belanda dengan Republik Indonesia. Juga dibicarakan perundingan-perundingan yang telah dilangsungkan antara van Mook dengan wakil-wakil dari Republik Indonesia. Adapun wakil-wakil yang menghadiri Konperensi Malino yakni, dari pihak Belanda dinaciri oleh van Mook beserta stafnya, yang terdiri dari pembantu-pembantu utamanya disamping staf sekretariat dan tahnis yang akan menyelenggarakan konperensi. Wakil dari Belanda tersebut antara lain Dr. W.Hoven (Direktur Departemen Dalam Negeri), C.J.M.R. de Waal wakil komisaris Pemerintahan Umum, Sekretaris pemerintah Pertama Dr. E.O. Baron van Soetelaar, sedangkan anggota kabinetnya dan penasehat-penasehatnya adalah Dr. P.J. Koets (Kepala Kabinet), Abdulkadir Widjojoatmodjo (Penasehat Umum), Mr. K.L.J. Enthoven (Penasehat Hukum), Tnio Thiam Tjong (Penasehat) dan jhr. Mr. C.M.W. de Villeneuve (Penasehat). Dari kalangan Departemen Urusan Ekonomi dihadiri oleh Direktur - nya Mr. J. van Moogstraten dengan pegawai tingginya H.M.A.

⁹Ide Anak Agung Gde Agung, Ibid, hal. 117.

Crevels, dari Departemen Pekerjaan Umum hadir Direktornya Ir. C.J. Werner sedangkan dari Departemen Pendidikan hadir pula Direktornya D.v.d. Neulen dengan beberapa inspektornya.

Dalam Konperensi dihadiri pula oleh anggota pers baik dalam maupun luar negeri, seperti; Rinto Alwi dari Harian "Rakyat" Jakarta (Pers Republik), Roshan Anwar dari Biro Pers Antara dan surat kabar "Meroeka" di Jakarta (Pers Republik), F.J. Goedart dari surat kabar Met Parool (Amsterdam) Royak Arch Gunnison dari Mutual Broadcasting System di New York. S.T. Msih dari Central New Agency, Kwee Kek Beng dari surat kabar "Sin Po" di Jakarta. Soedjiamoko dari Majalah "Inzicht" dari Biro Pers Eneta di Jakarta. Jhon de la Valette dari Sydney Morning Herald (Australia), Miss R.W. Vining dari Far Eastern Publicity di Jakarta. Miss Barbara Whittingham Jones dari Moulton Press (Inggris)

Adapun wakil-wakil dari Indonesia yang tergabung dalam Timur Besar, antara lain; Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sangihe dan Talaud Maluku Utara, Maluku Selatan, Irian Jaya, Tanimbar, Kep. Kei, dan Aru, Kep. Barat Daya, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor.¹⁰

Khusus untuk Sulawesi Selatan, diwakili sepuluh orang

¹⁰ Penjelasan mengenai wakil-wakil dari setiap daerah tersebut diatas, lihat Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, Ibid. hal. 100-102

masing-masing; Andi Kabenteng, Laode Falihi, Sultan Buton, La Tjiboe, Adatoea Sidareng, Naojamuddin Dg. Malewa, Sonda Dg. Mattayang, Aboullah Dg. Mappuji, (penasehat), Abdul Radjab (penasehat), Andi Ronda (penasehat), Arung Matjege (penasehat), dan Manarfa (penasehat).

Acapun hasil keputusan dari Konperensi Malino adalah:

- I. Negara Indonesia nanti harus berbentuk Federal.
- II. Sebelum Negara Federal itu terbentuk, harus dilalui masa peralihan, selama masa keaulatan tetap berada di tangan Belanda.
- III. Biar pun Negara Federal itu merdeka, namun harus ada hubungan tetap dengan Nedherland.¹⁰

Pada tanggal 1 Oktober 1946 van Mook mengadakan Konperensi Minoritas (golongan-golongan kecil) di Pangkalpinang. Konperensi ini diikuti oleh wakil-wakil dari golongan peranakan Tionghoa, golongan peranakan Arab dan golongan Belanda (termasuk golongan Indo Belanda). Dalam Konperensi ini dinyatakan bahwa hasil-hasil konperensi Malino harus dilaksanakan.¹¹

Demikianlah pada malam penutupan konperensi diadakan acara perpisahan yang dihadiri semua wakil-wakil daerah,

¹⁰ Dalam konperensi Pangkalpinang ini untuk pertama kalinya disinggung daerah Irian Barat. Ir. Wermuth, wakil dari kumpulan IndoBelanda, Indo Europees Veroond, mengusulkan agar daerah Irian Barat "gireserveer" untuk orang-orang Indo Belanda, ini berarti bahwa daerah itu tidak diikutsertakan dalam wilayah Negara Federal Indonesia, tetapi diadakan ikatan hubungan langsung dengan Nedherland. Dalam hal ini konperensi tidak mengambil keputusan.

¹¹ Susanto Tirtopdjo, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia. (Jakarta: Balai Buku, 1965), hal. 13

Dr. H.J. van Mook dengan seluruh stafnya disertai dengan semua anggota pers dan anggota sekretariat yang bekerja keras untuk kelancaran jalannya konperensi. Pada kesempatan itu van Mook mengumumkan bahwa konperensi yang kedua yang ditujukan untuk membicarakan secara terperinci pembangunan dan perwujudan susunan ketatanegaraan akan dilangsungkan di Denpasar, Bali, dalam waktu 4 bulan mendatang.

Menjelang Konperensi Denpasar, dilangsungkan perundingan Linggarjati antara pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dengan pemerintah Belanda yang diwakili oleh Komisi Jenderal dibawah ketua Prof. Dr. Schermerhorn yang dimulai pada tanggal 12 Nopember dan hasilnya diparaf pada tanggal 15 Nopember 1946 oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Syahrir dan Ketua Komisi Jenderal Prof. Dr. Schermerhorn. Dalam Perundingan itu dihasilkan Naskah Linggarjati yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto (yang nyata) Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.
2. Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949.
3. Negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia-Belanda.¹²

Berdasarkan atas pemikiran untuk pembentukan suatu susunan ketatanegaraan baru di Indonesia Timur dan militer waktu yang kian mendesak. Gubernur Jenderal van Mook memutuskan untuk segera melangsungkan Konperensi Denpasar pada tanggal 7 Desember 1946 setelah mendapat nasehat dari Ko-

¹²K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati, (Jakarta, 1986), hal. 2-5.

misaris Pemerintahan Umum dan Komisi Tujuh, yang sebelumnya telah dibentuk di Malino.

Pada permulaan bulan Desember G.R. Pantouw dan beberapa tokoh nasionalis dari Sulawesi Selatan setelah mendengar berita bahwa Konferensi Denpasar segera akan dilaksanakan setelah semua peserta konferensi sudah hadir, maka konferensi itu dimulai saja pada tanggal 7 Desember 1946 secara informal di mana Komisaris Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Indonesia Timur (Timur Besar), Dr. W. Hoven, bertindak sebagai ketua sementara. Pembicaraan-pembicaraan informal ini berlaku sampai tibanya van Mook di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1946. Rapat-rapat informal itu diadakan tiga kali sambil menunggu kedatangan Letnan Jenderal Dr. H.J. van Mook.

Rapat yang pertama diadakan tanggal 7 Desember 1946 dibawah pimpinan Komisaris Pemerintahan Umum Dr. W. Hoven, dan yang kedua dan ketiga diadakan tanggal 9 dan 11 Desember dibawah pimpinan wakil Komisaris Pemerintahan Umum E.H.J.R. de Waal. Rapat-rapat tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada peserta Konferensi mengenai isi rencana peraturan-peraturan mengenai pembentukan Negara Indonesia Timur, dan sambil mengadakan pertukaran pikiran dengan para peserta mengenai hal-hal tersebut diatas. Dr. W. Hoven menjelaskan bahwa tidak dimaksudkan pada taraf pembicaraan. Sekarang untuk mengadakan usul-usul prinsipil atau perubahan-perubahan; oleh karena harus menunggu tibanya van Mook.

Konperensi Denpasar dibuka dengan resmi oleh Dr. H.J. van Mook pada tanggal 18 Desember 1946 pukul 9 pagi; yang didahului oleh pidato pembukaan dari van Mook.

Pada sore harinya, pemenuhan umum berdasarkan pidato dari van Mook dan rencana peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur dimulai, Dari tujuh puluh wakil-wakil yang hadir, tiga puluh delapan anggota yang menyatakan diri untuk turut serta dalam pemenuhan umum itu.

Dalam pemenuhan umum itu tampil juga G.R. Pantouw sebagai pembicara, yang menyatakan pendapatnya sehubungan dengan pembentukan negara-negara federasi. Bunyi pidato G.R. Pantouw pada dasarnya mengemukakan dua garis pokok, seperti yang dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

"Untuk mendirikan suatu negara federasi dapat ditempuh dua jalan:

1. Langsung mendirikan negara-negara federasi dari negara-negara bagian. Tindakan dari atas ada pusatnya.
2. Mendirikan dulu negara-negara bagian yang berdaulat kemudian negara-negara yang berdaulat mempersatukan diri dalam negara federasi (satu pusat)."

Dapat dikatakan bahwa mereka yang hadir dalam Konperen Denpasar, semuanya ingin bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, sebagaimana dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk hadir dalam Konperensi Denpasar itu. Akan tetapi jika dianalisis komposisi keanggotaan konperensi ini, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua wakil-wakil itu mendukung politik dan kebijaksanaan Pemerintah Belanda, Atau dengan kata lain, banyak di antara mereka yang dapat dikatakan bersimpati pada Republik Indonesia. Seperti wakil-



wakil dari Sulawesi Selatan Mr. Tadjuddin Noor (pengacara di Makassar), Muhammad Akio (Ketua Majelis Islam di Makassar), Mr. S. Binol (wakil hakim pengadilan negeri di Makassar), G.R. Pantouw (Pemoantu Pemerintahan Propinsi Sulawesi dan mantan sekretaris Ratulangi) yang terkenal termasuk golongan Republikan. Dari Sulawesi Utara seperti Ajaeba Wartabone dan Tom Olli, wakil Sangir Talud J.E. Tatenkang, dan wakil Sulawesi Tengah Inchi Muhammad Dachlan. Juga dari Maluku Selatan E.U. Pupella, wakil Bali I Gusti Bagus Oke, wakil Lombok Laloe Serinata, dan wakil dari Timor I.H. Doho, semuanya bersimpati kepada Republik Indonesia.

Mengapa orang-orang yang dianggap sebagai nasionalis setuju untuk bekerjasama dengan Belanda dalam NIT? Bapak G.R. Pantouw, yang telah bekerja dengan Dr. Ratulangi dalam SUDARA dan Pusat Keselamatan Rakyat sebelum menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Pertama NIT, menerangkan sebagai berikut:

"Saya memisahkan diri dari PKR: Saya melihat kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari badan semacam itu. Saya dengan Nadjamuddin, kami beroua mengorganisasikan badan politik lain untuk bekerjasama dengan Belanda karena perlawanan pada waktu itu mengecewakan.

Kami bekerjasama dalam beberapa hal dengan NICA, terutama yang berkenaan dengan masalah ekonomi. Kami berpendapat bahwa rakyat telah demikian menderita selama pengeboman dan penudukan Jepang, sehingga kami berpendapat tidaklah bertanggungjawab (untuk menolah Belanda). Kebanyakan orang menganggap NIT adalah pemerintahan Boneka, tetapi orang menganggap NIT adalah desakan kami - di Denpasar kami memaksa van Mook menerima rancangan kami... Kami ingin memaksakan berdirinya Indonesia Timur sebab kami tidak bisa mentolerir lebih lama lagi NICA sebagai suatu badan yang memerintah - itu akan berarti ditegakkannya kembali kolonialisme.

Pada waktu itu dimata kami (tidaklah mungkin untuk menjadi bagian dari Republik). Kami tidak mempunyai kekuatan militer, tidak mempunyai apa-apa. Untuk melawan Belanda kita harus mempunyai serdadu dan senjata, padahal kami tidak mempunyainya.

Kami tidak punya senjata untuk melawan secara efektif, dan kami menganggap tidak bertanggungjawab untuk membiarkan para pemuda tewas dalam mempertahankan cita-citanya dengan cara seperti itu."¹³

Apabila diadakan penelitian terhadap pandangan umum dari 38 anggota konferensi yang menyatakan pendapatnya, dari yang konservatif sampai yang ekstrem pro Republik. Hal yang demikian memang merupakan suatu akibat yang logis dari komposisi utusan-utusan dalam Konferensi Denpasar itu, yang nampaknya benar-benar mewakili segala aliran masyarakat yang berkembang di wilayah Indonesia Timur.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam Konferensi Denpasar adalah hasil dari suatu pertukaran pikiran yang bebas antara wakil-wakil daerah dan para utusan lain dengan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal van Mook, untuk menyusun suatu bentuk pemerintahan dan ketatanegaraan baru di Indonesia Timur.

Pendapat yang mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam proses terbentuknya NIF adalah kaki tangan Belanda yang hanya mencerminkan semata-mata politik pemerintah Belanda, sebenarnya hanya merupakan politik kebangsaan yang ingin menumbuhkan perasaan nasionalisme yang tinggi.

Pada tanggal 20 Desember 1946 selesailah pandangan umum para utusan. Sekarang tibalah saatnya bagi van Mook untuk memberi jawaban atas pandangan umum tersebut yang

¹³ Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII (Jakarta, 1989), hal. 137.

disampaikannya pada tanggal 22 Desember 1946.

Dengan selesainya jawaban van Mook terhadap pemanda-
ngan umum para utusan, maka tanggal 23 Desember 1946 di-
mulailah pembahasan mengenai rencana peraturan
pembentukan NIT seperti yang diajukan oleh Pemerintah Hin-
dia Belanda, dengan memperhatikan usul-usul perubahan dari
para utusan, dan ditambah dengan nota perubahan yang diaju-
kan oleh van Mook tertanggal 22 Desember 1946.¹⁴

Oleh karena tidak disetujui oleh Konperensi Denpasar
bahwa dalam konperensi kepala negara harus sudah dipilih,
maka segera diadakan pembatasan mengenai peraturan pemili-
han kepala Negara dan penetapan sumpahnya. Setelah peratu-
ran pemilihan kepala negara dan isi sumpahnya diterima, ma-
ka dimulailah pemilihan kepala negara pada pukul 10.30 pa-
gi tanggal 24 Desember 1946.

Ketua konperensi menyatakan ada tiga calon yang telah
diajukan untuk jabatan itu, Mr. Tadjudin Noor (ketua Par-
tai Kedaulatan Rakyat di Makassar, wakil Sulawesi Selatan),
Tjokorde Goe Rake Soekawati (wakil dari Bali), dan Nadja-
muudin Daeng Malewa (wakil Sulawesi Selatan).¹⁵

Munculnya ketiga nama tokoh ini memberi arti yang sangat
kuat, betapa keterbukaan dalam bidang politik ketika itu.
Dan dengan terpilihnya Soekawati sebagai kepala negara,
memberi arti yang jelas bahwa sejak semula pikiran ke dae-

¹⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit., hal. 166

¹⁵ Mengenai proses pemilihan kepala negara ini untuk
lebih jelasnya lihat Anak Agung, Ibid., hal. 169.

rahan yang sempit tidak mendominasi cakrawala pemikiran para tokoh NIT ketika itu.

Konferensi Denpasar tanggal 7 - 24 Desember 1946 dihadiri oleh golongan federalis dan golongan unitaris, kedua golongan ini terlibat dalam diskusi dan perdebatan untuk merumuskan pembentukan NIT. Dengan demikian konferensi Denpasar merupakan penggambaran demokrasi tanpa adanya paksaan dan penindasan dari satu golongan terhadap golongan lain. Seperti yang disinyalir oleh Anak Agung bahwa, keputusan-keputusan yang diambil dalam Konferensi Denpasar adalah hasil dari suatu rumusan untuk mendapatkan suatu "communis opinio" (pencapat umum) yang dicapai melalui diskusi dan perdebatan dari semua peserta dalam suasana yang bebas tanpa adanya paksaan atau dominasi dari satu golongan terhadap golongan lain dimana etik dan moral demokrasi menjadi pegangan.¹⁶

Konferensi Denpasar yang berjalan secara demokrasi itu adalah merupakan refleksi dari Persetujuan Linggarjati yang menginginkan dibentuknya Negara Indonesia Serikat. Konferensi Denpasar yang telah mengukuhkan terbentuknya NIT merupakan suatu usaha untuk mendirikan satu negara bagian dari Negara Indonesia Serikat, seperti yang termuat dalam Persetujuan Linggarjati. Dengan demikian, kalau Konferensi Denpasar dan Persetujuan Linggarjati di jadikan tolok ukur maka konsekwensinya NIT harus sederajat dengan Republik

¹⁶Ibid., hal. 151.

Indonesia. NIT yang telah berdiri sebagai satu negara bagian, jelas akan memberi wewenang kepada pemerintah NIT untuk menjalankan kekuasaan otonomi lokal di kawasan Indonesia Timur.

3.2 Situasi Kota Makassar sebagai Ibu Kota NIT

Kota Makassar adalah kota historis dan kota kebudayaan untuk masyarakat Indonesia bagian timur. Khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah perjuangan bangsa dan telah terpatri dalam sejarah nasional, kota Makassar telah dikenal dengan baik oleh para sejarawan di Asia Tenggara, bahkan oleh sejarawan Portugis, Belanda, Inggris, dan lain-lain.

Kota Makassar dalam zaman revolusi 1945, mencatat sejarah sebagai kota historis yang berkaitan dengan perjuangan politik masyarakat Sulawesi, bahkan masyarakat Indonesia bagian Timur. Kota Makassar oleh pendukung konsep federal dari van Mook telah dijadikan Ibu Kota Negara Indonesia Timur, tetapi sebaliknya oleh para pejuang kemerdekaan dari kawasan ini dijadikan pusat gerakan untuk menhancurkan konsep federal van Mook. Dengan demikian, kota ini menjadi kota pertarungan politik dan militer antara pejuang kita yang heroik dengan kelompok serdadu NICA yang merupakan pendukung konsep federal dari van Mook.

Kota Makassar selama revolusi pernah diliputi oleh kesedihan dan duka yang mendalam. Karena kota ini telah kehilangan penduduknya yang berjumlah puluhan ribu dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan. Kapten R.P.P. Westering adalah algojo Belanda yang telah membantai rakyat

kawasan ini, pemilik kota Makassar. Oleh sebab itu, dari kota ini pula tercatat perjuangan penduduknya yang telah berjaya memenangkan perang kemerdekaan di zaman revolusi.

Suasana kota Makassar setelah penduduknya secara resmi mendengar berita proklamasi dari wakil-wakilnya yang dikirim untuk menghadiri sidang PPKI. Dalam masa relatif singkat, mereka memperlihatkan tingkah laku yang lain dari biasanya. Jika pada masa menjelang proklamasi, terutama pada saat-saat terakhir masa pendudukan militer Jepang, hampir semuanya diliputi suasana "wait and see". Oleh karena, mereka sudah memperkirakan kekuasaan militer Jepang akan berakhir. Tapi kemudian, suasana itu berubah, semua perasaan yang tertekan selama masa pendudukan Jepang, termasuk periode penindasan pemerintah jajahan Belanda dan antek-anteknya, meledak keatas permukaan dan memperlihatkan tingkah laku yang agresif dan dan revolusioner.¹⁷

Semua lapisan sosial di Masyarakat, dari semua tingkatan umur dan kelompok etnik penduduk kota Makassar yang historis itu, menyambut berita proklamasi itu dengan perasaan syukur dan gembira. Ini tergambar dari wajah-wajahnya dan yang terpenting adalah perasaan siap bertarung untuk mempertahankan kemerdekaan bila Belanda menjajah kembali. Perasaan yang terakhir ini terlihat, terutama di kalangan generasi muda yang dalam perkembangan perjuangan

¹⁷ Kementerian Penerangan R.I. Propinsi Sulawesi (Kementerian Penerangan, 1953), hal. 227

banyak menentukan berhasil tidaknya pertarungan militer dalam melawan invasi militer Belanda, Tenaga muda progresif revolusioner ini berdiri di 'front' paling depan dalam menhadapi serbuan NICA yang berusaha untuk menghancurkan perlawanan rakyat Sulawesi.

Dalam beberapa hari saja, semangat revolusi 1945 telah merata dirasakan dan sekaligus berkobar dalam dada setiap warga kota Makassar. Bahkan, dikalangan penduduk keturunan Cina yang lahir di kota ini dan telah menyatu kehidupannya dengan kelompok pribumi, telah menjatuhkan pilihannya untuk mendukung republik dengan antusias menyambut hari bersejarah tersebut.

Sebenarnya, menjelang pernyataan kemerdekaan pada tahun 1945, semangat revolusi telah tampak di atas permukaan kehidupan masyarakat kota Makassar, tepatnya pada bulan April 1944.¹⁸ Perangsaan utama munculnya semangat di masyarakat adalah dampak langsung dari kunjungan Bung Karno yang didampingi oleh Achmad Soebrojo dan Sumanang. Ketiga tokoh pemimpin pergerakan nasional ini melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia Bagian Timur dengan tujuan utama kota Makassar dalam rangka propaganda politiknya untuk menyadarkan rakyat di kawasan ini akan pentingnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Dalam pertemuan itu, Soekarno mengutarakan tujuan perjuangan bangsa Indonesia, penderitaan rakyat sebagai akibat dari penjajahan Belanda, dan per-

¹⁸ Ibid., hal. 222.

juangan akhir untuk mencapai kemerdekaan. Soekarno dengan gaya kepemimpinannya yang kharismatik dan sebagai tokoh pergerakan nasional yang non-kooperatif terhadap Belanda, berhasil memukau peserta dan sekaligus membakar semangat rakyat. Pertemuan ini dihadiri oleh semua lapisan sosial antara lain, kelompok aristokrat seperti Andi Mappanyukki, kelompok pemuda, seperti Manai Sophian, kelompok intelektual seperti G.R. Pantouw, dan sebagainya.¹⁹

Kelompok nasionalis Sulawesi ini kemudian mengadakan rapat umum untuk memoulatkan tekad. Dalam rapat itu, seorang pemuda mengucapkan sumpahan yang diikuti dengan khidmat oleh seluruh peserta rapat disertai tekad perjuangan di dalam hati masing-masing. Sumpah keramat yang bersejarah itu diucapkan oleh Abdul Majid yang berunyi:

"Demi Allah, Sang Saka Merah Putih hanya dapat diturunkan apabila mayat-mayat pemuda Indonesia telah di lalui."²⁰

Selepas pertemuan itu, kelompok pemuda atau para tokoh nasionalis di kota Makassar melakukan lagi pertemuan konsolidasi di bioskop serene. Pertemuan itu membicarakan langkah langkah perjuangan selanjutnya untuk mencapai Indonesia merdeka, di samping itu tentunya, untuk lebih memantapkan kebulatan tekad merencanakan kemerdekaan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Harun Kadir, et. al. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950). (Ujung Pangoang, 1984), hal. 87.

Dengan demikian, proses pematangan spirit revolusi di kota Makassar telah dimulai sejak tahun 1944. Meskipun di tahun itu pemerintahan militer Jepang masih berkuasa dengan pasukan Kempetainya yang terkenal kejam selalu mengawasi tingkah laku para pemuda atau pejuang kita, tetapi dengan spirit perjuangan yang luar biasa beraniannya, mereka telah menyatakan kebulatan tekad secara terang-terangan atau terbuka di depan mata penguasa Jepang. Yang paling menarik dari manifestasi mereka itu adalah keberanian mengibarkan bendera merah putih dan pernyataan sumpah bahwa "bendera merah putih hanya dapat diturunkan apabila telah melangkahi mayat-mayat pemuda Indonesia." Dengan demikian konsekuensi yang membanayakan diri mereka dari tindakan Kempetai Jepang, sudah tidak terlintas dalam benak mereka. Yang ada hanyalah tekad untuk berjuang terus mencapai kemerdekaan nasional. Tekad pemuda di kota Makassar ini terus berkembang sampai meledak dengan hebatnya pada saat mereka telah mengetahui dengan pasti bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

U Demikianlah ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan kemudian disusul dengan kedatangan pasukan sekutu dan NICA di wilayah Indonesia Timur, khususnya di kota Makassar sebagai ibu kota daerah Sulawesi Selatan, kembali kota Makassar pada waktu itu mendapat perubahan dalam pemerintahan dari tangan Jepang ketangan NICA. Di samping kesibukan pemerintah NICA mengatur pemerintahannya, oleh bangsa Indonesia pula sudah siap mengatur

siasat untuk merebut kembali pemerintahan kota dari tangan NICA. Dengan melalui beberapa rintangan dan sebagainya, bangsa Indonesia terutama kaum mudanya memulai gerakkannya di dalam kota dengan caranya masing-masing, misalnya menurunkan bendera Belanda dan digantikan dengan bendera sang saka merah putih. Meletakkan lambang-lambang merah putih di cadanya dan sebagainya. Demikianlah dengan suatu peristiwa pemuda-pemuda mengepung dan menyerbu kota serta menoduki beberapa instansi yang penting diantaranya pemancar radio, asrama polisi, Tangsi Kis, hotel Empress dan kantor CONICA (Commanding Officer Netherland Indies Civil Administration).²¹ Bendera merah putih dikibarkan dimana-mana. Tetapi keadaan ini tidak lama berselang hanya setengah hari saja dan oleh tentara NICA telah direbutnya kembali serta diadakan penangkapan-penangkapan kepada pemuda-pemuda. Kota Makassar di waktu suah mulai genting, semangat juang berapi-api dari pemuda tak tertahankan lagi kekacauan timbul dimana-mana, rumah-rumah kaki tangan NICA digrenat, palucutan kepada polisi yang beruniform terjadi setiap hari. Politik Belanda yang menginginkan status masa depan Indonesia berbentuk federal sudah mulai dijalankan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino dan dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar. Dan Kota Makassarlah sebagai pusat ibu kota pemerintahan Negara Indonesia Timur dimana berkedudukan presidennya Soekawti. Diperlengkapinya

²¹ Warta Sulawesi Selatan. Korban 40.000 Jiwa Hari Berkabung Nasional ?. (Ujung pandang, 1990), hal, 46.

pemerintahan dengan susunan kabinet yang terdiri dari putra-putera yang berasal dari Indonesia Timur dengan Perdana Menteriya Naujamuddin Dj. Malewa. Berikutnya disusun suatu parlemen sebagai badan perwakilan rakyat di Indonesia bagian Timur.

Pemerintahan NIT ini menjadi cercaan dan tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dengan adanya pemerintahan NIT ini maka kota Makassar penuh dengan kantor-kantor baru yaitu dengan adanya berbagai kementerian. Kendaraan-kendaraan roda empat dengan model terakhir yang diperuntukkan bagi menteri-menteri NIT memenuhi kota Makassar. Parlemen NIT hampir setiap hari bersioang merundingkan jalannya pemerintahan agar menjadi stabil. Akan tetapi kesemuanya ini sia-sia belaka karena rakyat tidak mengenal adanya pemerintahan NIT beserta alat-alatnya. Dan sebagai puncak dari gerakan rakyat dengan jalan legal diadakannya demonstrasi secara besar-besaran yang diikuti oleh puluhan ribu rakyat menuntut dibubarkannya NIT. Dengan adanya tuntutan rakyat diusahakan pula untuk mengadakan tegang demonstrasi untuk untuk menandingi sekaligus mempertahankan NIT. Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan perhubung tidak mendapat dukungan.

Demikianlah sejak tahun 1946 hingga tahun 1950 Makassar diubah menjadi suatu pusat kekuasaan politik yang mirip sistem kerajaan dibawah naungan Belanda. Makassar sebagai ibu kota NIT dipilih karena diketahui Sulawesi Selatan merupakan daerah yang paling besar jumlah penduduknya

oila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping harus disadari bahwa Kota Makassar adalah pusat kehidupan ekonomis di wilayah bagian timur Indonesia, dan merupakan suatu bandar besar yang merupakan pusat lalu lintas samudera di bagian timur kepulauan Indonesia.

Menurut Anak Agung, salah satu program terpenting NIT ialah menjadi kota Makassar sebagai pusat perekonomian di Indonesia bagian Timur. Untuk itu, dilakukan suatu rehabilitasi atas pelabuhan Makassar sehingga bisa menjadi pusat perdagangan kopra dan rotan terbesar di tanah air. ²²

Selain itu, perhatian terhadap Kupang, Ambon, dan Minahasa yang hancur dibom tentara sekutu dalam perang, diberikan dalam bentuk rencana pembangunan kembali kota-kota tersebut. Namun waktu yang sangat singkat menjadi semua program pembangunan NIT tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

²² Wawancara bersama Bapak Mr. Ioe Anak Agung Gde Agung di Malino tanggal 17 Juli 1992 dalam rangka Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur.

BAB IV
REAKSI RAKYAT TERHADAP
NEGARA INDONESIA TIMUR

4.1 Sulawesi Selatan Dalam NIT

Negara Indonesia yang beribu-kotakan Makassar (Ujung Pangoang sekarang) dibentuk melalui Konperensi Malino dan Konperensi Denpasar.

Dalam Konperensi Denpasar telah diputuskan bentuk negara NIT dan memilih Presiden pertamanya Cokorde Gde Rake Sokawati dengan hasil suara setuju 36 dari 68 yang memilih. Pada saat yang sama terpilih pula Mr. Tajuddin Noor, seorang advocaat asal Sulsel, sebagai ketua Badan Perwakilan Sementara. Dalam sidang-sidang yang diadakan, Tajuddin Noor menampakkan sikap pro-republik. Lagu Kebangsaan ditetapkan Indonesia Raya, bahasa nasional ialah bahasa Indonesia. Tetapi Konperensi tidak sepakat soal bendera. Muhammad Lutfi menyarankan agar ditetapkan Bendera Merah Putih, sedangkan Andi Massarapi, Aru Matcege (Bone) meminta agar diberikan garis kuning sejajar tiang pada bendera merah putih, katanya warna kuning adalah lambang kekuasaan *zajbestuur*.¹

Wilayah administratif Sulawesi Selatan sesuai hasil keputusan Denpasar ialah seperti yang tercantum dalam Bab III (Peraturan Tata Negara Sementara), fasal 14, ayat 1 (le) bahwa daerah Sulawesi Selatan terdiri dari ressort di dalamnya adalah kerajaan-kerajaan Gowa, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu

¹ Kementerian Penerangan R.I., Propinsi Sulawesi (Makassar, 1953), hal. 101.

Malusetasi, Suppa, Sawitto, Batulappa, Kassa, Sidenreng, Rappang, Maiwa, Engrekang, Malua, Buntu Batu, Alla, Barru, Soppeng Riaja, Tanete, Majene, Pambuang, Cenrana, Balagnipa, Tapalang, Mamuju, dan Tana Toraja. Waktu itu Buton dan Laiwui dimasukkan dalam ressort Keresidenan Sulawesi Selatan.²

Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada awal Perang Kemerdekaan sekitar 3 Juta jiwa (Pada tahun 1953 terdapat 3 1/3 juta jiwa). Dari buku terbitan Kementerian Penerangan Republik Indonesia (tahun 1953) mengemukakan angka jumlah penduduk per-afdeling, sebagai berikut:

No.	Kota Besar/ Afdeling	Jumlah Penduduk
1.	Kota Besar Makassar	285.000 jiwa
2.	Afdeling Makassar	790.995 jiwa
3.	Afdeling Bonthain	545.697 jiwa
4.	Afoeling Bone	910.669 jiwa
5.	Afdeling Pare-pare	492.555 jiwa
6.	Afoeling Luwu	535.464 jiwa
7.	Afdeling Mandar	319.739 jiwa
	J u m l a h	3.880.119 jiwa

Jumlah angka penduduk diatas termasuk Onderafdeling Kolaka yang ketika itu masuk dalam afoeling Luwu.³

Makassar ditetapkan sebagai ibukota NIT. Kota Makassar di Indonesia bahagian Timur, terletak di pinggir pantai

² Ibid.

³ Ibid., hal. 25.

lebih tepat kalau disebut kota pelabuhan, pada garis lintang Selatan $5^{\circ}10'$ dan Bujur Timur $119^{\circ}30'$ (BT). Penduduknya pada tahun 1952 adalah 265.000 jiwa.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (dalam keputusan Konferensi Denpasar disebut Badan Perwakilan Sementara) ialah yang telah menjadi utusan-utusan daerah pada konferensi Denpasar. Dari Sulawesi Selatan ialah, Andi Ronoa, anggota Zelfoestuur Soppeng (Ru Bila); Madussila Dg Paraga, anggota tertinggi Zelfbestuur Bone (Aru Timojong); Abdoullah Dg. Mappuji, Hakim di Makassar; Bausat, Bestuur-Assisten di Bone; Muhammed Akib, ketua Majelis Islam di Makassar; Nadjamuudin Dg. Malewa, anggota advisraad ARC.; Mr. S. Binol, hakim di Makassar; G.R. Pantouw, Direktur Transport onderoeming Indonesia; Sonda Dg. Mattayang, Penasehat Indonesia Zaken, diperbantukan pada Residen Sulawesi Selatan; Mr. Tajuudin Noor, advokaat di Makassar; R. Claproth, Presiden Weeskamer di Makassar, Ketua Sie. Rechtsherstel; dan Mr. Ten Cing Leng, advocaat, Wethouder Kota Praja Makassar.⁴

Dari anggota DPR Sementara yang diangkat/ditunjuk terdapat 6 orang mewakili Sulawesi Selatan masing-masing; Ph. van Emstede, H.A. van Gooi, Sech Hasan bin Alamudi. Adrial Duma Andilolo, H. Muchtar Lutfi dan Mr. Tjia Kok Tjiang.

Parlemen NIT menjadi ajang pertarungan kelompok republik yang unitaris melawan kelompok pro Belanda yang provincialist. Kabinet Nadjamuudin Dg. Malewa yang condong

⁴ Ibid.

benar kepada van Mook mendapat tantangan, baik di dalam Parlemen, maupun rakyat banyak, terutama kaum pajuang. Kebijakan Westerling telah berakhir pula (Maret 1947), dengan membuahkan kenangan pahit yang menelang korban ribuan jiwa.

Dukungan Kabinet Nadjamuddin terhadap aksi Militer Belanda pertama terhadap Pemerintah Republik Indonesia di Yogya tanggal 21 Juli 1947 menambah kejengkelan rakyat Sulawesi Selatan. Aksi Militer Belanda itu dinilai rakyat bahwa Belanda ingin menjajah kembali. Walaupun Nadjamuddin Dg. Malewa memberi sokongan penuh terhadap Belanda, pada akhirnya juga ia diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 20 September 1947, setelah ketahuan dengan bahwa ia telah lama menjalankan korupsi.

Demikianlah dalam penyelenggaraan pemerintahan pihak Belanda telah memberikan wewenang kepada fungsionaris NIT, misalnya kiriman kawat sandi dari Dr. Idenbrug kepada Komisaris Mahkota Belanda di Makassar, bahwa soal "korupsi"nya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Nadjamuddin Daeng Malewa bukanlah urusan pihak Belanda melainkan harus dibicarakan antara pemerintah NIT bersama Nadjamuddin Dg. Malewa sendiri.⁵ Belanda memberikan kebebasan kepada pemerintah NIT untuk menangani masalah "korupsi" yang dilakukan Nadjamuddin Dg. Malewa adalah suatu proses kaderisasi terhadap pemerintah NIT itu sendiri.

⁵ Ioe Anak Agung Goe Agung, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. (Jogyakarta, 1985), hal. 318.

Persoalan "korupsi" yang dilakukan Nadjamuddin terungkap sewaktu beliau bersama Presiden NIT Soekawati berada di Den Haag dalam rangka mengikuti sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena kedua orang penting ini berada di luar negeri, maka yang mencabat sebagai Presiden sementara ialah Moehammad Kharoeodin dan untuk jabatan Menteri diduduki oleh Dr. S.J. Warrouw. Bertalian dengan persoalan "korupsi" Nadjamuddin Daeng Malewa dan mungkin juga ada hubungannya dengan kiriman kawat sandi Dr. Idenbrug tadi sehingga waktu Nadjamuddin diajili di Makassar hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara.⁶

tindakan yang diambil oleh pemerintah sementara NIT tidak mendapat protes dari pihak manapun, bahkan Presiden Soekawati setibanya di Makassar tidak dapat berbuat banyak, kecuali menerima putusan tersebut, dan bahkan Warrouw diangkatnya menjadi Perdana Menteri secara resmi pada tanggal 11 Oktober 1947 dengan susunan sebagai berikut:

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan: Dr. S.J. Warrouw.
2. Menteri Urusan Dalam Negeri merangkap Wakil Perdana Menteri: Ica Anak Agung Gde Agung.
3. Menteri Kehakiman: Dr. Mr. Ch. R.S. Soumokil.
4. Menteri Keuangan: M. Hamelink.
5. Menteri Muda Keuangan: R.E.J. Matekohy.
6. Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. A.M. Semawi.
7. Menteri Pendidikan: E. Katoppo.
8. Menteri Penerangan: Sonda Daeng Mattayang.
9. Menteri Muda Penerangan: R. Claproth.
10. Menteri Perekonomian: J. Iahiya
11. Menteri Muda Perekonomian: Hoesain Puang Limboro.
12. Menteri Sosial: Abdoellah Daeng Mappedji.
13. Menteri Muda Sosial: Drs. Tan Tek Heng.

⁶ Ibid., hal. 327-328.

⁷ Ibid.

Adat Demokrasi dalam Parlemen NIT dapat dilihat pada periode Kabinet Warrouw. Perdana Menteri Warrouw menyetujui kebijaksanaan politik Naojamuddin Daeng Malewa yang membenarkan agresi Belanda di Yogya tahun 1947. Lebih jauh lagi Warrouw dikenal sebagai pendukung kelompok yang men-cita-citakan agar Indonesia tetap terikat dalam satu ika-tan ketatanegaraan dengan kerajaan Belanda. Kebijakan politik Warrouw suah barang tentu bertentangan dengan tu-juang didirikannya NIT, oleh karena itu mendapat protes da-ri golongan nasionalis yang ada dalam Parlemen. Pada Tang-gal 9 Desember 1947 Badan Perwakilan Rakyat Sementara NIT mengadakan rapat untuk membicarakan kebijaksanaan politik Warrouw, ternyata 14 suara setuju dan 57 yang menolak. Se-suai dengan adat demokrasi Parlementer, maka Warrouw dimini-ta mengundurkan diri dari jabatannya.⁸ ✓

Warrouw membenarkan agresi Belanda di Yogya tahun 19-47, karena dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk beker-jasama dengan Belanda dalam membangun dan mengarahkan po-tensi yang dimiliki oleh NIT. Sedangkan anggota Badan Per-wakilan Rakyat Sementara menolak kebijaksanaan Warrouw ka-rena mereka berpendapat bahwa dengan adanya agresi Militer maka penyelesaian masalah Indonesia dengan Belanda semakin sulit.⁹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa meskipun fungsionaris NIT kebanyakan penganut paham federal, tetapi bukan berarti mereka ingin mengadakan hubungan ketatanega-

⁸ Ibid., hal. 345.

⁹ Ibid.

raan dengan Belanda. Melainkan paham federal itu muncul sebagai suatu usaha untuk menirikan satu negara bagian yang otonomi secara lokal.

Setelah jatuhnya Kabinet warrouw yang hanya memimpin selama 3 bulan, maka Presiden NIT Soekawati segera mengadakan pertemuan dengan para pemimpin fraksi dalam Parlemen. Atas persetujuan semua pemimpin fraksi maka Presiden NIT menunjuk Ide Anak Agung Gde Agung sebagai pembentuk kabinet baru. Penunjukan tokoh dari Bali itu menyebabkan partai-partai politik yang hidup di NIT merasa optimis karena tokoh tersebut terkenal progresif, tenang dan dapat diterima oleh semua golongan dan aliran di Parlemen.¹⁰ Maka sesudah pembentuk kabinet tersebut mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin fraksi di parlemen, pada tanggal 15 Desember 1947 berhasil dibentuk kabinet baru dengan susunan sebagai berikut:

1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Urusan Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung.
2. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch. Soumokil
3. Menteri Perekonomian : Hoesain Puang Limboro
4. Menteri Keuangan : M. Hamelik
5. Menteri Kesehatan : Dr. S.J. Warrouw
6. Menteri Pendidikan : E. Katoppo
7. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
8. Menteri Sosial : Mr. S.S. Palenkahe
9. Menteri Penerangan : Boerhanoeddin

¹⁰ Moeliono. Drs. J.E. Tatenkeng: Karya dan Pengabdian nya. (Jakarta: 1986), hal. 12

10. Menteri Muda Urusan Dalam Negeri : Mr. S. Binol
11. Menteri Muda Kehakiman : R. Claproth
12. Menteri Muda Perekonomian : Drs. Tan Tek Henk
13. Menteri Muda Keuangan : R.E.J. Matekoby
14. Menteri Muda Pendidikan : J.E. Tatengkeng
15. Menteri Muda Sosial : Mon. Sjfei¹¹
16. Menteri Muda Penerangan : I.H. Doko.

Kabinet Anak Agung yang terbentuk mendapat dukungan semua kelompok, karena merupakan suatu penggabungan antara kelompok oposisi dengan kelompok pemerintah (Belanda). hadap pemberontakan PKI Muso, Kabinet Anak Agung mengeluarkan kutukan, dan membenarkan tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Kabinet itu juga menyesalkan agresi Belanda ke-II tertanggal 19 Desember 1948, serta menyatakan penyakuan atas Bung Karno dan Bung Hatta yang masih dalam pengasingan, sebagai anggota-anggota Pemerintah Indonesia yang sesungguhnya mendekat kepada Pemerintah Indonesia Pusat di Yogyakarta.

✓Kreatifitas lokal tentang otonomi pemerintahan daerah dapat dilihat setelah pemerintah Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung, sebab salah satu program kerja kabinet adalah pembaharuan sistem pemerintahan daerah yang dapat sesuai dengan daerah swapraja yang ada di kawasan NIT. Pada tahun 1948 sistem pemerintahan di daerah-daerah agak kacau setelah tiga tahun penjajahan Jepang, Perang Dunia ke-II dan kedatangan sekutu dan NICA. Hal yang penting menurut Kabinet Anak Agung ialah diciptakan suatu sistem ketatanegaraan

¹¹ Ide Anak Agung Gde Agung, Op. Cit. hal. 352.

yang bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Kabinet Anak Agung tidak tertarik untuk membangun kembali model pemerintahan penjajahan Belanda, melainkan mencari struktur baru yang dapat sesuai dengan setiap daerah lokal dan adat istiadat masing-masing.

Perkembangan zaman menuntut Anak Agung untuk mengadakan pembaruan sistem pemerintahan daerah yang dianggap bisa menjamin otonomi dan kekuasaan pemerintah Swapraja. Pemerintah NIT bertekad mengadakan modernisasi dan demokratisasi dalam tubuh pemerintahan swapraja agar kepadanya dapat diberi kekuasaan dan wewenang yang lebih besar. Untuk mencapai hak tersebut maka Anak Agung memprakarsai penyelenggaraan rapat besar di antara wakil-wakil pemerintah swapraja yang ada dalam wilayah NIT. Maksud daripada musyawarah besar ini adalah untuk mencari suatu rumusan mengenai kedudukan para kepala pemerintahan swapraja dan menyesuaikan kekuasaan mereka dengan perkembangan zaman.

Musyawarah Besar ini diselenggarakan di Malino¹² pada tanggal 12 hingga 13 Mei 1948 yang menghasilkan rumusan, antara lain: Perjanjian mengenai hubungan antara kerajaan-kerajaan dengan NIT adalah merupakan pengganti perjanjian

¹²Malino, suatu kota kecil terletak di sebelah Timur Ujung Pandang (70 km.) dengan ketinggian K.l. 1000 meter di atas permukaan laut. Dahulu, namanya Lappara yang artinya tanah datar. Kota kecil itu dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927 khusus untuk tempat peristirahatan (Malino berarti Sunyi; cari kata dasar 'lino' artinya dunia; jadi Malino seperti dunia semata, tanpa ada isi (manusia). Hingga sekarang, rapat-rapat istimewa yang memerlukan ketenangan dan "asah otak" biasanya di adakan di Malino.

zaman penjajahan. Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing Raja lebih memuaskan daripada perjanjian bersama-sama pemerintah kerajaan yang terikat dalam satu hubungan.¹³

Perdana Menteri Anak Agung memimpin kabinetnya selama dua tahun, ia senantiasa bertekad untuk memberi kepada NIT kepribadian dan identitas sendiri, dimana ditonjolkan bahwa kabinetnya adalah kabinet nasional bercorak kebangsaan yang mengabdikan kepada cita-cita dan kepentingan kebangsaan.

Anak Agung menjalankan kebijaksanaan yang bersifat dwifungsi yang satu dengan yang lainnya mempunyai keseimbangan yang harmonis. Kedalam: Kabinet Anak Agung bertekad untuk menyusun tertib hukum baru dengan pembentukan susunan ketatanegaraan di NIT sedemikian rupa sehingga dari tingkat dewan sampai susunan teratas dapat diwujudkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Ke luar: Kabinet Anak Agung menitik beratkan kebijaksanaan dengan menjalankan politik sinthesa (perpauuan) mengusahakan kerjasama dengan semua pemerintah negara-negara bagian dan daerah-daerah di seluruh Indonesia terutama dengan Pemerintah RI. untuk bersama-sama mengabdikan kepada cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencari penyelesaian dalam masalah Indonesia dengan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini Kabinet Anak Agung bertekad memainkan peranan yang aktif dan dinamis.

¹³Ibid., hal462-463.

4.2 Reaksi Tokoh-Tokoh Sulawesi Selatan Terhadap NIT

Negara Indonesia Timur telah terbentuk, telah menjelma menjadi kenyataan, karena lembaga-lembaga pemerintahannya telah tersusun lengkap seperti Badan Perwakilan Sementara, Ketua, Presiden dan Menteri-menterinya.

Akan tetapi dengan terbentuknya NIT tiadalah menyebabkan lenyapnya semangat kebangsaan di dalam dada rakyat Indonesia umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya yang berada di bawah tekanan pemerintahan NIT. Bahkan adalah sebaliknya partai-partai dan organisasi rakyat malahan bertambah giat menentang rencana dan siasat pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali rakyat Indonesia yang telah merdeka.

Begitupula halnya tokoh-tokoh politik Sulawesi Selatan yg berhaluan republikan/nasionalis bergiat memperjuangkan tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Parlemen NIT. Tokoh-Tokoh Sulawesi Selatan yang dimaksud diantaranya, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Anoi Mappanyukki, Anoi Pangerang Petta Rani, Anoi Burnanuddin, Arnold Mononutu, Henk Rononuwu, dan lain-lain.

Dr. Ratulangi misalnya, dia saja berniat untuk balik daluan menoukung van Mook, tiak mustahil dia akan menjadi Presiden NIT atau sekurang-kurangnya sebagai Perdana Menteri seperti Nadjamuddin Dj. Malewa. Karena dia tetap berpegang pada prinsip perjuangannya, dia rela mengorbankan jabatannya bahkan kebebasannya. Ratulangi akhirnya ditang-

kap pada tanggal 5 April 1946 karena konsekuen pada pen-
diriannya dan kemudian diasingkan ke Irian Jaya.

Anoi Mappanyukki dan Anoi Pangerang Petta Rani juga termasuk kategori pejuang nasionalis, patriotik yang kokoh pada pendiriannya, konsekuen sebagai seorang raja dan putra raja dalam menyatakan dukungannya terhadap republik. Dukungan yang diberikan oleh kedua tokoh nasionalis ini tidak hanya dalam ucapan yang berapi-api, tetapi juga dengan perbuatan yang nyata. Masyarakat Sulawesi Selatan mengetahui benar bagaimana kedua anak beranak ini membina masyarakat, menggelorakan semangat rakyat, mengobarkan api perjuangan kaum muda Sulawesi untuk melawan Belanda, bagaimana keduanya mengorbankan hartanya untuk kepentingan perjuangan demi kemerdekaan bangsanya. Fakta yang menarik dari keikhlasan membela republik adalah kerelaan hati Anoi Mappanyukki untuk dipecat dari kedudukannya sebagai raja, dan atas diri Anoi Pangerang Petta Rani dipecat dari kedudukannya sebagai kepala Afoelng Bone. Ini merupakan suatu pengorbanan yang tidak kecil artinya bagi kedua tokoh nasionalis ini dalam membela republik yang dicintainya.

Sebagai bukti atas ketidaksetujuan terhadap munculnya kemudi NICA dan sekutu, kedua tokoh tersebut dengan pengaruh yang dimilikinya menyelenggarakan pertemuan di kalangan aristokrat di rumahnya. Pertemuan itu dihadiri oleh kelompok aristokrat yang berpengaruh di daerahnya dan termasuk kategori bangsawan tinggi. Kelompok bangsawan

yang hadir, antara lain:

1. Abdullāh dan Patepe
2. Andi Pangerang Petta Rani
3. Andi Jemma (Jatu Luwu)
4. Andi Makkasau (Jatu Suppa)
5. Ibu Jeppu (Maradi Balanipa)
6. Maradia Campalagian
7. Arung Gilireng
8. Karaeng Polongangkeng
9. Andi Sultan Dg. Raja (Karaeng Gantarang).¹⁴

Pertemuan kelompok aristokrat itu mengeluarkan keputusan yang intinya menyatakan bahwa kelompok raja atau bangsawan di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno/Hatta. Keputusan ini kemudian diserahkan kepada Brigjen Iwan Dougerti yang menjabat Komandan Tentara Australia sebagai wakil sekutu di Makassar. Penyerahan pernyataan setia kepada republik disaksikan pula oleh Mayor Wagner, Komandan Pasukan NICA. Dapat dibayangkan betapa galaunya perasaan Wagner menyaksikan pernyataan kesetiaan kepada republik yang disampaikan oleh Andi Mappanyukki.

Bagaimana pun juga liciknya Belanda menjalankan siasatnya, rakyat Indonesia yang berada di daerah Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan tidak semuanya dapat di pengaruhinya. Boleh dikatakan sempilan puluh persen dari rakyat Indonesia Timur masih pro-republik. Sedangkan di dalam parlemen sendiri ada tiga aliran, yakni aliran Soekawati (B.B.), aliran Naujamuddin (provincialis) dan

¹⁴ Hamid Abdullāh. Andi Pangerang Petta Rani Profil Pimpinan Yang Manunggul Dengan Rakyat. (Jakarta, 1991), hal. 69-70.

aliran Tadjuddin Noor (republik). aliran-aliran mana terdagi pula atas dua golongan, yaitu golongan oposisi yang dinamai golongan progresif dan golongan pemerintahan.¹⁵

Pada persidangan pertama Parlemen NIT terbentuk dua fraksi untuk memperjuangkan nasib penduduk, yaitu Fraksi Nasional dan Fraksi Progresif, yang satunya dipimpin oleh Anoi Massarapi utusan raja-raja, asal Bone dan lainnya Arnoldo Mononutu.

Clash pertama terjadi ketika fraksi Progresif mulai sebuah 'move' (mosi tidak percaya). Karena kalah suara dan tidak mendapatkan votum maka fraksi Progresif menyatakan meninggalkan parlemen dan 'Walk Out.'¹⁶ Sejak waktu itu maka fraksi Nasional praktis melakukan juga mengontrol eksekutif sendiri-sendiri, dengan segala akibatnya.

Kabinet pertama NIT dibubarkan dan dipilih menteri-menteri baru dengan berpindah jabatan bagi menteri lama. G.R. Pantouw karena kebijaksanaannya terhadap RI. Jogja telah menimbulkan perselisihan paham dengan Presiden NIT, mendapat portofolio Kementerian Sosial dan Julius Tahiya memegang Kementerian Penerangan.

Naojamuddin Dg, Malewa menunjukkan kelihaiannya dalam mempergunakan situasi masing-masingnya gerakan Polongbangkeng. Terutama dalam kebijakan perekonomian beliau selalu mendapat konsesi dari Direktur Perdagangan van Hoogstraten

¹⁵ Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Op. Cit. hal. 132.

¹⁶ G.R. Pantouw. Perjuangan Rakyat Di Sulawesi Selatan Menentang NIT (Ujung Pandang, 1982), hal. 05.

untuk mengisi kekosongan barang-barang keperluan rakyat Sulawesi Selatan akibat peperangan dan tindakan-tindakan pemerintahan pendudukan Jepang untuk memulihkan kelangkaan barang-barang konsumsi, seperti tekstil, gula pasir, minyak tanah, bensin, transportasi.

Terhadap aparat kolonial di bawah pimpinan Lion Cachet, Naojamuddin secara demonstratif menyuruh mereka menunggu-nunggu di luar pagar rakyat melinat, bahkan bukan lagi mereka, eksponen Hindia Belanda yang memegang tampuk pemerintahan.

Hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat di Den Haag negeri Belanda, dapat dikatakan perjuangan menentang NIT telah mereda. Tokoh-tokoh republikan seperti Henk Ronduwu memasuki kabinet NIT sebagai Menteri Penerangan, karena bersama Arnold Mononutu telah meyakini bahwa NIT hanyalah merupakan batu loncatan untuk memperjuangkan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode Ica Anak Agung sebagai Perdana Menteri NIT menunjukkan kebijaksanaan yang menuju kearah ketuhanan satu wilayah. Kabinet Anak Agung mencakup wakil-wakil fraksi progresif maupun fraksi nasional, yang memerintah sampai 19 Desember 1948, ketika mengundurkan diri sebagai protes atas serangan Belanda terhadap Yogyakarta.

Dengan demikian, Parlemen NIT agak bertentangan dengan maksud para penciptanya dari Belanda, menyediakan suatu forum untuk ungkapan perasaan pro-republik di Indonesia Timur. Pada bulan Desember 1947 suatu gabungan dari

delapan belas partai pro-republik dibentuk di Makassar de-
 ngan nama GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia).
 Sepuluh anggota Parlemen NIT menjadi anggota partai-partai
 politik Indonesia, yang semuanya berafiliasi dengan GAPKI.
 Sebagai ketua pimpinan pusat GAPKI terpilih Arnold Mononub
 dari Partai Kebangsaan (PKR), yang menjadi anggota PNI
 sebelum dibubarkan pada bulan September 1946 dan yang me-
 mimpin Misi Persaudaraan ke Republik pada bulan Pebruari 19-
 48, segera setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville.
 Mungkin yang paling penting dari unsur keanggotaan di Sula-
 wesi Selatan adalah Partai Keaulatan Rakyat (PKR), yang
 dibentuk tanggal 24 Nopember 1946, sebagai pengganti PNI
 yang telah dilarang dan PKR. Ketua Umum PKR adalah Andi
 Burhanuddin yang dipecat oleh Belanda sebagai Karaneg Pan-
 kajene pada tahun 1945 dan yang menjadi anggota fraksi na-
 sional dalam parlemen. Anggota-anggota lainnya termasuk
 Henk Ronconuwu, seorang wartawan surat kabar di Makassar
 yang menjadi sekretaris; Ny. Salawaty Jauw serta Ny. Towo-
 liu, pendukung Republik terkemuka, yang termasuk wanita
 Sulawesi yang mengajukan petisi kepada pemerintah Belanda
 menentang kampanye pasifikasi bulan Desember 1946. Sebelum
 pembentukan Kabinet Anak Agung dalam bulan Desember 1947,
 PKR maupun partai-partai anggota GAPKI lainnya bersikap
 non kooperatif. Mereka menolak partisipasi dalam Kabinet
 NIT. Andi Burhanuddin bertindak sebagai Menteri Penerangan
 dalam Kabinet Anak Agung pertama, dan dalam bulan Mei 1949
 dipilih sebagai ketua Dewan Sulawesi Selatan. ¹⁶

~~George HCT~~ ^{Propinsi Sulawesi} ~~Wahana~~ ^{Naturalis}, hal. 365-367.
~~lihat: Propinsi Sulawesi.~~ ⁹⁰ 137-138

Sulawesi Selatan mendapat kursi terbanyak dalam Parlemen NIT, dan karena seleksi wakil-wakil daerah ditangan Dewan Daerah yang didominasi oleh pejabat Belanda dan anggota aristokrasi yang diangkat oleh Belanda, maka Belanda dan raja-raja daerah dalam kecenderungannya baik untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Metode seleksi tidak langsung di Sulawesi Selatan dalam pemilihan tahun 1949 menjamin kesinambungan penguasaan aristokrasi. Selanjutnya, sebagai imbalan atas persetujuan mereka untuk merundingkan kembali kontrak-kontrak mereka dengan menggantikan pemerintah Belanda dengan NIT, para penguasa aristokrasi menuntut dibentuknya suatu senat dengan hak veto atas konstitusi yang diusulkan. Senat itu akan terdiri dari satu wakil dari tiap-tiap tiga belas daerah NIT, yang sepuluh diantara pemerintahannya dikuasai oleh unsur aristokrat. ¹⁷

Sungguhpun peranan aristokrasi agak terlalu kuat dalam pemerintahan NIT, tetapi parlemennya merupakan forum bagi ungkapan perasaan pro-republik. Dan meski beberapa di antara mereka yang ikut serta dalam pemerintahan NIT berpendapat bahwa dengan berkuat cemikian mereka dapat berjuang untuk penyatuan dengan republik, kekuasaan sesungguhnya tetap berada ditangan Belanda sampai penyerahan kekuasaan pada bulan Desember 1949. Kekuasaan itu mungkin lebih mencolok dalam tahap-tahap awal, ketika misalnya, nama-nama yang akan ditunjuk dalam kabinet pertama terlebih

¹⁷ ~~Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Op. Cit.~~
~~hal. 122-123. Kalun, Nasionalisme, hal. 365-367~~
lihat Mopin & Subandi, hal. 122-123.

dahulu dibahas dan disetujui oleh van Mook. Namun sepanjang kurun waktu NIT, pengendalian keuangan dilakukan dengan cara menempatkan seorang Belanda, M. Hamelink, sebagai menteri keuangan dan membiarkan pengendalian sumber penghasilan utama, yakni perdagangan kopra, ditangan pemerintah Betavia.¹⁸

Demikianlah pergolakan-pergolakan dalam tubuh NIT yang menunjukkan perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan identitas bangsa sebagai satu kesatuan tidak pernah puar. Pergolakan dalam tubuh NIT dapat dilihat dari usia NIT yang belum genap setahun, sudah tiga kali terjadi pergantian dan pembentukan kabinet pemerintahan NIT. Menurut Prof. Mr. Teng Tjing Leng jatuhnya beberapa kabinet yang berumur singkat disebabkan oleh kabinet yang terbentuk tidak sesuai dengan jiwa nasionalisme yang pada waktu itu sedang meluap-luap, dan juga beberapa pimpinan kabinet pro-Belanda.¹⁹

~~86~~
Shiller, Federal Indonesia, hal. 251.

¹⁸ Barbara Sillars Harvey. Pemerontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII. (Jakarta, 1989), hal, 132.

¹⁹ Wawancara sepintas lalu bersama Bapak Prof. Mr. Teng Tjing Leng, di Malino, Gowa, pada saat Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, tanggal 17 Juli 1992.

4.3 Reaksi Organisasi Kepemudaan Terhadap NIT ✓

Setelah NIT berdiri sebagai satu negara bagian, maka pemerintah dan fungsionaris lembaga-lembaga negara lainnya mulai menjalankan tugasnya, namun sebagaimana telah dijelaskan semula telah menimbulkan reaksi hebat dari tokoh-tokoh politik Sulawesi Selatan begitu pula dengan kaum pemudanya yang setia kepada Republik.

Perlawanan golongan pro republik di Sulawesi Selatan yang didukung oleh pemuda, mengakibatkan munculnya ide-ide baru dari pihak Belanda untuk menjalin hubungan baru. Hubungan baru itu, seperti yang diusulkan oleh van Mook, tentang pembentukan suatu negara federal Indonesia dalam suatu hubungan baru persemaakmuran dengan kerajaan Belanda.

Usulan ini, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan politik *de vice et impera* yakni memberikan jalan penerangan yang berbeda kepada masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan dan Makassar khususnya.

Perjuangan pemuda khususnya di kota Makassar sejak kehadiran sekutu yang diboncengi oleh NICA, tidak pernah padam. Perjuangan kelompok, organisasi kelasykaran sebagai suatu bukti nyata. Namun demikian, bahwa keterbatasan dari segi dukungan kemampuan khususnya kemampuan persenjataan, ekonomi dan bahkan tingkat pengetahuan politik mengakibatkan rencana-rencana Belanda tetap berjalan.

Konferensi Malino, sebagai langkah awal menuju keinginan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai

25 Juli, pimpinan Lipan Bajung, mengadakan rapat di Komara, Polongbangkeng guna menyusun kembali strategi kelas-karan melawan NICA.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1946, ketika para utusan masing-masing daerah datang berkumpul di Malino atas undangan van Mook, dilanjutkan dengan rapat di Polongbangkeng hingga rapat organisasi kelasyakan guna menentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Malino, melalui perlawanan bersenjata.¹⁹

Pertemuan organisasi-organisasi kelasyakan di Komara tersebut, membahas tentang kekalahan-kekalahan dalam pertempuran di pihak pemuda, dan selanjutnya mencari jalan keluar untuk menebus kekalahan tersebut, adalah pembentukan lapris (Laskar Pemmerontak Rakyat Indonesia Sulawesi).

Pembentukan LAPRIS itu sendiri mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembersihan mata-mata dan kaki tangan NICA.
2. Menghalangi lalu lintas dengan bermacam-macam cara.
3. Membakar rumah-rumah dan bangunan-bangunan musuh.
4. Merampas senjata dimana-mana.²⁰

Bersamaan dengan peningkatan koordinasi kekuatan pemuda yang tergabung dalam organisasi LAPRIS tadi, oleh pihak Belanda mengadakan pasifikasi di Sulawesi Selatan,

¹⁹ Fuh. Hasyim dan Arifin Nu'mang. Organisasi Kelasyakan dan Peranannya Mempertahankan Kemerdekaan RI Selama Revolusi Fisik (Makassar, 1984), hal. 19.

²⁰ Idio.,

yang menurut Harvey, LAPRIS dan LIPAN BAJENG menjadi sasaran utamanya. Pasifikasi Belanda di Sulawesi Selatan dipercayakan kepada seorang komandan Muda Belanda Raymond "Turk" Westerling yang telah memperoleh reputasi untuk efesiensi dan kekejamannya di Sumatera. Suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa terjadinya kekejaman yang dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai korban 40.000 itu, terjadi bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi Denpasar.

Usaha-usaha kaum pemuda dalam memperjuangkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, tidak sampai disitu. salah satu langkah yang ditempuh oleh pemuda Sulawesi Selatan, yakni menggaungkan diri dengan organisasi bagi pemuda yang dibentuk di Jawa pada tanggal 8 Oktober 1945. Organisasi ini adalah KRIS (keaktifan Rakyat Indonesia Sulawesi) yang diketuai oleh A. "Sus" Ratulangi (anak Perempuan Dr. Ratulangi) dan Kahar Muzakkar sebagai sekretarisnya. Kelompok Pemuda Sulawesi Selatan antara lain Manai Sophian, Saleh Lahae, Andi Mattalatta dan lain-lainnya.

Hasil usaha tersebut, yakni terbentuknya TRI-PS (Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi), pada tanggal 24 April 1946, dengan Kahar Muzakkar sebagai Komandannya. Sebagai hasil nyata usaha tersebut, yakni adalah bantuan dari pemerintah pusat, dengan dikirimkannya Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi sebanyak XII Ekspedisi.²¹

²¹penjelasan secara terinci tentang pengiriman TRI-PS ke Sulawesi Selatan, lihat SOB 11 Desember 1946 Sebagai Hari Korban 40.000 Sulawesi Selatan.

Pembentukan organisasi kelasykaran dengan perlawanan bersenjata, pengembangan sayap organisasi dan personil yakni dengan kehadirannya di Jawa dengan pengiriman ekspedisi berupa TRI-PS ke Sulawesi Selatan sampai tahun 1948, belum memperoleh hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Selain itu, pemerintah NICA berhasil menglikwidir pemerintahan resmi Sulawesi Selatan dengan mengasingkan Dr. Ratulangi dan stafnya.²² bahkan menurut penilaian Dr. Harvey, bahwa perlawanan bersenjata yang berarti di Sulawesi Selatan berakhir bertepatan dengan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati.

Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan pemuda khususnya dan rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya masih sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan Belanda (NICA). Namun demikian, usaha perjuangan rakyat termasuk pemuda di Sulawesi Selatan tidak pernah berhenti. Menurut Muhammad Hasyim dan Arifin Nu'mang, bahwa memasuki pertengahan tahun 1947 perlawanan dilakukan dengan cara gerakan "bawah tanah" dalam kelompok-kelompok kecil atau unit-unit pemukul secara terbatas.²³

Dalam bulan Januari 1948 berturut-turut tiba di Sulawesi Selatan rombongan pasukan infiltrasi dari Jawa antara lain Kapten Abdullah Riau, Kapten Muhammadong, Lettu Husain

²² Ibid., hal. 15.

²³ Muhammad Hasyim dan Arifin Nu'mang, Cp. Cit., hal. 17.

Ibrahim, Letnan Arief Rate, Letnan Soetrisno, Letnan Abbas Bangsawan dan Letnan Husain Manan.

Kevakuman perlawanan dalam bentuk konkrit di Sulawesi Selatan, menjadi perhatian utama untuk digairahkan kembali. Untuk itu, dalam usaha meningkatkan kembali gerakan perlawanan, Letnan Arief Rate dengan kerjasama pimpinan-pimpinan perjuangan di Sulawesi Selatan, berhasil membentuk Mobile Brigade Ratulangi (MBR). Salah satu contoh perlawanan tersebut, antara lain terjadinya Masamba Affair.²⁴

Tambahan, bahwa sampai pada tahun 1948, pihak Indonesia di Sulawesi Selatan cukup banyak yang ditahan atau dipenjarakan. Persetujuan Roem Royenn, menghasilkan suatu keputusan tentang pembebasan politik Belanda tanpa syarat.²⁵ Terbukti dengan pembebasan tanpa syarat tahanan dan pawan politik Republik dari Hogepad dan Layang Kamp di bebaskan pada bulan Januari 1950.

Pembebasan kaum Republikan, yang kebanyakan berasal dari pemuda pelajar dan pemerintah, tidak membuang-buang waktu, segera dilanjutkan usaha perjuangan, yakni dengan inisiatif Karaeng Manjerrungi diadakan konperensi untuk membentuk suatu wadah perjuangan. Konperensi ini diadakan di Polongangkeng pada tanggal 5-7 pebruari 1950, dengan sponsor dan anggota konperensi dari Lapris, Lipan Bajeng, dan MBR.

²⁴ Masamba Affair terjadi pada tanggal 28 Oktober 1949 dipimpin oleh Kapten Aboullah Riau dan Lettu. Hasan Lakalu.

²⁵ Riri Amin Daud. Rakyat Sulawesi Selatan Mendobrak NIT dan Negara Bahagian B.F.G. lainnya. (Ujung Pandang, 1982), hal. 08.

Konperensi Polongdangkeng ini, dihadiri kurang lebih 79 organisasi perjuangan Republikan dari seluruh Indonesia Timur, dengan berintikan wakil-wakil 17 Laykar anggota Lapris. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan organisasi (Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia (BPPRI), adalah melakukan perjuangan politik untuk membubarkan NIT. Menurut Karaeng Manojarungi, konperensi itu diselenggarakan untuk mengubah sifat perjuangan di Sulawesi Selatan dari militer ke politik:

Sesuoan merdeka, setelah kami dibebaskan dari penjara, saya sendiri sebagai seorang yang bertanggungjawab merasa bahwa kalau seribu-ribu orang di Sulawesi Selatan yang telah dipenjarakan diperbolehkan pulang begitu saja, maka akan terjadi perang saudara; orang yang dahulu ditangkap akan berpikir "itulah orang yg mengkhianati saya," dan akan membunuhnya. Sebaliknya keluarga orang yang terbunuh akan membalas dendam satu sama lain, kita tidak akan mempunyai musuh lagi, saya sangat khawatir akan timbul istilah "pejuang" dan "pengkhianat." 26

Demikianlah pada upacara pembukaan konperensi, Pemerintah NIT mengiriskan utusannya untuk hadir, konperensi berakbir dengan membentuk satu wadah perjuangan yang mereka namakan Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia (BPPRI). Landasan wacana ini dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan sebagai hasil keputusan rapat, yang isinya sebagai berikut:

- a. Kami bekas pemberontak dan bekas tawanan politik yang dulu dikatakan perampok, pengacau, pembunuh, dan sebagainya, dan kini digelar pahlawan-pahlawan dan prajurit-prajurit.

²⁶ Ibid., hal. 09.

- d. Yakni bahwa tidak ada suatu orang pun dari kami menjadikan nama atau gelar ini sebagai soal utama.
- c. Bahwa yang kami ketanui adalah, bahwa kami cinta ibu pertiwi dan dengan sadar, pada waktu sudah kami lakukan siasat destruktif, keluar menerjang segala perkosaan atas Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai suatu ledakan keinginan dan hasrat bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad hidup dijajah, ingin hidup bernegara sendiri dan dapat menyumbangkan kebangsaannya untuk ikut serta dalam pembinaan prikemusiaan dan prikeadilan diantara bangsa-bangsa di atas dunia.
- d. Bahwa sesungguhnya lahirnya NIT dan RIS itu, karena Belanda semata-mata dan pula didorong oleh cara Bapak-bapak kita yang tidak mengikuti jiwa pemuda, lekas-lekas ber-Malino dan ber-Denpasar, sehingga lahirnya RIS dan NIT sedikitnya tidak mengganggu hasrat dan keinginan seluruh bangsa Indonesia yang pada prinsipnya tetap berpegang pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, baikpun yang ber-Malino dan Ber-Denpasar, ataupun yang berpenjara dan bernutan.
- e. Bahwa masih banyak pula rakyat di NIT yang tidak atau belum mendapat kesempatan memperkembangkan keinginan itu. Bahwa dalam banyak hal kita di NIT banyak ketinggalan.

Berpendapat:

Bahwa untuk mengembalikan RIS sekarang menjadi Republik Indonesia, sesuai dengan hasrat rakyat, maka perlu seluruh tenaga warga negara dikerahkan dalam segala lapangan tetap berpegang teguh kepada Pancasila.

Sadar bahwa:

Untuk lancarnya pembangunan, bahaya-bahaya:

- a. Kehilangan kewaspadaan.
- b. Pencakaran antara kita sama kita.
- c. Perangkap oportunisme, harus dapat diatasi bersama.

Maka dengan ini mementuk organisasi dengan nama:

BIRO PEJUANG PENGIKUT REPUBLIK INDONESIA (BPPRI) yang berjiwa Pancasila, mempunyai tugas bekerja serta efektif dan dengan penuh tanggungjawab kepada seluruh bangsa Indonesia dengan program perjuangan yang tertentu.

Polongbangkeng, 7 Pebruari 1950

Baan Pimpinan Pusat Biro PPRI

Dewan Pimpinan Umum:

ttd.

1. Jusuf Sauty
2. Makkaraeng Dg. Manjarungi
3. Mon. Riri Amin Daud
4. F. Podaag
5. A.R. Tamma
6. R. Sukarto
7. Hamang
8. Aminuddin ²⁷
9. S. Sunari.

Melihat pernyataan-pernyataan yang termuat dalam hasil konferensi di Polongangkang, yang diprakarsai oleh Makkarang Dg, Manjarungi dan didukung oleh organisasi-organisasi kelasykaran di seluruh Indonesia Timur, menunjukkan bahwa mereka menginginkan pengemoalan negara Republik Indonesia pada bentuk sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebenarnya sebelum terbentuknya BPPRI pada pertengahan tahun 1947, telah bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar sebagai ibu kota NIT. Organisasi-organisasi kepemudaan yang dimaksud antara lain: Organisasi Kepanuaan, organisasi kepemudaan dan organisasi-organisasi pelajar.

Lantana Fachri bersama Jusuf mempelopori terbentuknya Kepanuaan Ansor yang kemudian utingkan menjadi pemuda Ansor, dengan basisnya pelajar-pelajar Perguruan Datumuseng. Berturut-turut membentuk Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMI) dengan basisnya siswa-siswa Perguruan Nasional jalan Goa.

²⁷Harun Kadir, et.al., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950. (Ujung Pandang, 1984). hal. 361-363.



Dengan kedua organisasi pemuda ini ditambah pemuda Punammayah dan lain-lain dibentuklah BPP (Badan Pimpinan Pemuda Indonesia) dengan ketuanya Sujatin dan A. Syarifudin. Organisasi-organisasi ini bukan saja bersikap republikan tetapi diantaranya ada yang merupakan mantel organisasi dari suatu gerakan di bawah tanah, seperti pemuda Anshar. Organisasi Anshar ini kemudian ternyata dapat menampung bukan saja pemuda-pemuda republikan, tetapi juga anggota ekspedisi dan ex. gerilya yang berhasil menyusup ke dalam kota Makassar. Diantarannya Arief Rate dan Abd. Manang dari ekspedisi Intelegen, Nurain Sabang, Abd. Rasjid, Abd. Latief, Madoad dari ekspedisi instruktur, Musalim dan Hasan bekas gerilya dari Lpris. Mereka ini merupakan selain pelatih-pelatih, juga merupakan pimpinan dibalik layar dari organisasi legal ini.²⁸

Kepanduan Anshar ini mendapat sorotan yang tajam dari alat-alat keamanan MIT karena cara-carinya yang mirip dengan cara Tentara Republik Indonesia (TRI), tetapi menjadi kebanggaan rakyat republikan. Dalam waktu singkat cabang-cabang pemuda Anshar tersebar di kota lainnya seperti Pare-pare, Pinrang, Majene, Palopo, Soppeng, Masamba, Malili dan di desa-desa Palopo Selatan.

PNI yang didirikan pada akhir tahun 1945, akhirnya dengan resmi diubarkan oleh Dewan Sulawesi Selatan yang

²⁸ Lahadji patang. Sulawesi dan Pahlawan-pahlawannya. (Jakarta, 1974), hal. 138.

dipimpin oleh Dr. Lion Cashet sendiri pada tanggal 8 September 1946. Tetapi satu setengah bulan kemudian dari pemulanan ini, muncullah "Partai Kedaulatan Rakyat" dibawah pimpinan Andi Burhanuddin, Henk Ronconuwu, Sugardo dan lain lain.²⁹ Hampir di seluruh kota-kota pedalaman terdentuk cabang-cabang partai ini, dan untuk beberapa waktu lama merupakan satu-satunya wajan politik yang dapat diandalkan rakyat untuk memperjuangkan cita-citanya. Pada bulan Desember 1947 sewaktu dibentuk Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) yang dipimpin Arnold Mononutu, maka partai Kedaulatan Rakyat adalah salah satu anggota dari gabungan ini.

Meskipun adanya NIT sudah menjadi suatu kenyataan yang tak dapat dipantah; namun rakyat di Sulawesi Selatan tetap memandangnya sebagai negara boneka yang dijadikan Belanda sebagai modal terakhir untuk memukul Republik Indonesia.

4.4 Runtuhnya Pemerintahan NIT

Disepan telah dijelaskan, bahwa konperensi Polongbangkeng telah bernasil membubuhkan / menelorken suatu organisasi yang merupakan perkumpulan dari sejumlah organisasi kelasykaran di Sulawesi Selatan dan organisasi dari Indonesia Timur lainnya. Organisasi BPPRI, yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan dengan maksud membubarkan Negara

²⁹ Ibid.

Indonesia Timur, yang dianggap sebagai rekayasa Belanda, untuk kembali menanamkan kekuatannya di Republik Indonesia.

Tuntutan BPPRI sebagai wadah perjuangan pembubaran NIT menuntut suatu strategi untuk merealisasikan perjuangannya. Untuk itu, maka selain perjuangan yang dilakukan di Sulawesi Selatan, khusus di ibu kota perjuangan Yogyakarta, dikirim perutusan untuk menyampaikan segera keputusan-keputusan yang disepakati bersama pada konferensi Polongbangkeng. Keputusan tersebut disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta.

Dalam menemui acting Presiden Asaat, Perdana Menteri Halim, diterima sambutan yang baik dengan petunjuk-petunjuk yang kesemuanya adalah tergantung kepada rakyat Indonesia Timur sendiri. Namun demikian, bahwa kedudukan Republik di Yogyakarta pada saat tersebut adalah sama dengan NIT, dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Selanjutnya, penyambutan-penyambutan hasil-hasil konferensi Polongbangkeng tersebut, dari ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Prawoto Mangkusaswito termasuk dari Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo didapatkan petunjuk-petunjuk tegas dan menghinbau agar seluruh rakyat Indonesia di bagian Timur, membebaskan saja negara boneka Belanda tersebut. Selain itu, berdasarkan laporan tentang hasil-hasil konferensi Polongbangkeng, maka kepada wakil BPPRI tersebut diberikan tugas sebagai pelaksana pemerintahan sipil darurat Republik Indonesia Propinsi Sulawesi pada bulan Juli 1946.

Bersamaan dengan dikirimnya keputusan BPPRI ke pusat (Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta), di Sulawesi Selatan atas prakarsa BPPRI pada bulan Maret 1950 mulai mengadakan demonstrasi. Demonstrasi ini diikuti oleh kurang lebih seratus ribu orang dengan memacetkan transportasi di kota Makassar yang menuntut pemecahan Negara Bagian BFO Indonesia Timur. Selain itu para demonstran tersebut, juga menuntut dicatangkannya TNI dari Jawa Timur sebagai pemelihara keamanan di Indonesia Timur.

Seiring dengan tuntutan para demonstran yang diprakarsai oleh BPPRI, dalam tubuh NIT sendiri terjadi perpecahan dan perdebatan tentang NIT. Suatu contoh misalnya, pada tanggal 15 Maret 1950 fraksi kesatuan yang diketuai oleh Lanto Daeng Pasewang mengajukan mosi pembubaran.

Tuntutan-tuntutan para demonstran yang mengikuti rapat-rapat raksasa menjadi awal pergokan di Sulawesi Selatan, mereka berteriak-teriak menuntut dibubarkannya NIT. Tuntutannya lebih berani dan bukan hanya menuntut didatangkannya APRIS, untuk menjamin keamanan saja melainkan ditingkatkan "bubarkan NIT"? Hal ini pada rapat raksasa di Makassar pada tanggal 16 Maret 1950 yang dihadiri oleh dua belas partai politik dan organisasi masyarakat dan juga fraksi-fraksi di dalam parlemen NIT, menuntut segera dibubarkannya NIT. Rapat-rapat raksasa ini diteruskan dengan demonstrasi keliling kota pada tanggal 17 Maret 1950 yang diikuti kurang lebih 200.000 orang. Demonstrasi ini merupakan demonstrasi yang terbesar dan hampir-hampir

menggoncang kota Makassar.³⁰ A.N. Hadjarati sebagai pimpinan demonstrasi menenemui Ketua Parlemen NIT Husain Puang Limboro untuk menyampaikan mosi agar diteruskan kepada pemerintah RIS. Isi mosi tersebut ialah agar pemerintah pusat di Jakarta segera membebaskan NIT.

Arnold Mononutu, sebagai ketua Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) memahami semua tuntutan masyarakat Sulawesi itu. GAPKI adalah tempat penyaluran aspirasi masyarakat untuk memahami tuntutanannya. Suatu hal bahwa kehadiran bantuan dari pusat pada demonstrasi-demonstrasi dilancarkan di kota Makassar terlambat. Keterlambatan ini mengakibatkan masyarakat cemas dan was-was tentang masa depan Republik Indonesia. Di pihak lain, pasukan KNIL semakin leluasa bertindak terhadap orang-orang yang menentang keberadaan NIT. Dengan demikian, demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia Timur pada saat itu khususnya di kota Makassar mengakibatkan suhu politik di semakin panas dan meningkat.

Walaupun wadah perjuangan mereka adalah organisasi GAPKI, namun organisasi ini cukup efektif, hal ini terbukti dengan bergabungnya sebelas organisasi di seluruh pelosok NIT, bukan hanya Sulawesi Selatan saja. Organisasi itu antara lain:

- a. Persatuan Indonesia di Ternate.
- b. Barisan Nasional Indonesia di Manado.

³⁰ Muh. Hasyim dan Arifin Nuamang. Op. Cit., hal. 21.

- c. Gerakan Indonesia Merdeka di Tomohon.
- d. Partai Indonesia Merdeka di Amboi.
- e. Partai Keadaulatan Rakyat di Makassar.
- f. Partai Serikat Islam Indonesia di Makassar.
- g. Partai Kebangsaan di Makassar.
- h. Partai Warga Negara di Makassar.
- i. Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku di Makassar.
- j. Partai Buruh Indonesia di Makassar.
- k. Partai Demokrat Indonesia di Makassar. ³¹

Demonstrasi massa seperti yang terjadi di Makassar pada tanggal 17 Maret 1950 juga menjalar ke daerah-daerah lainnya seperti; Gorontalo, Poso, Jonggala, Takalar, Jeneponto, Gowa, Bonthain, Bulukumba, Selayar, Pare Pare, Palopo dan Mandar.

Untuk menandingi demonstrasi yang dilancarkan oleh golongan unitaris/republikan, golongan federalis juga mengadakan kontra demonstrasi di Makassar dan Bone untuk mempertahankan NIT. Di daerah Bone, pelopor-pelopor kaum federal mengumumkan kepada rakyat bahwa pada tanggal 23 Maret 1950 Aru Ta pemimpin rakyat Bone yang sangat berpengaruh di kalangan rakyat Bone yang selama ini ditahan oleh Belanda, akan segera tiba. Untuk itu masyarakat Bone diminta datang untuk menyamoutnya. Demikianlah pada tanggal 23 Maret 1950 puluhan ribu rakyat dari desa-desa datang membanjiri kota Watampone. Jadi mereka datang bukannya untuk berdemonstrasi. ³² Begitu pula di kota Makassar, kontra demonstrasi ini dilakukan dengan cara memanggil rakyat menghadiri rapat di tanah lapang guna menyamout kembalinya tokoh yang telah

³¹ Ibid.

³² Kementerian Penerangan R.I. Op. Cit., hal. 166.

ditahan oleh belanda. Demonstrasi yang dilancarkan golongan federal ini tidak berhasil dikarenakan kurangnya penganut untuk mempertahankan NIT.

Sementara pertentangan-pertentangan diantara golongan unitaris dan golongan federalis terjadi, maka tanpa diduga sama sekali tanggal 5 April 1950 Kapten Andi Azis dan pasukannya menyerang tangsi-tangsi APRIS di kota Makassar, sedangkan perwira-perwira APRIS/TNI di tanah.

Demikianlah maka gerakan-gerakan rakyat menuju negara kesatuan yang dahulunya merupakan mosi-mosi, resolusi-resolusi, rapat-rapat raksasa, pernyataan-pernyataan, demonstrasi-demonstrasi, maka setelah peristiwa Andi Azis, telah berbuah sifatnya menjaui proklamasi-proklamasi, pembentukan K.NII. dan pembentukan pemerintah darurat. Sedangkan gerakan-gerakan dari kaum federalis tak terdapat lagi, kecuali suara-suara dari Twapro, K.K.M. dan G.R.I.T. di Minahasa, masih sekali-kali kedengaran namun tak berani menampakkan diri.

Keinginan rakyat Indonesia di Sulawesi untuk melepaskan diri dari NIT tak dapat lagi ditahan-tahan. Maka sebelum pemerintah RIS dengan resmi membebaskan NIT terlebih dahulu mereka melepaskan diri dari ikatan NIT dan langsung menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sebagai bukti misalnya; pada tanggal 17 April 1950, di Polongbangkeng ialah daerah pusat perjuangan rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan pada masa revolusi, telah diumumkan suatu prokla -

³³ibid.

masi yang isinya sebagai berikut:

"Proklamasi Polongbengkeng

"... Kami seluruh daerah yang berada dibawah kekuasaan kami melepaskan diri dari kekuasaan Undang-Undang dari pemerintah NIT dan akan mempertahankan daerah-daerah kami sebagai daerah bahagian Republik Indonesia, serta akan mempertahankan diri sebagai warga negara yang terikat oleh Undang-Undang dan tunduk dibawah Pemerintah Republik Indonesia di ibu kota Djogjakarta.

Merdeka Penuh !!!

Polongbengkeng, 17 April '50

Pemangku jabatan

Gubernur: Propinsi Sulawesi
Propinsi Maluku
Propinsi Sunda Kecil

MAKKARAENG DAENG DJARUNG
wakil, Riri Amin Daud.

Basis Komando Markas Besar Kesatuan Gerilya
Teritorium Sulawesi

Pemangku Jabatan Komandan

A. JALAL DG. LEO.
ANUI SELLE. ³⁴

Pada tanggal 26 April 1950, di Makassar Dewan Sulawesi Selatan juga memproklamsikan diri lepas dari NIT. Isinya sebagai berikut:

"Sesuai dengan keinginan bahagian terbesar dari seluruh rakyat Sulawesi Selatan, yang dilahirkan dengan demonstrasi, mosi-mosi, statemen tanggal 20 Maret 1950 dari Panitia Penegak Republik Indonesia, yang meliputi lebih dari 50 partai-partai politik dan organisasi mulai hari ini tanggal 26 April 1950 Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Dewan Sulawesi Selatan lepas dari Negara Indonesia Timur dan masuk dalam Republik Indonesia sebagai satu Propinsi.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia kami mendesak, agar supaya pernyataan kami ini dengan selekasnya disyahkan.

³⁴ Muh. Hasyim dan Arifin Nu'mang. Cp. Cit., hal. 24. dan Kementerian Penerangan Propinsi Sulawesi. Loc. Cit.

Makassar, 26 April 1950
Jam 9 pagi.

Atas nama Pemerintah Sulawesi Selatan.

Ketua,
ttd.

ANDI IJO KARAENG LALOLANG
Anggota,
ttd.

ANDI MAPPATOSA
ttd.

ANDI TJALLA DG. MUNTU

Atas nama Dewan Sulawesi Selatan
Ketua,
ttd.

ANDI BURHANUDDIN. ³⁵

Kedua proklamasi yang tersebut diatas adalah disusul pula oleh beberapa proklamasi-proklamasi dari daerah lain di Sulawesi yang kesemuanya bermaksud melepaskan diri dari NIT, dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Sebagai samoutan dan jawaban dari proklamasi tersebut diatas, maka pada tanggal 9 Mei 1950, Perdana Menteri RIS Drs. Moh. Hatta telah berpidato di depan corong radio RIS di Bakarta yang isinya sebagai berikut:

"Belum lama berselang aku berpidato di muka corong radio ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Makassar. Jika sekarang aku berpidato lagi maka bukan maksudku akan bicara panjang lebar. Hanya sepatah dua patah kata saja yang hendak ku sampaikan kepada rakyat di Indonesia Timur, agar supaya saudara-saudara di sana insyaf benar akan tanggungjawab saudara terhadap nusa dan bangsa untuk keselamatan negara kita, Indonesia seluruhnya. Politik di Indonesia cepat sekali jalannya. Dimana-mana sekarang rakyat menghendaki hapusnya NIT dan menuntut negara kesatuan: Republik Indonesia, menurut Proklamasi 17 Agustus 1945. Golongan yang terbanyak dalam parlemen pun telah condong kepada negara kesatuan. Beberapa bagian daripada NIT telah memproklamkan daerahnya lepas dari NIT dan menjadi bagian daripada Republik Indonesia.

³⁵ Ibid.

...Ingatlah, bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jasar ini harus dipelihara jangan sampai oisid-sieken... .³⁶

Sementara itu didalam tubuh pemerintahan NIT terjadi pergantian kabinet, yakni sebagai akibat dari peristiwa Andi Azis. Kabinet Djapari meletakkan jabatan pada bulan April 1950. Dan sebagai pembentuk kabinet baru telah ditunjuk Ir. Putuhena.

Sesudah diadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin fraksi di parlemen NIT maka pada tanggal 10 Mei 1950 pembentuk kabinet Putuhena disumpah dan lantik oleh pejabat Presiden NIT, Husein Puang Limboro, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. J. Putuhena, Perdana Menteri merangkap Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan.
2. Lanto Dg. Pasewang, Menteri Dalam Negeri.
3. Mr. Gusti Kutut Pujo, Menteri Kehakiman
4. Anoi Burhanuddin, Menteri Sosial
5. Henk Rondonuwu, Menteri Penerangan.
6. Ir. Ingkiriwang, Menteri Pendidikan merangkap Menteri Kesehatan.
7. Abdul Razak, Menteri Keuangan.³⁷

Dengan berkuasanya kabinet "likuidasi" Ir. Putuhena maka berakhirilah riwayat kabinet Djapari, yang hanya dapat menjalankan tugas kurang lebih sebulan lamanya, dalam keadaan politik yang tegang dan meruncing. Ia tidak mampu menyalurkan arus perkemungkinan baru yang menyebabkan pergolakan yang dahsyat antara golongan federalis dan unitaris yang pada akhirnya menuju kepada pembentukan negara kesatu-

³⁶ Kementerian Penerangan R.I. Op. Cit., hal. 169-170.

³⁷ Ibid.

Setelah berfungsinya kabinet Putuhena, maka Dewan Menteri segera mengadakan sidangnya yang pertama, antara lain telah mamutuskan sebagai berikut:

1. Segala "leutel-posities harus selekas mungkin berada atau diserahkan kepada orang-orang bangsa Indonesia yang kapabel.
2. Kementerian sosial bertindaak menyelenggarakan suatu taman banagia bagi pejuang-pejuang yang gugur.
3. Orang-orang dalam lapangan urusan dalam negeri yang tidak acceptabel dan tidak dipercaya atau tidak disenangi oleh rakyat, segera diganti.
4. Diusulkan kepada pemerintah pusat, supaya kesempatan menukar uang kiri bagi Indonesia Timur diperpanjang waktunya.
5. Ditetapkan dua orang yang ditugaskan mengadakan perundingan-perundingan penting dengan pemerintah pusat.³⁸

Melihat susunan Kabinet yang tersebut diatas yang anggota-anggotanya kebanyakan terdiri dari kaum Unitaris-Republiken, sedangkan program Kabinet adalah "Memasukkan Negara Indonesia Timur dalam Negara Kesatuan selekasnya sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945." Hal ini sangat sesuai dengan tuntutan rakyat di NIT sehingga Kabinet Putuhena dapat diterima dengan baik oleh Rakyat.

Pada tanggal 12 Mei 1950, Perdana Menteri Putuhena dan Menteri Penerangan Henk Ronoonuwu sebagai delegasi Pemerintah, dan Saleh Sungkar beserta Pupella sebagai delegasi parlemen NIT, berangkat ke Jakarta untuk berunding dengan pemerintah RIS. Setelah perundingan delegasi tersebut menyerahkan mandatnya kepada Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri, untuk melaksanakan perundingan dengan Republik Indonesia tentang pembentukan Negara Kesatuan.

³⁸ ibid., hal. 171.

Pada tanggal 19 Mei 1950 satu minggu setelah delegasi NIT menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS, akhirnya tercapailah suatu piagam persetujuan antara Pemerintah RIS yang juga bertanda atas nama pemerintah NIT dan Negara Sumatera Timur (NST) dengan pemerintah Republik Indonesia. Adapun judul dari persetujuan itu yakni: "Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia" yang antara lain menyatakan bahwa disetujui di dalam sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmuan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.³⁹

Akan tetapi, walaupun piagam persetujuan tersebut diatas telah tercapai, namun rakyat NIT terus juga mendesak pemerintah RIS untuk segera membubarkan NIT dan memasukkannya ke dalam Republik Indonesia.

Demikianlah akibat hebatnya arus yang sangat kuat untuk membubarkan NIT dan bergabung dengan negara Kesatuan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno membacakan di hadapan sidang gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Senat RIS Piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini kami memberitahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat bahwa rencana Undang-Undang untuk mengubah Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang disusun Pemerintah

³⁹ Ide Anak Agung Goe Agung. Negara Kesatuan: Negara Indonesia Timur. (Malino, Makalah Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, 1992), hal. 16.

dengan persetujuan para pemerintah Negara-Negara Bagian Republik Indonesia Serikat telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS dalam rapat-rapatnya pada tanggal 14 Agustus 1950.

Pada hari ini tanggal 15 Agustus 1950 Nas kah Undang-Undang tersebut telah kami tanoatangani dan ditandatangani serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Maka kami atas nama rakyat pada tingkatan perjuangan Kemerdekaan sekarang ini, menyatakan sebagai perwujudan dalam negeri terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air dan segenap bangsa Indonesia.

Jakarta, 15 Agustus 1950.

Soekarno. ⁴⁰

Setelah upacara pembacaan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Sukarno terbang ke Yogyakarta. Dan pada hari yang sama didalam kedudukan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia (Yogyakarta) menyatakan dihadapan sidang istimewa Badan Pekerja Komite Nasional Pusat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 dihadapan rapat akbar di depan Istana Merdeka untuk memperingati Ulang Tahun kelima Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan kepada knelayak ramai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang antara lain beliau menyatakan:

"Kita hanya dapat mengkaji kekuasaan de facto Pemerintah Belanda atas Irian Barat tahun ini saja Apabila dalam tahun ini tidak dapat diperoleh pe-

⁴⁰ Ibid., hal. 18-19.

nyelesaian masalah tersebut melalui jalan perundingan, maka akan timbul suatu sanksi yang besar mengenai pertanyaan siapakah yang berhak menguasai wilayah tersebut.

Saya tegaskan lagi disini bahwa kita akan terus berjuang sampai wilayah Irian Barat kembali dalam pangkuan ibu pertiwi Indonesia. Saya mengharapkan, ya, saya yakin, bahwa Irian Barat akan kembali kepada pangkuan Ibu pertiwi Indonesia, olen karena tujuh puluh lima juta rakyat Indonesia berdiri dibelakang saya."⁴¹

Sebagaimana telah diuraikan di depan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan saat itu juga terlakuklah UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ini Negara Indonesia Timur sudah dianggap bubar, dan pada tanggal 16 Agustus 1950 Perdana Menteri Ir. J. Putehena dan seluruh kabinetnya di Makassar meletakkan jabatan.

Pada hari yang sama Badan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia Timur dinyatakan telah bubar dan demikian juga Negara Indonesia Timur, yang mulai saat terpecah menjadi tiga propinsi, yaitu: 1. Propinsi Sunda Kecil, dibawah pimpinan Residen I Gusti Bagus Oke. 2. Propinsi Sulawesi, di bawah pimpinan Residen B.W. Lopian; 3. Propinsi Maluku, di bawah pimpinan Administrator P.T. Mantouw.⁴²

Maka dengan ini berakhirilah riwayat Negara Indonesia Timur setelah berusia lebih dari tiga tahun lamanya dengan menyongsong era baru di Indonesia.

⁴¹ Ida Anak Agung Gde Agung. Op. Cit., hal. 772.

⁴² Ibid.

BAB V

K E S I M P U L A N

Peranan Belanda dalam proses pembentukan NIT cukup besar, tapi dengan peranannya itu bukan berarti Belanda ingin mewujudkan kedaulatannya di Indonesia. Tampaknya Belanda ingin menjadikan NIT sebagai negara bagian dari negara Indonesia Serikat (RIS) dengan otonomi yang luas, agar supaya NIT dapat mengatur remah tangganya sendiri. Maksud dan tujuan Belanda tersebut diterima baik oleh sebahagian masyarakat yang mengerti bahwa dengan otonomi yang luas kemungkinan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Apakah ada pamrih atas peranan Belanda tersebut, perjalanan sejarahnya yang menentukan. Dalam hubungan ini G.R. Pantouw menjelaskan peranannya dalam proses pembentukan NIT, bahwa beliau dan Nadjamuddin Daeng Malewa bekerjasama dengan van Mook dalam bidang ekonomi karena melihat rakyat sudah cukup menderita akibat penjajahan Jepang. Mereka berpendapat bahwa melawan Belanda secara fisik adalah perlawanan yang sia-sia, maka untuk mengimbangi kekuasaan NICA beliau dan Nadjamuddin Dg. Malewa mendesak van Mook agar secepatnya membentuk NIT.

Pengakuan Pantouw diatas cukup memberikan penjelasan bahwa NIT dibentuk bukan semata-mata kehendak Belanda melainkan timbul sebagai kreatifitas lokal yang menginginkan otonomi wilayah. NIT yang akan berdiri sebagai satu negara bagian adalah alat untuk mencapai kesejahteraan

rakyat.

Perbedaan kondisi dan potensi yang dimiliki antara pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa merupakan dasar pikiran utama pembentukan NIT. Misalnya dari segi jumlah penduduk, pendidikan dan kebudayaan, Jawa lebih maju di bandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Dengan demikian salah satu tujuan dibentuknya NIT ialah usaha mem-
pendung bahaya ekspansi Jawa dan sentralisasi administra-
si di Batavia/Jakarta, dimana diketahui bahwa Batavia waktu itu merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.

Dibulan Juli 1946 di Malino, van Mook memajukan kon-
sep federasi Indonesia tanpa nama bagi suatu negara yang akan dibentuk di daerah Indonesia bagian Timur.
Namun menjelang berlangsungnya Konferensi Malino, diseleng-
garakan suatu pertemuan khusus yang terdiri komisi Jende-
ral van Mook sebagai penguasa penuh eksekutif pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa tokoh Indonesia, diantara-
nya Sultan Hamid dari Kalimantan Barat, Haji Muchtar Lut-
fi, Nadjamuudin Dg. Malewa, dan G.R. Pantouw. Dalam pertee-
muan tersebut diungkapkan oleh van Mook, bahwa pada tang-
gal 12 September 1946 akan berlangsung di Linggarjati per-
mulaan dari perundingan antar pihak Belanda yang terdiri
atas komisi Jenderal dibawah pimpinan Schermerhorn dengan
dua anggota de Boer dari pengusaha dan partai Katholik Be-
landa anggota ketiga, bersama van Mook dan stafnya dengan
pihak Republik Indonesia yang terdiri atas Perdana Menteri

Republik Indonesia Sutan Syahrir beserta staf menteri-menteri dan bila perlu dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden R.I. pada tingkat tertinggi untuk pengesahan suatu persetujuan dapat tercapai dalam perundingan itu.

Ketika pendapat dari Naajamuddin dan Sultan Hamid mengenai konsep suatu federasi yang akan terdiri atas Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur disetujui. Adapun hasil Linggarjati, Naajamuddin mengusulkan kepada van Mook disetujui sepenuhnya. Dengan konsep yang telah diberikan oleh van Mook mulailah disiapkan suatu konsep Tata Negara yang dapat mengatur suatu tata pemerintahan yang demokratis berparlemen menurut sistem Eropa Barat, yang eksekutifnya dapat diganti sesuai peranan Letnan Gubernur Jenderal. Untuk pertama kalinya Perdana Menteri dari negara yang bakal didirikan itu ditunjuk oleh Presiden NIT sendiri dan melalui konferensi pemimpin-pemimpin rakyat dan pemerintahan adat yang memerintah sebelum Perang Dunia ke II.

Tepat pada tanggal 16 Juli 1946 dibukalah Konferensi Malino dimana wakil-wakil rakyat dari wilayah bagian Timur Indonesia dari Makassar (sekarang Ujung Pandang) sampai ke Merauke (Irian Jaya) berkumpul berunding dengan wakil-wakil pemerintah Belanda dibawah pimpinan van Mook untuk merundingkan struktur pemerintahan dan politik wilayah yang luas ini didalam konteks perjuangan menuju Indonesia Merdeka. Jadi pada konferensi yang bersejarah tersebut wakil-wakil rakyat tersebut buat pertama kalinya mendapat kesempatan pada tingkat nasional merundingkan dengan pihak pemerintah.

Belanda perkembangan politik di Indonesia.

Dalam konperensi Malino dibicarakan mengenai hubungan kerjasama antara NIT (akan dibentuk kemudian) dengan Belanda. Hubungan kerjasama itu dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Konperensi juga menyetujui bahwa jika NIT sudah terwujud maka akan diadakan peralihan pemerintahan dari pihak Belanda ke Pemerintahan NIT. Untuk menewaskan pemerintah NIT, maka dalam masa peralihan mereka akan diberikan kedudukan dan tanggungjawab yang utama. Hal ini dapat dilihat setelah NIT dibentuk di Denpasar (Bali), dimana peranan yang penting dalam penyelenggaraan negara semuanya dijabat oleh orang-orang Indonesia.

Perdebatan yang paling serius dalam konperensi Malino ialah pembicaraan mengenai bentuk negara. Ada golongan yang menghendaki bentuk federal, sedang golongan lain menginginkan bentuk kesatuan. Perbedaan pendapat dari kedua golongan ini dilatarbelakangi oleh pandangan politik masing-masing, disamping itu sifat-sifat ekonomi yang berbeda antara pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa, sedangkan golongan kedua melihat bahwa bangsa Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, dengan demikian mempunyai perasaan historis yang sama, karena secara politik kesatuan itu lebih ditentukan oleh situasi historis tertentu.

Bentuk negara serikat telah disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti yang termaktub dalam perundingan Linggarjati, yang berisi antara lain; Belanda

harus mengakui kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura dan Sumatera, Olehnya itu semua daerah-daerah yang diduduki Belanda di wilayah de facto Republik Indonesia harus segera diserahkan kepada pemerintah R.I. Selain daripada itu disepakati pula bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat sebelum tanggal Januari 1949 akan bersama-sama mewujudkan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang demokratis dan berdaulat berdasarkan sistem federal. Karena pemerintah R.I. sendiri telah menyetujui bentuk negara serikat, maka suatu tindakan yang wajar jika golongan federalis dan golongan unitaris yang ada di Indonesia Timur jika mereka dalam konferensi Denpasar tanggal 7 sampai 24 Desember 1946 menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Timur yang kemudian menjadi satu negara bagian dari Negara Indonesia Serikat. Cita-cita kaum federalis mendirikan NIT tak dapat dilepaskan dari keinginan menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi lokal.

Pendapat yang mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam proses terbentuknya NIT adalah kaki tangan Belanda yang hanya mencerminkan semata-mata politik pemerintahan Belanda, sebenarnya hanya merupakan politik kebangsaan yang ingin menumbuhkan perasaan nasionalisme yang tinggi.

Konferensi Denpasar tanggal 7 hingga 24 Desember 1946 dihadiri oleh golongan federalis dan golongan unitaris. Kedua golongan ini terlibat dalam diskusi dan perdebatan untuk merumuskan pembentukan NIT. Dengan demikian konferensi

Denpasar merupakan penggambaran demokrasi tanpa adanya paksaan dan penindasan dari satu golongan terhadap golongan yang lain. Seperti yang disinyalir oleh Anak Agung bahwa, keputusan-keputusan yang diambil dalam konperensi Denpasar adalah hasil dari suatu rumusan untuk mendapatkan suatu Communis opini (pendapat umum). Yang dicapai melalui diskusi dan perdebatan dari semua peserta dalam suasana yang bebas tanpa adanya paksaan atau dominasi dari satu golongan terhadap golongan yang lain dimana etik dan moral demokrasi menjadi pegangan.

Konperensi Denpasar yang berjalan secara demokrasi itu adalah refleksi dari Persetujuan Linggarjati yang menginginkan dibentuknya Negara Indonesia Serikat. Konperensi Denpasar yang telah mengukuhkan terentuknya NIT merupakan suatu usaha untuk mendirikan satu negara bagian RIS seperti yang termuat dalam persetujuan Linggarjati. Dengan demikian, kalau Konperensi Denpasar dan Persetujuan Linggarjati dijadikan tolak ukur maka konsekwensinya NIT harus sederajat dengan Republik Indonesia. NIT telah berdiri sebagai satu negara bagian, jelas akan memberikan wewenang kepada pemerintah NIT untuk menjalankan kekuasaan otonomi lokal di kawasan Inoonasia Timur.

Namun dengan terbentuknya NIT yang diproklamasikan pada tanggal 24 Desember 1946 menimbulkan reaksi hebat dari masyarakat Sulawesi Selatan, karena dianggapnya NIT merupakan sebuah negara boneka ciptaan Belanda yang dimaksudkan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reaksi dari rakyat tidak hanya dilakukan lewat mimbar Parlemen NIT, dimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 1945 hingga tahun 1950, Makassar menjadi pusat kekuasaan dan ajang pertentangan politik dari berbagai aliran. Ketika NIT berdiri ada dua aliran politik yang dominan, dan saling diukung oleh kekuatan bersenjata masing-masing. Yang pertama kelompok Unitaris yang mendapat dukungan dari pejuang republikan atau gerilya berusaha membubarkan NIT sebagai upaya kearah terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berpendapat bahwa, sejak penjajahan Belanda bangsa Indonesia telah mempunyai nasib yang sama oleh karenanya sistem pemerintahan federal yang diciptakan Belanda harus ditolak. Sedangkan golongan federalis dengan bantuan KNIL berpendapat bahwa NIT harus dipertahankan keutuhannya karena ia merupakan wujud dari sistem federal yang tepat untuk Indonesia mengingat keadaan geografis, dan corak budayanya yang beraneka ragam.

Dalam perjuangan, nampak bahwa pihak unitaris mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rakyat Sulawesi Selatan turut berjuang dengan membentuk wadah atau organisasi-organisasi kepemudaan dan kelasykaran bersenjata. Wadah yang dibentuk itu umumnya bertujuan membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan kegiatan mereka tidak hanya dilakukan dengan gerakan-gerakan bawah tanah tetapi juga melakukan serangan-serangan bersenjata dengan taktik perang gerilya, hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap aksi Belanda yang ingin kembali menguasai Negara Republik Indonesia.

Kaum pejuang yang dahulu ditawan oleh pemerintah Belanda membentuk wadah yang mereka namakan Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPPRI) yang mengumumkan pembubaran NIT begitu pula kaum Aristokrat, melalui Dewan Hadat Tinggi tampil kedepan mengeluarkan pernyataan keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Disamping itu rakyat senantiasa menghormati dan mengeluarkan pasukan APRIS yang umumnya berasal dari TNI, dan bersikap sinis juga memperolok-olokan pasukan KNIL dan NICA.

Tampilnya tokoh-tokoh yang berhaluan federalis seperti, Nadjamuddin Dg. Malewa, Baso Dg. Malewa, Sonda Dg. Matayang, Husain Puang Limboro, Andi Pabenteng, dan sebagainya, bagi kebanyakan orang telah menvonis mereka sebagai penghianat bangsa. Pada hal mereka sebenarnya pro-Republik mereka ini justru tokoh-tokoh cendekiawan Sul-sel yang berpikiran jauh kedepan serta berwawasan luas. Mereka memang menginginkan Negara Indonesia berbentuk federal, sebab mereka percaya bahwa bentuk federal akan memberikan kesempatan luas kepada pemerintah tiap-tiap negara bagian untuk mengarahkan potensi wilayahnya masing-masing. Disamping itu memungkinkan penyelenggara pemerintahan akan dipegang/dijabat oleh putera-putera daerah sendiri.

Para tokoh NIT ketika itu sebenarnya tahu bahwa tidak mungkin Belanda akan menjajah Indonesia terus-menerus, suatu saat Belanda akan pergi, seiring dengan perkembangan zaman yang tidak lagi memberlakukan sistem kolonisasi. Belanda akan berpikir dua kali jika ingin menjajah Indonesia kembali

hal ini dikarenakan adanya reaksi yang luar biasa hebatnya dari penduduk Indonesia, belum lagi adanya reaksi dari dunia Internasional.

Pembentukan NIT dapat dinilai sebagai kreatifitas lokal yang menginginkan negara Indonesia berada dalam wujud federal yang demokratis. NIT memaparkan sejarahnya sendiri namun paham federal kemudian tenggelam oleh paham unitaris sehingga hari ini Negara Indonesia Timur tidak lagi muncul kepermukaan.

Akan tetapi sebagai warga negara Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan tentunya kita tidak menginginkan percerai-beraian di antara sesama bangsa Indonesia. Kemerdekaan RIS diakhir tahun 1949 seperti yang dibayangkan di Linggarjati, hanya merupakan suatu oatu loncatan kearah Republik Kesatuan seperti yang diproklamirkan tahun 1945. Hanya dalam waktu kurang lebih enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RIS, bentuk negara sudah berubah menjadi suatu negara kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia pada hakekatnya telah menjadi Republik Kesatuan yang merdeka seperti yang diproklamirkan lima tahun sebelum dan yang telah menjadi impian selama setengah abad. Rasa persamaan yang telah digembleng selama perjuangan revolusi sangat luar biasa. Jika kita bandingkan sejarah Indonesia selanjutnya dengan pengalaman India dan Indo-Cina, akan jelaslah betapa luar biasanya pencapaian rasa persatuan itu dalam waktu hanya lima tahun. Indonesia dengan beribu-ribu pulauanya, berpuluh-

puluh suku dan bahasanya, beberapa kepercayaan agama yang utama dan ideologi selanjutnya akan bersatu dalam suatu ikatan yang telah terpateri tidak hanya kata-kata dan lembaga, tetapi juga dengan pengorbanan bersama, Satu Tanah Air, Satu bangsa, satu bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

A R S I P

Koleksi arsip pada "Arsip Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan," khususnya Arsip NIT No. : 8, 10, 20, 24, 128, 134, 162, 164. dan Inventarisasi arsip Pemerintahan Sulawesi No. 236 dan 276.

BUKU TEKS

Abdullah, Hamid. Andi Pangerang Petta Rani Profil Pimpinan Yang Manunggal dengan Rakyat. Jakarta: PT. Gra-sindo, 1991.

Bardosono, Mayor. Peristiwa Sulawesi Selatan 1950. Bandung: Yayasan Pustaka Militer, 1954.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu politik. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Djarwadi, Raoik. Sedjarah Corps Hasanuddin Pradjurit Tem-pur dan Pembangunan. Makassar: Corhas., 1972.

Gde Agung, Ide Anak Agung. Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Grafity Press, 1986.

Harsodjo, et.al., Propinsi Sulawesi. Makassar: tanpa pe-nerbit, 1953.

Harvey, Barbara Sillars. Permesta; Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: Grafity Press, 1984.

_____, Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/III. Jakarta: Grafity Press, 1989.

Jarah Dam XIV Hasanuddin. 25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin 1957-1982. Bandung: Angkasa, 1982.

Kadir, Harun. et.al., Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Re-publik Inoonesia Di Sulawesi Selatan 1945-1950. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Unhas dengan Ba-peda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan, 1984.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah pergerakan Nasional Jld. 2. Jakarta: Gra-media, 1990.

Kementerian Penerangan R.I. Propinsi Sulawesi. Makassar:
Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953.

Masjkuri. Dr. GSSJ. Ratulangi; Seri Biografi. Jakarta:
Depdikbu., Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisionil dan Proyek IDSN, 1985.

Nasikun. Sistem Sosial Inoonesia. Jakarta: CV. Rajawali,
1984.

Patang, Lahaojoji. Sulawesi Dan Pahlawan-Pahlawannya.
Jakarta: Y.K.G.M.I. 1976.

pawiloy, Sarita. Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949
Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Proyek Inventa-
risasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan, 1979/1980.

_____, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan. Ujung Pan-
dang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi
Sulawesi Selatan, 1987.

Poesponegoro, Marwati Djoened. Sejarah Nasional Indone-
sia VI. Eoisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Soekanto, Soejono. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1981.

Tobing, K.M.L. Perjuangan Politik Bangsa Indonesia :
Linggarjati. Jakarta: Gramedia, 1981.

Vinacke, M. Harold. A History of the Far East In Modern
Times. (trans). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, Cetakan kedua, 1978.

Wild, Colin dan Peter Carey. Gelora Api Revolusi; Sebuah
Antologi Sejarah. Jakarta: Kerja sama BBC seksi
Indonesia dan PT. Gramedia, 1986.

Yamin, Muhammad. Sejarah Konstitusi Republik Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka, 1953.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. Bunga Rampai
Soempah Poemoeda. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.

MAKALAH, MAJALAH, DAN SURAT KABAR.

Aboullah, Taufik. "Sosial Budaya Sebagai Faktor Dalam
Sejarah Pantulan Dari Sulawesi Selatan." Ujung
pandang: Pedoman Rakyat, 1983.

- Asrullah, M. "Negara Indonesia Timur Sebuah Kreatifitas Lokal Menuju Negara Kesatuan." Malino: Makalah Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, Juli 1992.
- Hasyim, Muhammad, dan Arifin Nu'mang. "Organisasi Kelasykaran dan Peranannya Mempertahankan Kemerdekaan RI. Selama Revolusi Fisik." Ujung Pandang: Makalah Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulsel Menentang Penjajahan Asing, 1982.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. "Negara Kesatuan; Negara Indonesia Timur." Malino: Makalah Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, Juli 1992.
- Paeni, Dr. Muklis. "Ide Membangun IBT Sejak Negara RIS" Ujung Pandang: Pedoman Rakyat, 10 Juli 1992.
- Pantouw, G.R. "Sejarawan dan Masa Sekarang: Menggali Sebab Akibat Pemberontakan." Dalam Willian M. Frederick dan Soeri Soeroto. Pemahaman Sejarah Indonesia Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3, 1984
- _____, "Perjuangan Rakyat di Sulawesi Selatan Menentang NIT." Ujung Pandang: Makalah Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulsel Menentang Penjajahan Asing, 1982.
- Said, M. Natzir. "Kegiatan-Kegiatan Rakyat Sulawesi Selatan Menyambut Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan." Ujung Pandang: Makalah Seminar Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulsel Menentang Penjajahan Asing, 1982.
- Harian Fajar. "Konferensi Malino 1946 Bukan Penghianatan." Ujung Pandang: Laporan dari Malino, 20 Juli 1992.
- Pedoman Rakyat. "NIT Tak Punya Militer." Ujung Pandang: 18 Juli 1992.
- _____, "Sulsel, 'Kanker Ganas' Dalam Tubuh Pemerintahan Kolonial Belanda." Ujung Pandang: 16 Juli 1992
- Warta Sulawesi Selatan. "Korban 40.000 Jiwa Hari Berka-bung Nasional." Ujung Pandang: Desember 1990.

DAFTAR SINGKATAN

APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BB	Binnenlandsch Bestuur
BFO	Bijeenkoms Federal Overleg
BPPI	Badan Pimpinan Pemuda Indonesia
BPPRI	Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia
BPR	Badan Perwakilan Rakyat
BPS	Badan Perwakilan Sementara
CONICA	Commanding Officer Netherlands Indies Civil Administration
GAPKI	Gabungan Partai Kemerdekaan Indonesia
KIS	Komite Indonesia Serikat
KL	Koninklijke Landmacht
KMB	Konperensi Meja Bundar
KNIL	Koninklijke Netherlands Indies Leger
KRIS	Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
LAPRIS	Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi
MBR	Mobile Brig. of Matulangi
NICA	Netherlands Indies Civil Administration
NIS	Negara Indonesia Serikat
NIT	Negara Indonesia Timur
PARKE	Partai Kebangsaan
RIS	Republik Indonesia Serikat
PKR	Partai Kedaulatan Rakyat
PKRS	Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi
PMF	Pertemuan Musyawarah Federal
PNI	Partai Nasional Indonesia
SUDARA	Sumber Darah Rakyat
SEAC	South East Asia Command
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRI	Tentara Republik Indonesia
TRIPS	Tentara Rakyat Indonesia Persiapan Sulawesi
UUOS	Undang-Undang Dasar Sementara

JAFAR RALAT

Hal.	Alinea	baris	Tertulis	Seharusnya
2	11	12	perkebangannya	perkembangannya
3	111	2	Di antaranyalasan	Diantaranya alasan
9	1	1	meogenai	mengenai
13	-	1	dari apa akan	dari apa yang akan
15	1	7	membaoingkan	membandingkan
17	-	2-3	Per- oan	Per- dana
18	1	12	sataun	satuan
19	1	6	dilapagan	di lapangan
20	111	3	serang	seorang
21	-	4	pidati	pidato
23	-	1	Inoone-	Indonesia
25	1	2	organiwawi	organisasi
		3	truktur	struktur
27	1	4	Hindi Belanus	Hindia Belanda
28	11	1	ternya	ternyata
33	-	3	keadanya	kepadanya
42	1	2	tg1.	tanggal
43	-	2	proklamesa	Proklamas
44	11	2	suato	sebuah
49	1	4-5	negara dari	negara bagian dari
50	-	1	merasakan cerita	menderita
54	11	2-3	pentinnya	pentingnya
66	1	3	sidak PPKI	sidang PPKI
70	-	6	aristikrat	aristokrat
71	11	5	erubahan	perubahan
72	-	3	gerankannya	gerakannya
74	1	2	menjadi	menjadikan
75	-	1	Indonesia yang	Indonesia Timur
77	-	2	pnouduknya	Penouduknya
77	-	5	(Rw Bila)	(Aru Bila)
77	11	3	nawap	Terhadap
82	1	4	patritik	patriotik
86	1	2		

112			sebagai	sebagai
113			sebagai	sebagai
114			sebagai	sebagai
115			sebagai	sebagai
116			sebagai	sebagai
117			sebagai	sebagai
118			sebagai	sebagai
119	I	17	digabungkan	digabungkan
120			sebagai	sebagai
121			sebagai	sebagai
122	II	4	semakin tidak	semakin tidak

peren-

97	II	4	pembebasantahanan	pembebasan tahanan
00	II	8	ditingkan	ditingkatkan
05	I	12-13	di semakin	di NIT semakin
06	II	9	1990	1950
07	-	3	mempertahankan.	mempertahankan
10	II	3-4	keadaanpolitik	keadaan politik
10	II	7	kesatu-	kesatuan
11	III	3	desrtai.	disertai
12	-	1	satu meniggu	satu minggu
14	I	3	berlakuklah	berlakulah
14	-	3	saat terpecah	saat itu terpecah
17	-	3	kota Makassat	kota Makassar
18	-	2-3	be- langi	be- lakangi
19	I	17	digabungkannya	digabungkannya
22	II	4	semakintidak	semakin tidak

peren-

PERATURAN PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA TIMUR*

BAB I

Pasal 1

1. Dibentuk Negara Indonesia Timur.
2. Wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari wilayah Propinsi Timur Besar yang dibentuk berdasarkan Ordonansi tanggal 19 Desember 1936 (Lembaran Negara No. 68) dengan menunjuk keputusan Gubernur tanggal 25 Mei 1938 (Lembaran Negara No. 264) dengan pengertian, bahwa mengenai pembagian wilayah Residensi Nieuw Guinea sekarang dan hubungannya dengan Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk akan ditetapkan kemudian.
3. Ibukota Negara Indonesia Timur adalah Makasar.

Pasal 2

1. Kepada Negara Indonesia Timur dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat semua hak dan kekuasaan pemerintah untuk memungkinkan negara ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mewujudkan dirinya sebagai negara dengan susunan dan wewenang sedemikian rupa, sehingga dapat menduduki tempat yang sungguh-sungguh sederajat dengan bagian lain Negara Indonesia Serikat yang direncanakan, tetapi dengan pengertian bahwa dalam pelimpahan wewenang ia wajib memikul segala kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang tersebut.
2. Pelimpahan wewenang yang dimaksud dalam ayat 1 hanya dibatasi suatu keharusan bahwa tidak dapat dilaksanakan pelimpahan kekuasaan, yang dalam rangka pembangunan ketatanegaraan yang direncanakan itu kemudian dibatalkan lagi berhubung dengan pelaksanaan tugas Negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia-Belanda.
3. Memperhatikan keputusan-keputusan yang akan diambil pada saat pembentukan Negara Indonesia Serikat sebagai suatu persyaratan, maka Negara Indonesia Timur dapat menyetujui dengan memperhatikan apa yang telah ditentukan dalam ayat yang terlebih dulu, bahwa wewenang pemerintahan yang disebutkan di bawah ini untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, terkecuali berdasarkan perundingan yang kemudian diadakan dan keputusan bersama yang kelak akan diambil, dapat diadakan perubahan-perubahan mengenai hal ini, serta memperhatikan pula bahwa Pemerintah Pusat dapat meminta bantuan dalam hal ini kepada negara.
 - I. Hubungan luar negeri, kewajiban terhadap kekuasaan luar negeri dan pada umumnya semua pokok-pokok yang berkaitan dengan hubungan luar negeri;
 - II. pertahanan negara termasuk juga pengumuman keadaan darurat perang;
 - III. grasi, pengampunan (amnesti) dan penghapusan hukuman (abolisi);

* Terjemahan dari De Conferentie te Denpasar 7—24 December 1946. Deel II. Bijlagen. Uitgegeven door het Algemeen Regeringscommissariaat voor Borneo en de Grote Oost. Batavia: G. Kolff & Co., 1947, hal 32—37.

- IV. mengatur soal nasionalitas, kewarganegaraan dan kependudukan;
- V. imigrasi dan emigrasi;
- VI. peraturan mengenai hak mengarang dan milik industri;
- VII. lembaga ilmiah;
- VIII. pengumpulan bahan-bahan statistik untuk kepentingan umum;
- IX. perlengkapan sosial dalam arti umum;
- X. mahkamah tertinggi (agung);
- XI. peraturan-peraturan mengenai hukum perdata dan hukum niaga yang termasuk di dalam lingkungan kekuasaan pusat.
Oleh karena didasarkan atas kepentingan perdagangan umum atau lain-lain alasan ekonomis atau disebabkan sifat istimewa suatu golongan penduduk dan akibat kedudukannya yang istimewa itu tidak bermukim di dalam satu negara;
- XII. kadaster;
- XIII. soal perbankan dan moneter, termasuk juga peraturan alat pembayaran luar negeri;
- XIV. pajak perseroan;
- XV. pajak kekayaan dan kupon;
- XVI. pajak penghasilan, mengenai bagian yang diterima oleh negara akan ditetapkan kemudian melalui perundingan;
- XVII. impor dan ekspor ke luar negeri termasuk juga bea cukai ekspor dan impor;
- XVIII. pajak pembelian;
- XIX. pajak perangko;
- XX. monopoli;
- XXI. perguruan tinggi, termasuk peraturan mengenai pendidikan yang menjadi landasan untuk ujian dan pengesahan diploma perguruan tinggi;
- XXII. pemulihan hubungan hukum;
- XXIII. ganti rugi diakibatkan oleh perang;
- XXIV. polisi yang didirikan khusus untuk melindungi kepentingan federal;
- XXV. kolonisasi dengan syarat bahwa pemerintah pusat tidak dapat menguasai milik negara sepihak;
- XXVI. pas jalan dan kartu pengenalan dalam negeri;
- XXVII. petunjuk mengenai masalah penerangan, siaran radio dan pengawasan terhadap pemasukan dan pertunjukan film;
- XXVIII. petunjuk mengenai soal hak tanah dan penguasaan hutan;
- XXIX. penolakan terhadap penyakit berbahaya;
- XXX. perdagangan, kerajinan, pertanian, perhutanan, kehewanian, perikanan dan masalah ekonomi lain yang ada kaitannya dengan hubungan luar negeri dan negara lain;
- XXXI. perhubungan yang terletak di luar kepentingan negara, termasuk pemasangan rambu-rambu laut dan penerangan pantai;
- XXXII. penerbangan dan meteorologi;
- XXXIII. topografi dan hidrografi;

- XXXIV. pengawasan samudera;
 - XXXV. pelabuhan dan sungai-sungai yang dipergunakan untuk perkapalan internasional, termasuk pekerjaan pengerukan;
 - XXXVI. pos, telegraf dan telepon;
 - XXXVII. pertambangan;
 - XXXVIII. perundang-undangan di bidang listrik dan pembangkit tenaga listrik yang diperoleh dari tenaga air, termasuk juga pembuatan dan eksploitasi pembangkit tenaga listrik yang besar;
 - XXXVIII. jawatan ukuran dan timbangan.
4. Apabila mengenai pokok-pokok yang dimuat dalam ayat 3 dari pasal ini belum diadakan peraturan-peraturan oleh pemerintah pusat, maka negara berwenang menanganinya untuk membuat peraturan-peraturan itu dengan pengertian jika kemudian pemerintah pusat telah mengatur pokok-pokok tersebut, maka peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara menjadi batal.
 5. Pelimpahan wewenang dilaksanakan secepat mungkin sesuai dengan keinginan negara dengan memperhatikan peraturan-peraturan peralihan yang dimuat dalam Bab II peraturan ini.

Pasal 3

Negara Indonesia Timur berkewajiban menjamin hak-hak asasi penduduknya, antara lain kebebasan dan persamaan agama dan kebebasan untuk menyebarkan agama dengan syarat agar diperhatikan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan ketertiban dan keamanan umum serta menjamin dan mengusahakan perlakuan yang adil terhadap golongan minoritas.

Pasal 4

1. Dalam peraturan tata negara yang akan dibuat oleh negara harus dimuat pembentukan suatu Badan Perwakilan di mana juga terwakili golongan minoritas yang sesuai dengan jumlahnya atau dilihat dari kedudukannya dalam masyarakat atau kepentingan dalam kebudayaan dan perekonomian wajar mendapat perhatian.
2. Dalam peraturan tata negara yang akan disusun oleh negara di samping Badan Perwakilan sebagai dimaksud dalam ayat 1, dapat juga dibentuk suatu senat, di mana secara khusus akan terwakili daerah-daerah atau golongan organisasi.
3. Tugas senat dibatasi pada turut membuat undang-undang organik dan anggaran, akan tetapi kepadanya tidak perlu diberi hak untuk mengubah rencana undang-undang.

Pasal 5

1. Negara memperkenankan kepada kelompok-kelompok rakyat untuk menentukan nasib sendiri melalui saluran demokratis dan berdasarkan peraturan yang disusun oleh Mahkota Belanda dengan permufakatan dengan negara dan kepada kelompok-kelompok tersebut yang tetap berada di wilayah Negara Indonesia Timur diberikan kebebasan untuk hidup sesuai dengan kepribadian masing-masing, dalam hal ini termasuk juga mengurus rumah tangga sendiri.
2. Dalam tindakan yang akan diambil untuk membagi-bagi wilayah negara dalam daerah-daerah otonom harus dipergunakan sebagai pedoman keinginan penduduk yang bersangkutan, hal ini merupakan suatu unsur terpenting.
3. Negara berkewajiban memperhatikan kedudukan istimewa daerah-daerah swapraja.

Pasal 6

1. Untuk Negara Indonesia Timur diangkat seorang Komisaris Mahkota yang mempunyai tugas terhadap negara sebagai berikut:
 - a. memberi nasehat dan bantuan dalam persiapan penyusunan peraturan tata negara, dalam hal menyusun jawatan-jawatan dan juga di dalam hal perundang-undangan dan pemerintahan pada umumnya;
 - b. menjaga agar kepada kelompok-kelompok penduduk yang beraneka ragam diberi perlakuan yang adil dan agar asas lain yang dimuat dalam pasal 2 sampai dengan 5 ditaati.
2. Untuk melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam ayat 1 sub a, Komisaris Mahkota atas permintaan pemerintah negara dapat menyediakan pegawai-pegawai untuk dipekerjakan kepada negara.

Pasal 7

1. Apabila disangka oleh negara atau badan-badannya dilakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan bunyi atau jiwa peraturan ini, dan bila tidak dicapai suatu kata sepakat mengenai suatu sengketa, Komisaris Mahkota dapat memajukan persoalannya pada suatu badan yang ditunjuk berdasarkan permupakatan yang memutuskan berdasarkan peraturan yang dibuat pada perundingan tersebut, akan tetapi dengan pengertian apabila badan banding tersebut belum dapat disusun atau tidak dapat bertugas, maka wewenang untuk memutuskan dalam masalah banding akan dilaksanakan oleh Mahkota Belanda atau oleh suatu badan yang ditentukan olehnya.
2. Badan banding yang disebut dalam ayat terdahulu berwenang juga memutuskan dalam sengketa mengenai batas-batas wewenang yang dimajukan oleh pemerintah negara kepada badan banding tersebut.
3. Dalam peraturan mengenai pembentukan badan banding diberikan juga petunjuk untuk menjamin agar keputusan yang akan diambil oleh badan banding itu benar, misalnya dengan jalan membatalkan tindakan atau peraturan yang bertentangan dengan bunyi atau jiwa peraturan ini.

BAB II

Pasal 8

1. Pada saat berlakunya peraturan ini, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di wilayah Negara Indonesia Timur tetap berlaku, selama ia oleh kuasa yang berwenang negara tidak diubah, ditambah atau dibatalkan.
2. Apabila Pemerintah Pusat mengajukan permintaan untuk minta bantuan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepada negara atau badan-badannya, maka harus diperoleh persetujuan dari Badan Perwakilan. Dalam hal yang sangat mendadak dapat diputuskan berdasarkan persetujuan dengan pemerintah negara.

Pasal 9

1. Selama negara belum dapat melaksanakan wewenangnya, maka Pemerintah Pusat dapat melaksanakannya oleh badan-badannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mengenai tugas-tugas yang menjadi wewenang negara akan tetapi olehnya belum dapat dilaksanakan dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagai tindakan memberi bantuan dan oleh karena itu peraturan-peraturan di bidang undang-undang dan administratif

dapat diubah olehnya apabila negara tidak bertindak demikian.

Pasal 10

Menunggu adanya ketetapan mengenai kedudukan daerah-daerah swapraja dalam susunan tata negara, maka peraturan yang ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pemerintah Pusat segera dapat melimpahkan kepada negara tugas-tugas yang berkaitan dengan daerah swapraja, dalam hal ini termasuk juga tugas-tugas yang dibarikan sebagai bantuan.

Pasal 11

Selama pembentukan daerah-daerah sebagai dimaksud dalam pasal 14 pada saat berlakunya peraturan ini belum selesai dan pembentukan itu tidak dapat diselesaikan berdasarkan kesanggupan sendiri atau kesanggupan bagian-bagiannya, maka pembentukan daerah-daerah yang bersangkutan, termasuk juga penentuan dari wilayahnya, dilaksanakan oleh badan-badan Pemerintah Pusat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Selama hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan negara belum diatur sedemikian rupa sehingga negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran sendiri, maka oleh Pemerintah Pusat akan dilakukan pengawasan terhadap negara yang ditetapkan oleh undang-undang (ordonansi).

BAB III

Pasal 13

Negara Indonesia Timur pada awal menjalankan wewenangnya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14

1. Pada awal Negara Indonesia Timur terdiri dari himpunan-himpunan masyarakat otonom sebagai berikut:
 - a. Daerah "Sulawesi Selatan" terdiri dari wilayah Karesidenan Sulawesi dan lingkungannya, di mana termasuk daerah-daerah swapraja Wajo, Soppeng, Malusetasi, Suppa, Sawito, Batulappa, Kassa, Sidenreng, Tanete, Rappang, Malwa, Enrekang, Malua, Buntu-Batu, Alla, Barru, Soppengriaja, Majene, Pambuang, Cenrana, Balangnipa, Binuang, Mamuju, Tapang, Luwu, Tanah Toraja, Buton, Laiwu, Goa dan Bone;
 - b. daerah "Minahasa";
 - c. daerah "Sahingge dan Talaud" terdiri dari daerah-daerah swapraja Tabukan, Siau, Kendahe-Tahuna, Manganitu, Tagulandang, dan kepulauan Talaud yang satu dari yang lain tergabung dalam satu federasi;
 - d. daerah "Sulawesi Utara" terdiri dari bagian Gorontalo dan anak bagian Bolaang Mongondow termasuk daerah-daerah swapraja Buol, Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintuana dan Kadipang Besar;
 - e. daerah "Sulawesi Tengah" terdiri dari wilayah bagian Poso dan Donggala, termasuk di dalamnya daerah-daerah swapraja Tojo, Poso, Lorea, Unauna, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaell, Palu, Sigi-Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Tolitoli yang satu dengan yang lain tergabung dalam satu federasi;

- f. daerah "Bali" terdiri dari daerah-daerah swapraja Buleleng, Jemberana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem, yang semuanya tergabung dalam satu federasi;
 - g. daerah Lombok terdiri dari bagian Lombok;
 - h. daerah "Sumbawa" terdiri dari daerah-daerah swapraja Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang semuanya tergabung dalam satu federasi;
 - i. daerah "Flores" terdiri dari daerah-daerah swapraja Ende, Lio, Larantuka, Andonara, Sikka dan lingkungannya, Ngada, Riung, Nageh-Keo, dan Manggarai, yang satu dengan yang lain tergabung dalam satu federasi;
 - j. daerah "Sumba" terdiri dari daerah-daerah swapraja Kanatang, Lewa, Tabundung, Melolo, Rendih, Wakjelo, Masukarera, Lavera, Wajjewa, Kodi, Lauli, Memboro, Umbu Ratu Ngayy, Anakala, Wanokaka, dan Lamboja, yang satu dengan yang lain tergabung di dalam satu federasi;
 - k. daerah "Timor dan kepulauan di sekitarnya" terdiri dari daerah-daerah swapraja Kupang, Amarasi, Fatulu, Amfuan, Roti, Sawu, Mollo, Amanuban, Miomaffa, Behoki, Insana, Belu, Alor, Barnusa, Pantar Matahari Naik, Kul, Kolana, Batulolong, Dan Puremau, yang satu dengan yang lain tergabung dalam satu federasi;
 - l. daerah "Maluku Selatan" terdiri dari wilayah Maluku Selatan;
 - m. daerah "Maluku Utara" terdiri dari daerah-daerah swapraja Ternate, Tidore dan Bacan yang satu dengan yang lain tergabung dalam satu federasi.
2. Dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan negara, pembagian-pembagian sebagai termaktub dalam ayat 1 dapat diubah dengan memperhatikan asas-asas yang dimuat dalam pasal 5.

Pasal 15

1. Pemerintah negara dilaksanakan oleh kepala negara bersama-sama dengan menteri-menteri yang diangkat berdasarkan pasal 16.
2. Kepala negara berpangkat Presiden dan adalah warganegara Indonesia, atau selama peraturan mengenal kewarganegaraan Indonesia belum ditetapkan ia harus orang Indonesia.
Dia harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
3. Dia harus dipilih oleh Badan Perwakilan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh badan ini.
4. Buat pertama kalinya kepala negara dipilih oleh Konperensi Denpasar dengan masa jabatan sampai berlakunya Peraturan Tata Negara Indonesia Timur.
5. Semua keputusan kepala negara baik dalam bidang perundang-undangan maupun di bidang pemerintahan harus turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seorang menteri yang bersangkutan.
6. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan.

Pasal 16

1. Kepala Negara mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
2. Di dalam menjalankan wewenangnya yang dimaksud di dalam ayat 1, maka adalah merupakan asas yang wajib dipakal sebagai pedoman agar kabinet yang dibentuk senantiasa dapat bekerjasama dengan Badan Perwakilan.

Pasal 17

Sebelum diadakan perundang-undangan negara mengenai perwalian jabatan kepala negara itu, maka bila dia sakit atau berhalangan, jika perlu jabatan tersebut diisi oleh ketua Badan Perwakilan di mana jabatannya dilaksanakan untuk sementara waktu oleh wakilnya.

Pasal 18

1. Sebagai Badan Perwakilan Sementara bertindak utusan-utusan yang dikumpulkan untuk menghadiri pembicaraan-pembicaraan yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1946 di Denpasar dan bertujuan untuk membentuk Negara Indonesia Timur, dan oleh karena itu akan duduk dalam Badan Perwakilan Sementara:
 - a. para utusan dari daerah-daerah;
 - b. anggota-anggota yang diangkat dan mewakili kelompok-kelompok penduduk tertentu atau golongan minoritas, aliran kepentingan khusus atau aliran-aliran masyarakat dan rohani.
2. Nama-nama para anggota Badan Perwakilan Sementara akan dicatat dalam surat keputusan Gubernur Jenderal yang akan dimuat dalam lembaran negara.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan negara dapat ditentukan bahwa anggota-anggota Badan Perwakilan Sementara dapat ditambah dengan jalan pengangkatan sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan memperhatikan ayat 1 sub b.
Kepala negara berwenang melakukan pengangkatan tersebut.
4. Badan Perwakilan Sementara berwenang segera membentuk senat berdasarkan peraturan perundang-undangan negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

Pasal 19

1. Selama negara belum mengadakan peraturan dalam hal ini, lowongan yang mungkin timbul dalam Badan Perwakilan Sementara harus diisi melalui cara yang sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang dijalankan dalam hal menunjuk seorang anggota yang kursinya menjadi lowong.
2. Apabila mengisi lowongan yang dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan jalan pemilihan dan anggota yang telah dipilih turut serta dalam sidang setelah cara pemilihan disetujui oleh Badan Perwakilan Sementara.
3. Badan Perwakilan Sementara, apabila ketentuan-ketentuan termaktub di dalam pasal 23 tidak dipenuhi, harus diganti oleh Badan Perwakilan baru selambat-lambatnya dua tahun setelah sidang pertama.
4. Anggota-anggota Badan Perwakilan Sementara tidak boleh dituntut secara hukum mengenai hal-hal yang mereka ucapkan dalam rapat-rapat badan tersebut atau apa yang diajukan secara tertulis.

Pasal 20

1. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Badan Perwakilan selama penetapan untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak dilimpahkan oleh kekuasaan pembuat perundang-undangan kepada badan lain.
2. Rencana peraturan perundang-undangan dapat diajukan oleh pemerintah kepada Badan Perwakilan atau oleh beberapa anggota Badan Perwakilan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan negara dan selama ketentuan tersebut belum ada, maka jumlah anggota tersebut adalah 5 orang.

Pasal 21

1. Badan Perwakilan berhak mengadakan perubahan dalam rencana undang-undang yang diajukan.
2. Rencana undang-undang yang diterima oleh Badan Perwakilan setelah diubah atau tidak dan kemudian disetujui oleh pemerintah, mendapatkan kekuatan sebagai undang-undang.

Pasal 22

Pengumuman resmi undang-undang negara dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya, selama mengenai hal ini tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Setelah oleh badan perundang-undangan negara diterima suatu peraturan tata negara, akan dilangsungkan pemilihan umum, setelah itu akan dibentuk Badan Perwakilan yang baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila peraturan tata negara diterima sekali lagi oleh Badan Perwakilan yang baru, maka peraturan tata negara itu akan mendapatkan kekuatan undang-undang mulai pada saat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Mulai saat itu ketentuan yang termaktub dalam Bab III menjadi batal, selama ia tidak dapat dipertahankan lagi sebagai peraturan peralihan berdasarkan undang-undang negara.

2. Peraturan perundang-undangan negara yang dimaksudkan di depan menetapkan juga hari pengangkatan kepala negara dan menteri-menteri dengan pengertian bahwa pengangkatan ini dilaksanakan setelah terbentuk Badan Perwakilan yang baru atau Badan Perwakilan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 3.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini yang dapat disebut "Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur" mulai berlaku pada hari yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

KEPUTUSAN LETNAN GUBERNUR JENDERAL
HINDIA BELANDA
Tanggal 14 Desember 1946, No. 12*

Memperhatikan pasal 18 ayat 2 Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (De Grote Oost), (Lembaran Negara 1946, No. 143), menyetujui dan memahami;

Pertama: mencatat, bahwa Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur terdiri dari:

A. Wakil-wakil daerah sebagaimana nama-namanya tertera di bawah ini:

a. Sulawesi Selatan:

1. Andi Romda, Sidenreng (Pabitjara Arawa)
2. La Sandara, Kapitan Lalwui
3. Andi Iskandar, anggota Pemerintah Swapraja Soppeng (Aru Bila)
4. Madoesila Daeng Paraga, anggota terkemuka Pemerintah Swapraja Bone (Makadange Tara Bone)
5. Andi Massarappli, anggota Pemerintah Swapraja Bone (Aru Macege)
6. Andi Gappa, anggota Pemerintahan Swapraja Bone (Aru Tibojong)
7. Abdoellah Daeng Mappoedji, hakim Pengadilan Negeri Makasar
8. Baoesat, anggota pamong praja (bestuursassistent) di Bone
9. Mohammad Akib, Ketua Majelis Islam di Makasar
10. Nadjamoedin Daeng Malewa, anggota Badan Penasehat Komisariat Pemerintahan Umum
11. Mr. S. Binol, hakim Pengadilan Negeri di Makasar
12. G.R. Pantouw, Direktur Perusahaan Pengangkutan "Indonesia"
13. Sonda Daeng Mattajang, penasehat Urusan Masalah Bumi-putera, Residen Sulawesi Selatan
14. Mr. Tadjoeeddin Noor, pengacara di Makasar
15. R. Claproth, Ketua Kamar Perwalian di Makasar
16. Mr. Teng Tjing Leng, pengacara di Makasar dan anggota Badan Pemerintahan Kotapraja Makasar (Wethouder).

b. Minahasa:

17. E.D. Dengah, anggota Badan Penasehat Komisariat Pemerintahan Umum
18. E. Katoppo, Inspektur Perguruan Rendah
19. H.J. Wenas, Hoekoembesar di Tondano.

c. Sulawesi Utara:

20. Ajoeba Wartabone, Kepala Pemerintahan setempat di Gorontalo
21. Tom Olih, Penasehat untuk Masalah-masalah Islam, Ketua Majelis Islam di Gorontalo.

* Terjemahan dari: De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. Deel II. Bijlagen. Uitgegeven door het Algemeen Regeringscommissariaat voor Borneo en de Grote Oost. Batavia: G. Kolff & Co., hal. 47-48.

- d. Sulawesi Tengah (Donggala):
 - 22. Tajjo Idjasa, Kepala Distrik Palu Timur
 - 23. Daeng Maradja Lamakarate, anggota pamong praja (bestuurs-assistent) di Sabang.
- Sulawesi Tengah (Poso):
 - 24. Wongko Lemba Talasa, anggota pamong praja di Poso
 - 25. Inchi Achmad Dachlan, Wakil Penilik Sekolah di Banggal.
- e. Sangihe dan Talaud:
 - 26. J.E. Tatengkeng, Kepala Sekolah Rendah di Taruna
 - 27. W.A. Sarapil, Kepala Pemerintah Swapraja Tabukan.
- f. Maluku Utara:
 - 28. Iskandar Mohammad Djabir Sjah, Sultan Ternate
 - 29. Zainal Abidin Alting, Pejabat Jogugu Tidore.
- g. Maluku Selatan:
 - 30. J. Tahija, Kapten KNIL, anggota Dewan Penasehat Komisariat Pemerintahan Umum
 - 31. D.P. Tahitoe, dokter pemerintah

B. Nama-nama anggota-anggota yang diangkat dan mewakili golongan penduduk terdiri dari golongan kecil (minoritas) atau aliran-aliran masyarakat yang mewakili kepentingan-kepentingan istimewa dan rohani:

1. Achmad Sjechan Bachmid, pemimpin surat kabar "Pelita" di Tomohon
2. Th. van Emstede, wakil bagian niaga Jawatan Kehutanan di Makasar
3. H.A. van Goor, wakil perusahaan British-American Tobacco Co. di Makasar
4. Han Boen Hlong, Sekretaris Perkumpulan Cina di Ambon
5. Sech Hasan bin Alamoedi, anggota Dewan Sulawesi Selatan
6. Th. M.H. Jansen, pengawas Jawatan Impor dan Ekspor dan Cukai di Ambon
7. Adrial Doema Andilolo, Ketua Dewan Pemerintahan Swapraja Tanah Toraja
8. Hadji Mochtar Loethfi, penasehat Masalah-Masalah Islam di Timur Besar
9. A.C. Manoppo, wartawan dari Bolaang Mongondow
10. R.J. Matekohy, administrator keuangan kelas 2
11. Oen Sik Hien, pedagang di Denpasar
12. Dr. L. Onvlee, sarjana bahasa dari Persatuan Buku Injil Belanda (Nederlands Bijbelgenootschap) di Sumba
13. F.A.P. Pitoi, bintang Angkatan Laut Kerajaan Belanda
14. Mr. The Sing Hoo, pengacara di Manado
15. Mr. Tjia Kok Tjiang, pegawai tata usaha, Kepala Bagian Hukum pada Kantor Residen di Makasar.

Kedua: menetapkan agar ketetapan ini dimuat di dalam lembaran negara Hindia Belanda.

Tembusan dan sebagainya.

Dikeluarkan pada tanggal
31 Desember 1946

Atas perintah Letnan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda,
Sekretaris Pemerintah Pertama,

E.O. van Boetzelaer

E.O. van Boetzelaer

**SUSUNAN BADAN PERWAKILAN SEMENTARA DAN
FRAKSI-FRAKSI DALAM BADAN PERWAKILAN
SEMENTARA NEGARA INDONESIA TIMUR
24 Desember 1946 — 20 Desember 1949**

- I. 24 Desember 1946 — 29 April 1947
Ketua : Mr. Tadjoeeddin Noor
Sekretaris : Mr. Van Gelder
- II. 2 Juni 1947 — 20 Desember 1949
Ketua : Mohammad Kaharoeddin, Sultan Sumbawa
Sekretaris : Dr. H. Stolk.

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 32 anggota
2. Fraksi Pembangunan, terdiri dari 37 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 17 anggota
3. Fraksi Koalisi Demokrat, terdiri dari 20 anggota
4. Fraksi. I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1948:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 35 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demokrat, terdiri dari 5 anggota
4. Fraksi "Liar" (yang tidak termasuk golongan fraksi), terdiri dari 12 anggota
5. Fraksi I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1948:

susunannya sama seperti di dalam sidang pertama

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1949:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demokrat, terdiri dari 5 anggota
4. Fraksi "Liar" terdiri dari 13 anggota
5. Fraksi I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1949:

susunannya sama seperti di dalam sidang pertama.

**SUSUNAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT
NEGARA INDONESIA TIMUR DAN FRAKSI-FRAKSI
21 Februari 1950 — 16 Agustus 1950**

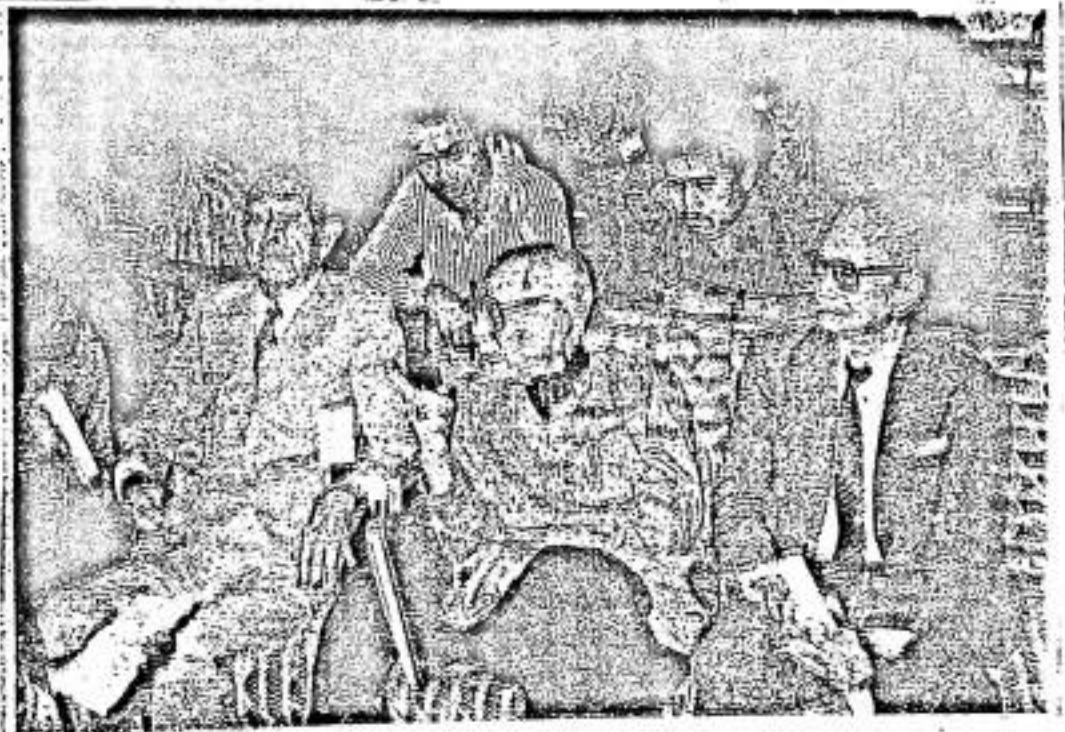
Ketua : Hoesain Poeang Limboro.
Sekretaris : Dr. H. Stolk

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1950:

1. Fraksi Kesatuan Nasional. 20 anggota
2. Fraksi Nasional Progresif. 25 anggota
3. Fraksi Kerakyatan. 10 anggota
4. Fraksi Indonesia. 8 anggota
5. Fraksi Sosialis. 3 anggota.



Gereja Khatolik di Malino (Sulsel) yang dipakai sebagai tempat sidang dan rapat Konperensi Malino.



Mantan Perdana Menteri NIT, Ide Anak Agung Gde Agung (tengah) diaampingi Mantan Wakil Ketua Parlemen NIT, Mr. Teng Tjing Leng dan Mantan Menteri Penerangan NIT G.R. Pantouw saat menghadiri Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur di Malino tanggal 16 Juli 1992.



Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Nook membuka Konferensi Malino pada tanggal 16 Juli 1946



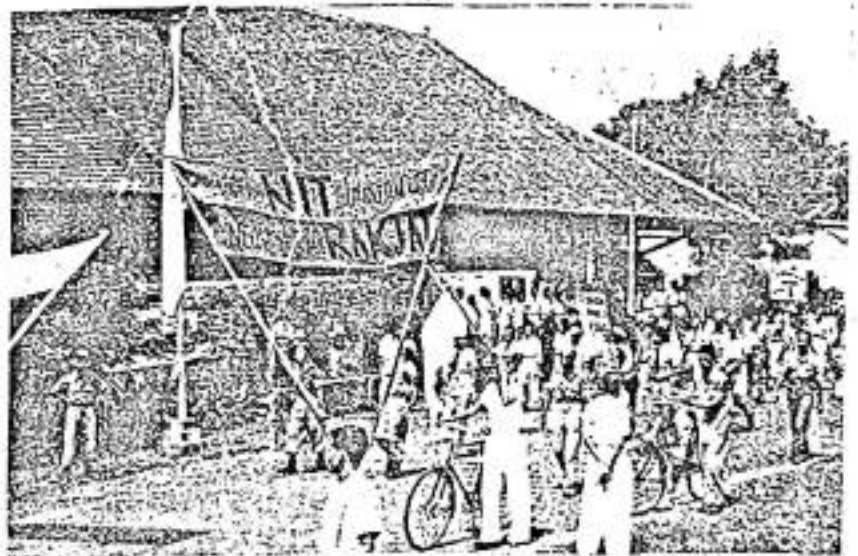
Perdana Menteri NIT, Naojamuddin Daeng Malewa, mengucapkan pidato samoutannya pada waktu pelantikan Kabinet Nadjamuddin Dg. Malewa bertempat di bekas Gedung Dewan Rakyat di Pejambon, Jakarta pada tanggal 13 Januari 1947



Demonstrasi Rakjat (17-3-1950)



Demonstrasi Rakjat (17-3-1950)



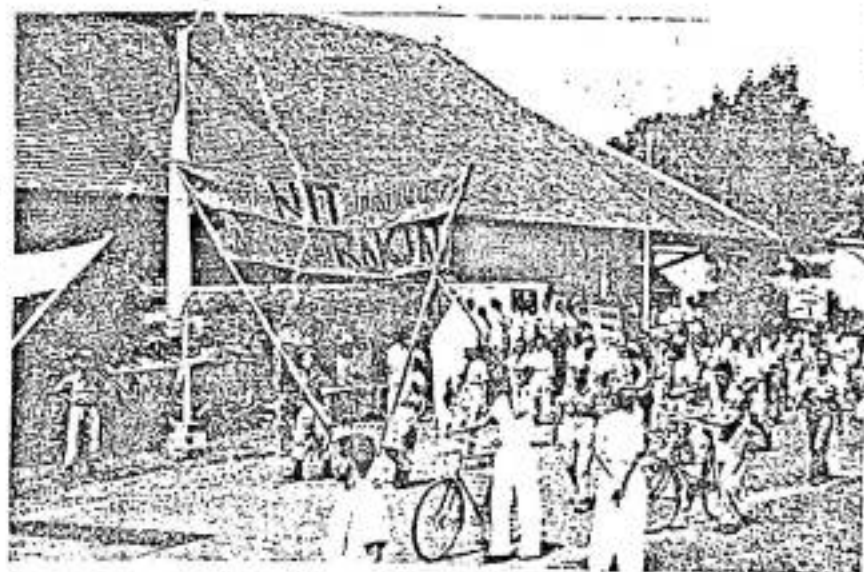
Rakjat Menuntut pembubaran N.A.T. (17-3-1950)



Demonstrasi Rakjat (17-3-1950)



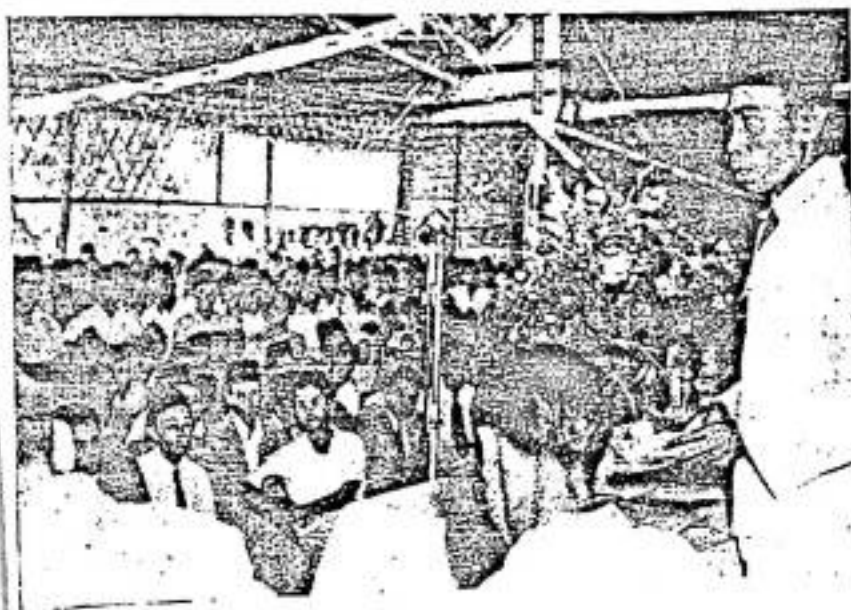
Demonstrasi Rakjat (17-3-1950)



Rakjat Menuntut pembubaran N.I.T. (17-3-1950)



Disamping pemerintah NIT aktif mendjalankan rentjananja, Kaum Pedjuang Sul. Selatan pun aktif mengadakan Konperensi di Polong-Bangkeng yang menuntut secepat mungkin didatangkan TNI di Sulawesi.



Sdr. Makkaraeng dg Djarung Pelopor Kaum Pedjuang bersendjata di Sulawesi Selatan sedang berpidato pada Konperensi Polong Bangkeng.



Saat yang pertama kali merajakan 17 Agustus diibu kota Sulawesi (Makassar) Perajaan ini baru dapat ditakukan dengan meriah pada tgl. 17 Agustus 194 selama daerah Sulawesi termasuk dalam daerah Pendudukan Belanda. Lapangan Karebosi Makassar dibandjiri oleh lautan manusia.